



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025



**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2025**

Ihktisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya dalam **peningkatan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani**. Penyusunan laporan ini berpedoman pada prinsip akuntabilitas, transparansi, serta pengukuran kinerja berbasis hasil.

Tujuan utama pembangunan sektor pertanian dan pangan adalah terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan serta meningkatnya kesejahteraan petani melalui optimalisasi sumber daya pertanian, peningkatan produktivitas, serta penguatan sistem pelayanan publik yang efektif dan responsif.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, ditetapkan beberapa sasaran strategis, yaitu:

1. **Meningkatnya ketersediaan pangan**, yang diwujudkan melalui upaya peningkatan produksi komoditas pangan utama, penguatan cadangan pangan, serta pengendalian kerawanan pangan.
2. **Meningkatnya produksi pertanian**, melalui penerapan teknologi budidaya, penyediaan sarana prasarana pertanian, pendampingan petani, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian.
3. **Meningkatnya kualitas pelayanan publik**, melalui penyederhanaan prosedur layanan, peningkatan kompetensi aparatur, pemanfaatan sistem informasi, serta peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan sektor pertanian dan pangan.

Secara umum, capaian kinerja pada tahun pelaporan menunjukkan tren yang positif, yang tercermin dari meningkatnya produksi komoditas pertanian, terjaganya ketersediaan pangan daerah, serta meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan, seperti perubahan iklim, keterbatasan sarana prasarana, fluktuasi harga komoditas, dan dinamika sosial ekonomi petani yang memerlukan penguatan strategi dan sinergi lintas sektor.

Melalui LKjIP ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan pada tahun berikutnya, guna mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh dan kesejahteraan petani yang lebih baik.

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Profil Organisasi.....	4
1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi.....	4
1.3.2 Sumber Daya Manusia.....	11
1.3.3 Sumber Daya Anggaran.....	16
1.4 Aspek dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	17
1.4.1 Aspek Strategis	17
1.4.2 Isu Strategis Perangkat Daerah.....	19
1.5 Sistematika Penulisan.....	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	21
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja PD.....	21
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan 2025.....	23
2.3 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025.....	24
2.4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2025.....	34
2.5 Hasil Tindak Lanjut Tahun 2025.....	35
2.6 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.....	41
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	46
3.1 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025.....	46
3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.....	46
3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.....	64
3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (SPM).....	68

3.1.4	Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.....	69
3.1.5	Analisis atas efisiensi sumber daya (anggaran).....	70
3.1.6	Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	71
3.2	Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	74
3.3	Inovasi.....	82
3.4	Penghargaan.....	87
BAB IV PENUTUP.....		94
4.1	Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja.....	94
4.2	Rencana Tindak Lanjut.....	94
LAMPIRAN.....		96
1. Daftar referensi 2. SK Tim Penyusun LKjIP 2025 3. SK Penetapan LkjIP 2025 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 5. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 6. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025 7. SK IKU Tahun 2021-2026 8. Laporan Kemajuan Realisasi Fisik dan Keuangan s/d Desember 2025 9. Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester I Tahun 2025 10. Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester II Tahun 2025		

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin.....	15
Tabel 1.2 Pagu Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.....	16
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026.....	22
Tabel 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2025.....	23
Tabel 2.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2025.....	24
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2025.....	34
Tabel 2.5 Tindak Lanjut Catatan LHE AKIP 2025.....	36
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	47
Tabel 3.2 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	48
Tabel 3.3 Target dan Realisasi.....	49
Tabel 3.4 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 1 Meningkatnya ketersediaan pangan.....	50
Tabel 3.5 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 2. Meningkatnya produksi pertanian.....	55
Tabel 3.6 Capaian Program, Kegiatan, dan SubKegiatan terhadap Sasaran 3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.....	60
Tabel 3.7 Capaian Kinerja Tahun 2025.....	64
Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	75

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Cascading Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2025.....	11
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo.....	14

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan juga sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*, serta sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi.

Besar harapan kami bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai informasi maupun evaluasi kinerja bagi Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Purworejo, 13 Februari 2026

Kepala Dinas Ketahanan Pangan

dan Pertanian Kabupaten Purworejo,



Bagas Adi Karyanto, S.Sos., M.M.

Pembina Tingkat I / IV b

NIP 197304211993021001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sejalan dengan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 yang salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi: azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Atas dasar hal tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo disusun sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya, serta pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik sebagai bentuk perwujudan dari *Good Governance* dan *Clean Government*.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan instrument dan metode pertanggungjawaban pemerintah yang pada intinya mengungkapkan target perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis atas capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya. LKjIP menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumberdaya yang berbasis kinerja sebagai bagian dari

pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo menggerakkan sektor sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan secara akuntabel, dengan mengukur hasil-hasilnya baik secara fisik maupun finansial. Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan target kinerja yang ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, instansi pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas perencanaan yang telah ditetapkan. Instruksi Presiden ini mewajibkan seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Tujuan dan sasaran strategis organisasi, kebijakan/ program dan indikator kinerja), mengukur keberhasilan organisasinya melalui seperangkat indikator kinerja yang ditetapkannya sendiri, dan melaporkan akuntabilitas kinerjanya.

1.2 Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP adalah untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberikan mandat/ amanat. Dengan demikian LKjIP merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima instansi pemerintah tersebut. Selain itu penyampaian LKjIP kepada pihak yang berhak (secara hirarki) juga bertujuan untuk memenuhi antara lain:

- a. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;

- b. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo;
- c. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo.

Dasar hukum penyusunan LKjIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
- c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- h. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4);
- i. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 124 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 124 Seri D Nomor 9)

1.3 Profil Organisasi

1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo terdiri atas:

- a. Kepala Dinas

Kepala Dinas bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan dan pertanian sesuai dengan kewenangan Daerah. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan tugas melaksanakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan bidang pangan, sarana dan perlindungan pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, serta prasarana dan penyuluhan pertanian;
- 2) Pelaksanaan kebijakan bidang pangan, sarana dan perlindungan pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, serta prasarana dan penyuluhan pertanian;

- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pangan, sarana dan perlindungan pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, serta prasarana dan penyuluhan pertanian;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas bidang pangan, sarana dan perlindungan pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, serta prasarana dan penyuluhan pertanian;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati berkaitan dengan tugas dan fungsi.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo. Sekretariat bertugas mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan memberikan dukungan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo. Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
- 2) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
- 3) Pengoordinasian pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan;
- 4) Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi keuangan;
- 5) Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian;
- 6) Pelayanan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo berkaitan dengan tugas dan fungsi

Susunan organisasi Sekretariat terdiri atas:

- 1) Sub Bagian Perencanaan;
- 2) Sub Bagian Keuangan;
- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana.

c. Bidang Pangan

Bidang Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo. Bidang Pangan bertugas mengelola sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, menangani kerawanan pangan dan mengawasi keamanan pangan.

Bidang Pangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyediaan infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan;
- 2) Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- 3) Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan;
- 4) Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
- 5) Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan per kapita/ tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
- 6) Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan;
- 7) Penanganan kerawanan pangan kewenangan;
- 8) Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar;
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo
berkaitan dengan tugas dan fungsi

Kepala Bidang Pangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi
dibantu oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana.

d. Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian

Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo. Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian bertugas menyediakan dan mengembangkan sarana pertanian dan melaksanakan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.

Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- 2) Peningkatan mutu dan peredaran benih/ bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan;
- 3) Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer
- 4) Pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/ bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- 5) Pengelolaan sumber daya genetik hewan, tumbuhan dan mikro organisme;
- 6) Penyediaan benih/ bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam satu daerah Kabupaten/ Kota lain;
- 7) Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo berkaitan dengan tugas dan fungsi

Kepala Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian dalam

melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana.

e. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner bertugas melaksanakan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- 2) Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan;
- 3) Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
- 4) Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
- 5) Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan;
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo berkaitan dengan tugas dan fungsi

Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana.

f. Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian

Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian dipimpin oleh Kepala

Bidang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo. Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian bertugas menyediakan dan mengembangkan prasarana pertanian, melaksanakan penyuluhan pertanian, dan menerbitkan perizinan usaha pertanian.

Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengembangan prasarana pertanian;
- 2) Pembangunan prasarana pertanian;
- 3) Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/ galur ternak;
- 4) Pengembangan lahan penggembalaan umum;
- 5) Pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- 6) Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam wilayah daerah;
- 7) Penerbitan izin usaha produksi benih/ bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan, rumah sakit hewan/ pasar hewan, rumah potong hewan;
- 8) Izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan;
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo berkaitan dengan tugas dan fungsi

Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana.

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

UPT dibentuk untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/ atau tugas teknis penunjang tertentu di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo. UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo.

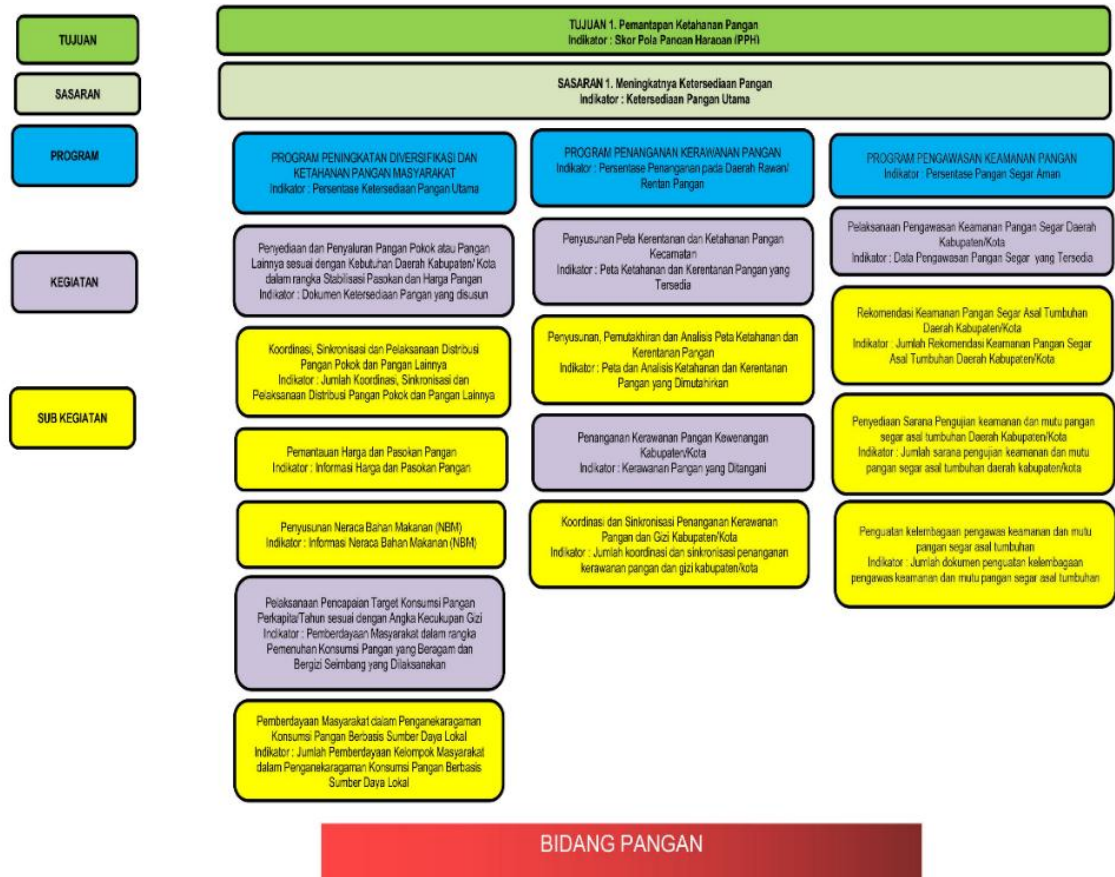
h. Jabatan Fungsional

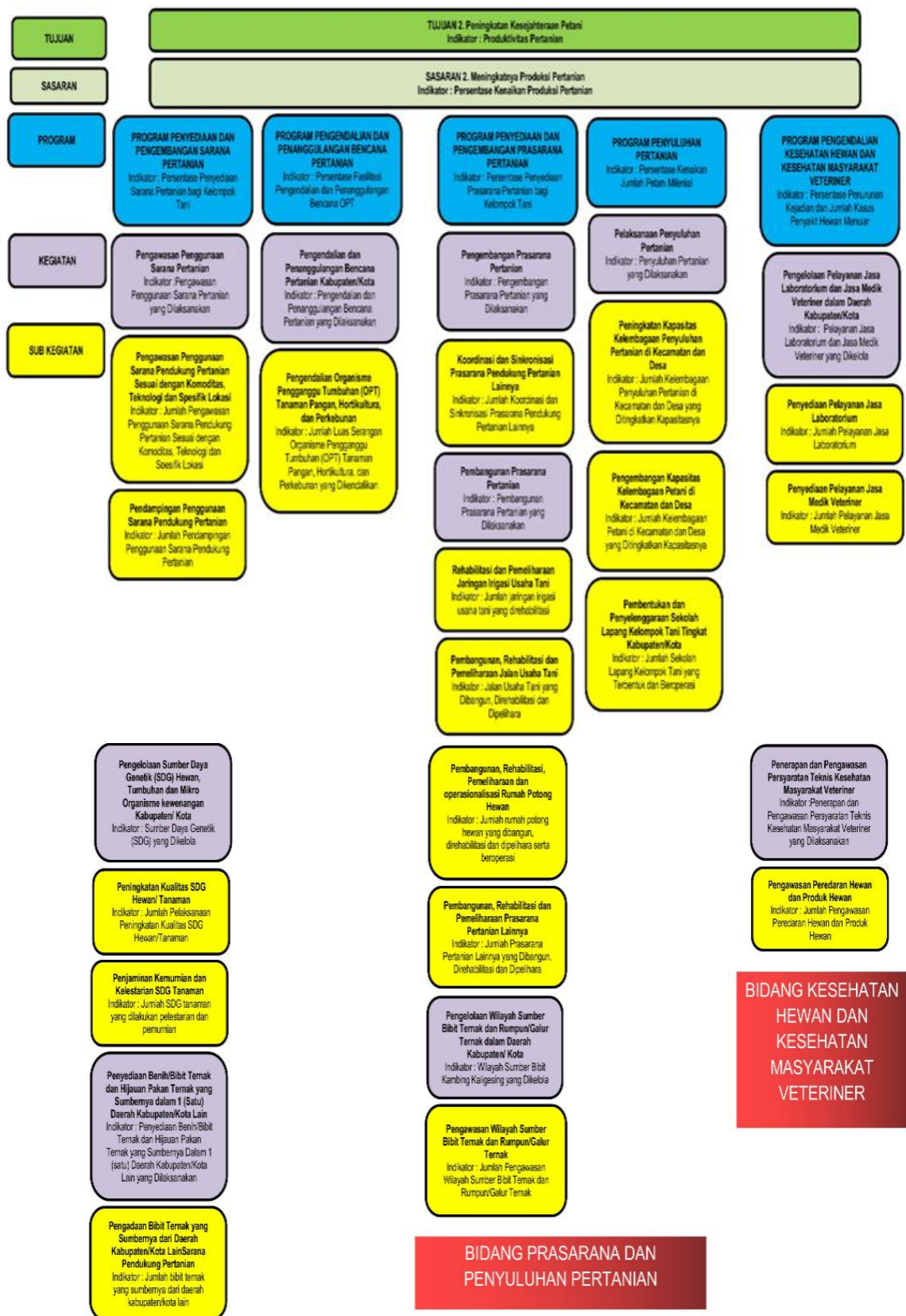
Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana fungsional pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo. Pejabat fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional. Kedudukan Pejabat Fungsional ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat Fungsional dalam pelaksanaan tugas dapat bekerja secara individu dan/ atau dalam Tim Kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/ atau keterampilan. Penugasan secara individu dan/ atau dalam Tim Kerja dapat melibatkan Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi dan/ atau lintas Perangkat Daerah.

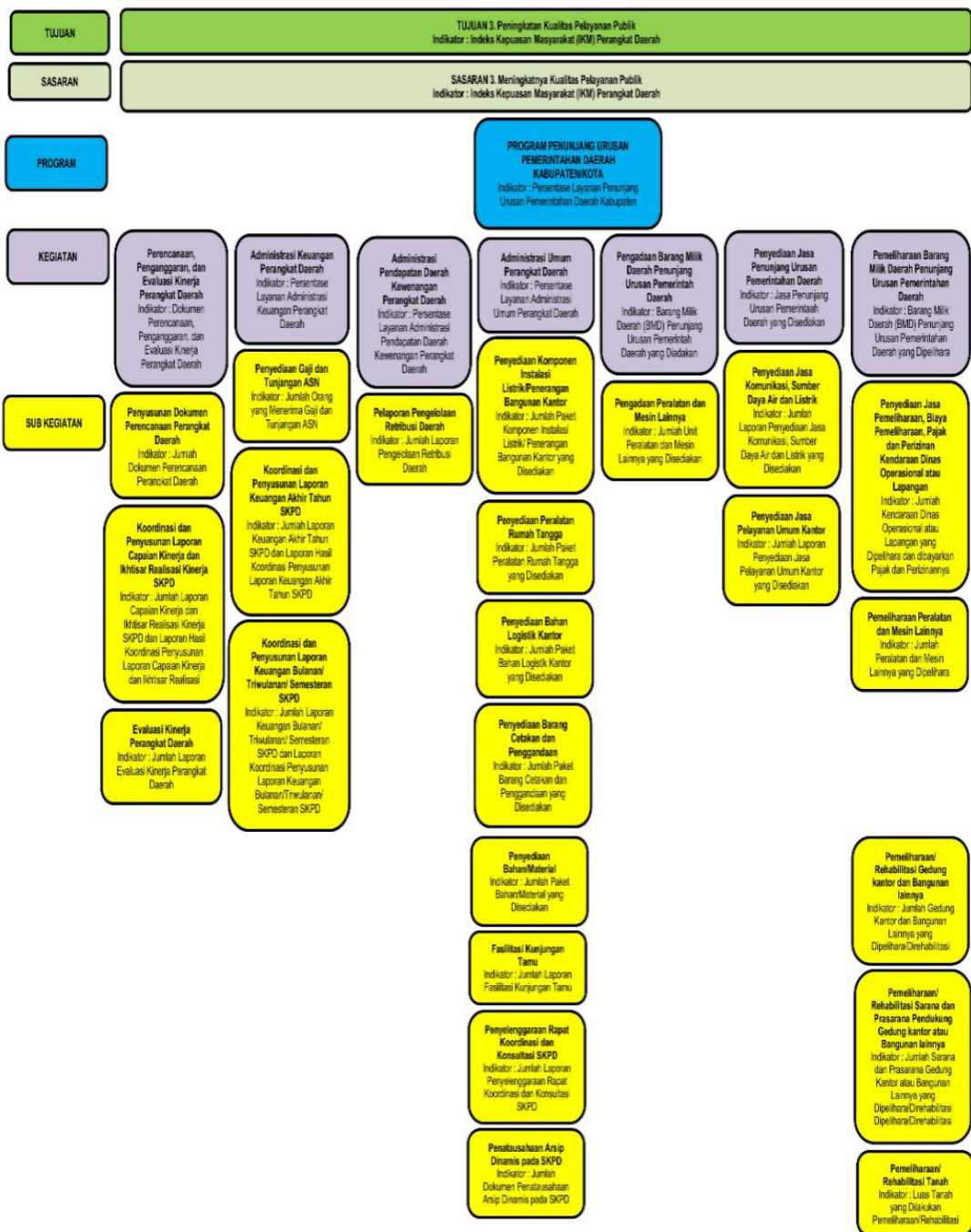
Cascading kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada Gambar 1.1. dibawah ini:

Gambar 1.1.

Cascading Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2025



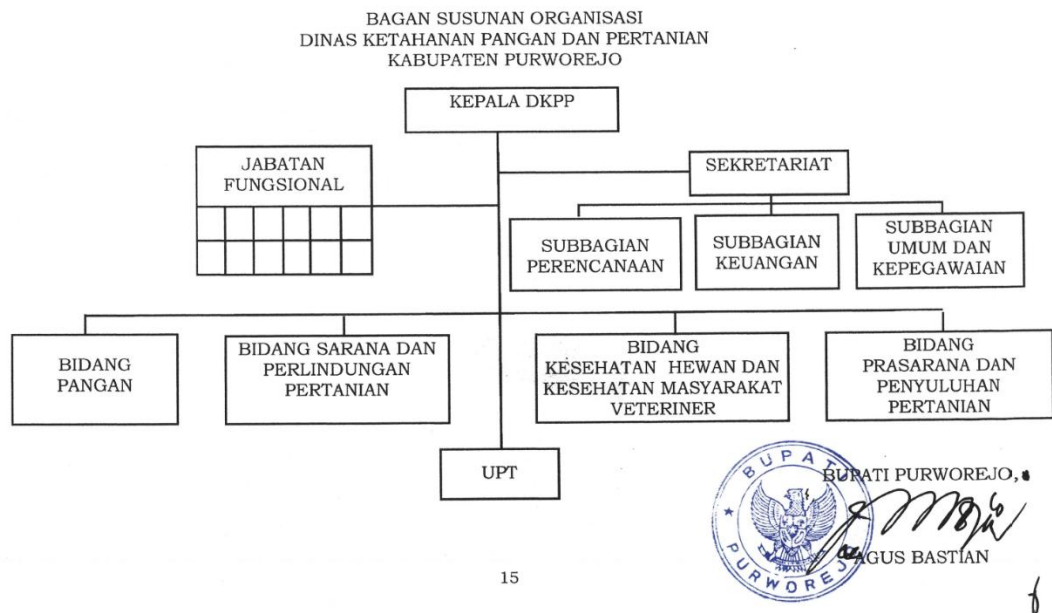




SEKRETARIAT

Adapun Bagan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo dapat dilihat dibawah ini:

Gambar 1.2.
Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Purworejo



1.3.2 Sumber Daya Manusia

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo dalam menjalankan kegiatan administrasi dan operasionalnya didukung oleh pegawai sebanyak 94 orang ASN, yang terdiri dari 45 orang PNS dan 43 orang PPPK, dan 6 orang PPPK Paruh Waktu.

Berikut ini adalah tabel pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo berdasarkan pada golongan dan jenis kelamin:

Tabel 1.1.
Jumlah ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Purworejo Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
IV/b	1	0	1
IV/a	1	5	6
III/d	5	9	14
III/c	2	2	4
III/b	7	6	13
III/a	2	1	3
II/d	2	0	2
II/c	2	0	2
X	2	3	5
IX	3	1	4
VII	0	2	2
V	32	6	38
Jumlah	59	35	94

Secara kuantitatif, jumlah SDM telah mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Namun demikian, dari sisi kualitas dan pemerataan kompetensi masih diperlukan penguatan, terutama pada Jabatan Fungsional Teknis Pertanian dan Pengelola Layanan Publik.

Beberapa tantangan dalam pengelolaan SDM antara lain:

- a. Keterbatasan jumlah tenaga teknis spesifik dibandingkan dengan luas wilayah kerja dan beban tugas;
- b. Kebutuhan peningkatan kompetensi dalam pemanfaatan teknologi pertanian dan sistem informasi;
- c. Regenerasi aparatur akibat adanya pegawai yang memasuki masa purna tugas.

Secara keseluruhan, dukungan SDM yang ada telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran meningkatnya ketersediaan pangan, produksi pertanian, serta kualitas pelayanan publik. Namun demikian,

peningkatan kapasitas dan penguatan kompetensi secara berkelanjutan tetap diperlukan untuk menjawab tantangan pembangunan sektor pertanian ke depan

1.3.3 Sumber Daya Anggaran

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo pada Tahun Anggaran 2025 dalam menjalankan kegiatan didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 45.963.836.383,00 yang terdiri dari beberapa sumber dana sebagai berikut:

Tabel 1.2.

Pagu Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025

No	Sumber Dana	Pagu Anggaran (Rp)
1	Dana Alokasi Umum	42.856.710.563,00
2	DAK Non Fisik	1.248.414.000,00
3	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	1.858.711.820,00
Total		45.963.836.383,00

Pada Tahun Anggaran 2025, pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo didukung oleh pagu anggaran sebesar **Rp.45.963.836.383,00**. Dukungan anggaran tersebut menjadi instrumen utama dalam memastikan terlaksananya urusan pemerintahan dibidang pangan dan pertanian secara efektif, terukur, dan berorientasi pada hasil.

Pagu anggaran yang bersumber dari beberapa sumber pendanaan mencerminkan adanya sinergi antara pembiayaan daerah dan dukungan dari pemerintah pusat maupun sumber sah lainnya. Komposisi sumber dana

tersebut memberikan ruang fiskal bagi Perangkat Daerah dalam membiayai belanja operasional, belanja program prioritas, kegiatan teknis lapangan, serta dukungan administrasi perkantoran.

Secara umum, alokasi anggaran diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis, antara lain peningkatan ketersediaan dan stabilitas pangan, peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, penguatan pengawasan keamanan pangan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Efektivitas pemanfaatan anggaran sangat ditentukan oleh ketepatan perencanaan, konsistensi pelaksanaan kegiatan, serta pengendalian dan evaluasi secara berkala.

Dengan dukungan pagu anggaran tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo memiliki kapasitas fiskal yang memadai untuk menjalankan program prioritas daerah. Namun demikian, optimalisasi penyerapan dan efisiensi belanja tetap menjadi perhatian agar setiap rupiah anggaran dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pencapaian indikator kinerja secara akuntabel.

1.4 Aspek dan Isu Strategis Perangkat Daerah

1.4.1 Aspek Strategis

Dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo mempunyai 3 (tiga) sasaran, yaitu meningkatnya ketersediaan pangan, meningkatnya produksi pertanian, dan meningkatnya kualitas pelayanan publik. Strategi untuk mencapai sasaran tersebut, meliputi:

- a. Meningkatkan produksi melalui intensifikasi usahatani tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- b. Pencegahan, pengendalian dan pemantauan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) serta melakukan mitigasi akibat

- bencana alam, banjir dan kekeringan;
- c. Melaksanakan penambahan/ rehabilitasi infrastruktur pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - d. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan melalui modernisasi pertanian;
 - e. Melaksanakan peningkatan kemampuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - f. Penguatan kelembagaan petani.

Tiga sasaran strategis Perangkat Daerah, yaitu meningkatnya ketersediaan pangan, meningkatnya produksi pertanian, dan meningkatnya kualitas pelayanan publik, memiliki peran penting dalam mendukung Misi 2 dan Misi 4 Pemerintah Daerah. Sasaran meningkatnya ketersediaan pangan dan produksi pertanian secara langsung mendukung Misi 2, yaitu meningkatkan daya saing sektor pertanian dalam arti luas yang sinergi dengan pengembangan UMKM, perdagangan, dan industri. Ketersediaan pangan yang stabil menjamin pasokan bahan baku, sedangkan peningkatan produksi memperkuat kapasitas suplai dan nilai tambah agribisnis. Sinergi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian yang berkelanjutan.

Sementara itu, sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik mendukung Misi 4, yaitu peningkatan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel akan meningkatkan kepuasan masyarakat serta efektivitas pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran.

Dengan demikian, ketiga sasaran tersebut saling mendukung dalam mewujudkan pembangunan sektor pertanian yang berdaya saing serta tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan akuntabel.

1.4.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya antara lain:

- a. Meningkatkan ketersediaan pangan yang beranekaragam berbasis potensi sumber daya lokal yang disertai penguatan jaringan distribusi dalam rangka menciptakan pemerataan pangan;
- b. Meningkatkan nilai tambah serta daya saing pertanian melalui peningkatan produktivitas, pengembangan pertanian organik, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital;
- c. Meningkatkan pelayanan publik yang responsive berbasis teknologi dan informasi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Purworejo sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan latar belakang, maksud dan tujuan, profil organisasi serta isu strategis.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja Organisasi

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

b. Realisasi Anggaran

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja PD

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo mempunyai tujuan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 dan merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dan merupakan landasan maupun pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak 2021-2026.

Dalam memenuhi tujuan tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo berdasarkan pada Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Visi Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026: “Purworejo Berdaya Saing 2025”
2. Misi Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026:
 - a. Meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia yang unggul dalam arti luas mengedepankan kompetensi keahlian dan keilmuan yang berbasis pada religiusitas masyarakat;
 - b. Meningkatkan daya saing sektor pertanian dalam arti luas yang sinergi dengan pengembangan UMKM, perdagangan dan industri;
 - c. Meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah berbasis UMKM, perdagangan, industri serta potensi pariwisata dan seni budaya;
 - d. Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*);
 - e. Meningkatkan daya saing sarana prasarana dan infrastruktur yang didukung kemajuan teknologi informasi.

Dengan dasar Visi dan Misi Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 tersebut diatas, maka tujuan yang akan dicapai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Pemantapan ketahanan pangan;
2. Peningkatan kesejahteraan petani;
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo dan merupakan penjabaran konkret dari tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketersediaan pangan;
2. Meningkatnya produksi pertanian;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Tabel 2.1.

Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Pemantapan Ketahanan Pangan		Skor Pola Pangan Harapan	85,90	85,90	87,83	88,80	89,77	90,73	91,70
		Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Ketersediaan Pangan Utama	246,09	246,09	248,00	249,00	250,00	251,00	152,00
2	Peningkatan Kesejahteraan Petani		Nilai Tambah Pertanian		104,00	104,60				
			Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)		104,00	104,60				
		Meningkatnya Produktivitas Pertanian	Produktivitas Tanaman Pangan		353.112,20	353.889,10				
		Meningkatnya Populasi Ternak Ruminansia	Persentase Kenaikan Populasi Ternak Ruminansia	2,00	2,00	2,00				
		Meningkatnya Produksi Pertanian	Persentase Kenaikan Produksi Pertanian			1,25	1,25	1,25	1,25	1,25

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	80,49	80,37	80,50	80,55	81,00	82,00	83,00
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	80,49	80,37	80,50	80,55	81,00	82,00	83,00

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan 2025

Berikut merupakan strategi dan arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo

Tabel 2.2.

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2025

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Peningkatan produksi dan peningkatan sarana	1. Peningkatan ketersediaan pangan yang merata 2. Peningkatan sistem dan jaringan distribusi pangan
2	Meningkatnya Produksi Pertanian	1. Penerapan Teknologi anjuran spesifikasi lokasi 2. Perluasan areal tanam 3. Penerapan Teknologi Inseminasi Buatan (IB)	1. Peningkatan produksi melalui intensifikasi pertanian dan mekanisasi pertanian 2. Pengamanan produksi dari gangguan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) 3. Pelatihan kompetensi Inseminator
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Manajemen berbasis Risiko 2. Manajemen pengelolaan keuangan 3. Manajemen SDM	Peningkatan kompetensi bagi ASN

2.3 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

Target dan anggaran program, kegiatan dan subkegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.3.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan
dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100,00%	20.120.625.763
1.1	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>3 dokumen</i>	<i>49.685.300</i>
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19 dokumen	23.852.600
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 laporan	25.832.700
1.2.	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>100,00 %</i>	<i>19.226.323.113</i>
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	208 orang/ bulan	19.218.500.013
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 laporan	500.000

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	26 laporan	7.323.100
1.3.	<i>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</i>	100,00 %	513.200
1.3.1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1 laporan	513.200
1.4.	<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	100,00 %	460.000
1.4.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	460.000
1.5.	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100,00 %	291.392.300
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	5.513.800
1.5.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	3.603.000
1.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	203.591.300

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1.5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	8.400.000
1.5.5	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	1 paket	3.380.000
1.5.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 laporan	1.800.000
1.5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	52.081.200
1.5.8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	13.023.000
1.6	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 laporan	232.708.250
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	88.075.250
1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	144.633.000
1.7	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara</i>	7 jenis	319.543.600
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	43.960.000

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 unit	196.320.000
1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 unit	17.320.000
1.7.4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	51.900.000
1.7.5	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	14 unit	8.540.000
1.7.6	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/ Rehabilitasi	0,0716 Ha	1.503.600
II	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Infrastruktur yang Disediakan	100,00 %	1.019.576.000
2.1	<i>Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Dibangun</i>	2 unit	1.019.576.000
2.1.1	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	2 unit	1.019.576.000
III	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	100,00 %	1.231.619.700

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
3.1	<i>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</i>	<i>Tersusunnya Dokumen Ketersediaan Pangan</i>	1 dokumen	67.963.900
3.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 dokumen	45.004.600
3.1.2	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	1 dokumen	10.708.000
3.1.3	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 dokumen	12.251.300
3.2	<i>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota</i>	<i>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan</i>	1 laporan	1.145.555.800
3.2.1	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	120,44 Ton	1.145.555.800
3.3	<i>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</i>	<i>Terlaksananya Pemberdayaan Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang</i>	5 kelompok	18.100.000
3.3.1	Pemberdayaan Masyarakat dalam panganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Panganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 laporan	18.100.000
III	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan pada Daerah Rawan/ Rentan Pangan	21,83%	61.464.900

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
3.1	<i>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</i>	<i>Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Disediakan</i>	<i>1 dokumen</i>	<i>7.410.500</i>
3.1.1.	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 dokumen	7.410.500
3.2	<i>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	<i>Kerawanan Pangan yang Ditangani</i>	<i>1 desa</i>	<i>54.054.400</i>
3.2.1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/ Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 laporan	54.054.400
IV	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Aman	100,00 %	24.791.500
4.1	<i>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Data Pengawasan Pangan Segar yang Tersedia</i>	<i>1 dokumen</i>	<i>24.791.500</i>
4.1.1	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	1 dokumen	4.675.700
4.1.2	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/ kota	1 dokumen	12.613.900
4.1.3	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 dokumen	7.501.900
V	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Penyediaan Sarana Pertanian bagi Kelompok Tani	143,23%	13.972.454.800
5.1	<i>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</i>	<i>Dokumen Pengawasan Penggunaan Sarana</i>	<i>1 dokumen</i>	<i>4.851.803.800</i>

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
		<i>Pertanian yang Dilaksanakan</i>		
5.1.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 laporan	4.525.923.800
5.1.2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 laporan	325.880.000
5.2	<i>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	<i>Sumber Daya Genetik (SDG) yang Dikelola</i>	<i>1 dokumen</i>	<i>3.306.991.075</i>
5.2.1	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 dokumen	2.888.843.575
5.2.2	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	2 (Varietas Unggul Baru) VUB	418.147.500
5.3	<i>Penyediaan Benih /Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain</i>	<i>Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan</i>	<i>1 dokumen</i>	<i>5.813.659.925</i>
5.3.1	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/ kota lain	879 Ekor	5.813.659.925
VI	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian bagi Kelompok Tani	82,22%	6.875.803.500

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
6.1	<i>Pembangunan Prasarana Pertanian</i>	<i>Pembangunan Prasarana Pertanian yang Dilaksanakan</i>	<i>1 dokumen</i>	<i>6.851.453.100</i>
6.1.1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	48 unit	5.349.097.700
6.1.2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 unit	66.515.000
6.1.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	16 Unit	1.435.840.400
6.3	<i>Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak</i>	<i>12 bulan</i>	<i>24.350.400</i>
6.3.1	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak	1 laporan	24.350.400
VII	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	19%	160.032.600
7.1	<i>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner yang Dikelola</i>	<i>1 dokumen</i>	<i>93.383.600</i>
7.1.1	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 laporan	93.383.600

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
7.2	<i>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</i>	<i>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner yang Dilaksanakan</i>	1 dokumen	66.649.000
7.2.1	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 laporan	66.649.000
VIII	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Fasilitas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT	100,00 %	154.209.400
8.1	<i>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota</i>	<i>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Dilaksanakan</i>	1 Laporan	154.209.400
8.1.1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	300 Ha	154.209.400
IX	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Jumlah Usulan Izin Usaha Pertanian	100,00 %	10.680.000
9.1	<i>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Fasilitas Rekomendasi Perizinan Usaha Pertanian</i>	1 dokumen	10.680.000
9.1.1	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	1 Laporan	10.680.000
X	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kenaikan Jumlah Petani Milenial	80%	2.332.578.220
10.1	<i>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</i>	<i>Terlaksananya Penyuluhan Pertanian</i>	16 kecamatan	2.332.578.220
10.1.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di	16 unit	1.357.814.000

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
	Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		
10.1.2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2500 Unit	904.104.220
10.1.3	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	5 unit	58.390.000
10.1.3	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	1 Unit	12.270.000

2.4 Perjanjian Kinerja tahun 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud dikarenakan kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;

- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Berikut Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2025:

Tabel 2.4.

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Purworejo Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Ketersediaan pangan utama	254,55 kg/ kapita
2	Meningkatnya Produksi Pertanian	Persentase kenaikan produksi pertanian	1,29 %
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	88,67

Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 20.120.625.763,00	APBD

2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Rp 1.019.576.000,00	APBD
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 1.231.619.700,00	APBD
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 61.464.900,00	APBD
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 24.791.500,00	APBD
5	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 13.972.454.800,00	APBD, DBHCHT
6	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 6.875.803.500,00	APBD
7	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 160.032.600,00	APBD
8	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp 154.209.400,00	APBD
	Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp 10.680.000,00	APBD
9	Program Penyuluhan Pertanian	Rp 2.332.578.220,00	APBD, DAK Non Fisik, DBHCHT
Jumlah		Rp 45.963.836.383,00	

2.5 Hasil Tindak Lanjut Tahun 2025

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo telah melaksanakan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja pada tahun

2025 dengan hasil rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5.

Tindak Lanjut Catatan LHE AKIP 2025

No	Catatan LHE AKIP 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut
A	Perencanaan Kinerja	
1	Melampirkan RKO Tahun 2025 dan dilegalformalkan (ditandatangani dan dicap stempel)	Melampirkan Rencana Kerja Operasional (RKO) Tahun 2025 yang telah disusun serta memastikan dokumen tersebut dilegalformalkan melalui proses penandatanganan oleh pejabat berwenang dan pembubuhan stempel resmi, sehingga dokumen dapat digunakan sebagai bukti administratif yang sah
2	Agar kedepannya mempublikasikan Dokumen Perencanaan Kinerja tepat waktu	Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan terhadap proses penyusunan serta publikasi Dokumen Perencanaan Kinerja, sehingga dokumen dapat dipublikasikan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3	Dokumen Perencanaan Kinerja agar sepenuhnya menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai	Melakukan penelaahan dan penyempurnaan terhadap Dokumen Perencanaan Kinerja agar penyusunannya lebih selaras dengan kebutuhan dan target kinerja yang sebenarnya perlu dicapai, sehingga dokumen dapat menggambarkan perencanaan kinerja secara lebih tepat, terukur, dan relevan
4	Target tahun selanjutnya harus memperhatikan realisasi tahun sebelumnya	Melakukan evaluasi terhadap realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya dan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan target kinerja pada tahun berikutnya, sehingga target yang ditetapkan lebih realistis dan terukur

No	Catatan LHE AKIP 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut
5	Melengkapi dokumen monitoring kinerja dan evaluasi Rencana Aksi Kinerja	Melengkapi dokumen monitoring kinerja dan evaluasi Rencana Aksi Kinerja secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga proses pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kinerja dapat terdokumentasi dengan baik
6	Melengkapi dokumen hasil analisis kinerja sebagai dasar perubahan dokumen perencanaan	Melengkapi dokumen hasil analisis kinerja dan menjadikannya sebagai dasar dalam melakukan penyesuaian atau perubahan terhadap dokumen perencanaan, sehingga proses perencanaan kinerja lebih berbasis pada hasil evaluasi dan capaian yang telah diperoleh
7	Melampirkan Perjanjian Kinerja (PK) eselon II, III, dan IV dan melampirkan Perjanjian Kinerja Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Fungsional Umum	Melampirkan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) untuk pejabat Eselon II, III, dan IV, serta melengkapi Perjanjian Kinerja bagi Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Fungsional Umum sebagai bagian dari kelengkapan dokumen kinerja
8	Pimpinan Perangkat Daerah terlibat secara langsung dalam penyusunan kinerja tahun 2025 disertai bukti dukungnya	Pimpinan Perangkat Daerah terlibat secara langsung dalam proses penyusunan kinerja serta melengkapi bukti dukung yang menunjukkan keterlibatannya tersebut
9	Melampirkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) seluruh pegawai	Melampirkan dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) seluruh pegawai sebagai bagian dari kelengkapan dokumen kinerja
B	Pengukuran Kinerja	
1	Membuat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data berupa: 1. SOP Pengukuran Kinerja	Menyusun pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data yang meliputi SOP Pengukuran Kinerja, SOP Pembuatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan, SOP Penyusunan Laporan Kinerja, serta buku/ panduan definisi

No	Catatan LHE AKIP 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut
	2. SOP Pembuatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan 3. SOP Penyusunan Laporan Kinerja 4. Buku/ panduan definisi operasional indikator kinerja organisasi sebagai rujukan/ yang berisikan penjelasan spesifik dari setiap indikator/ memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai suatu indikator serta memudahkan dalam proses pengukurannya	operasional indikator kinerja organisasi sebagai rujukan dalam memberikan penjelasan yang lebih spesifik terhadap setiap indikator dan memudahkan proses pengukurannya
2	Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja melalui teknologi informasi (aplikasi)	Memanfaatkan teknologi informasi berupa aplikasi sawiji untuk mengumpulkan data kinerja dan mengukur capaian kinerja secara lebih efektif, akurat, dan terintegrasi
3	Mengupload bukti dukung penilaian kinerja individu bulanan dan penilaian kinerja Perangkat Daerah yang telah ditandatangani oleh pimpinan Perangkat Daerah	Mengunggah bukti dukung penilaian kinerja individu bulanan serta penilaian kinerja Perangkat Daerah yang telah ditandatangani oleh pimpinan Perangkat Daerah, sehingga seluruh dokumen penilaian kinerja terdokumentasi secara lengkap dan resmi
4	Pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam penyesuaian (pemberian/	Menjadikan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penyesuaian tunjangan kinerja atau penghasilan, baik dalam bentuk pemberian

No	Catatan LHE AKIP 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut
	pengurangan) tunjangan kinerja/ penghasilan	maupun pengurangan, sehingga kebijakan pemberian tambahan kinerja lebih objektif dan berbasis capaian kinerja
5	Pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam penempatan/ penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional	Menjadikan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penempatan atau penghapusan jabatan, baik struktural maupun fungsional, sehingga pengelolaan Sumber Daya Manusia lebih objektif dan berbasis kinerja
6	Pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian (refokusing) organisasi	Menjadikan hasil pengukuran kinerja sebagai pertimbangan dalam penyesuaian atau refocusing organisasi, sehingga struktur dan fungsi organisasi lebih selaras dengan capaian kinerja yang nyata dan kebutuhan strategis
7	Membuat laporan realisasi anggaran per kegiatan tahun 2025	Menyusun laporan realisasi anggaran per kegiatan Tahun 2025 sebagai bagian dari dokumentasi pelaksanaan anggaran yang transparan dan akuntabel
8	Melampirkan bukti dukung pelaksanaan kegiatan sosialisasi disiplin pegawai dan melampirkan scan tes intelegensi pegawai atas kepedulian, sosialisasi Peraturan Bupati Purworejo tentang tambahan penghasilan pegawai Aparat Sipil Negara, disiplin pegawai	Melampirkan bukti dukung pelaksanaan kegiatan sosialisasi disiplin pegawai, sosialisasi Peraturan Bupati Purworejo tentang tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara
C	Pelaporan Kinerja	

No	Catatan LHE AKIP 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut
1	Menyusun bukti dukung laporan kinerja triwulanan dan semesteran	Menyusun dan melengkapi bukti dukung laporan kinerja triwulanan dan semesteran, sehingga pemantauan dan evaluasi kinerja dapat terdokumentasi secara lengkap dan akuntabel
2	Dokumen Laporan Kinerja dipublikasikan	Mempublikasikan dokumen Laporan Kinerja secara terbuka, sehingga informasi capaian kinerja dapat diakses dan dipertanggungjawabkan secara transparan
3	Agar kedepannya Dokumen Laporan Kinerja disampaikan tepat waktu	Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan penyusunan Dokumen Laporan Kinerja agar dapat disampaikan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan
4	Dokumen Laporan Kinerja agar sepenuhnya menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/ internasional (benchmark kinerja)	Menyusun Dokumen Laporan Kinerja yang menginformasikan hasil analisis dan evaluasi realisasi kinerja dibandingkan capaian kinerja dengan standar nasional maupun internasional sebagai benchmark, sehingga laporan lebih komprehensif dan berbasis perbandingan yang relevan
D	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	
1	Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dilaksanakan menggunakan teknologi informasi (aplikasi)	Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan memanfaatkan teknologi informasi berupa aplikasi sawiji, sehingga proses evaluasi lebih efisien, terintegrasi, dan terdokumentasi secara akurat
2	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja	Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai dasar untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, sehingga pengelolaan kinerja menjadi lebih efektif dan berkelanjutan

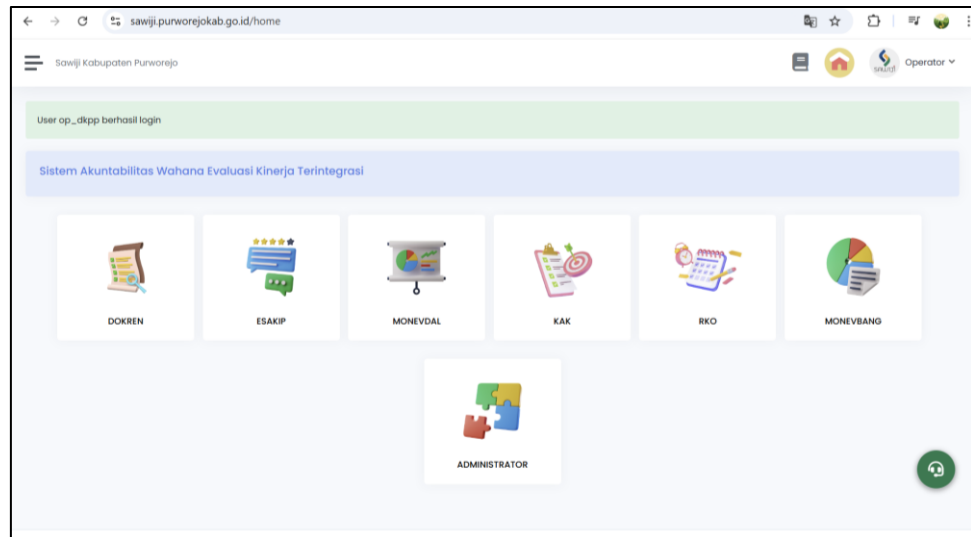
No	Catatan LHE AKIP 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut
3	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja	Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kinerja, sehingga pencapaian tujuan organisasi dapat lebih optimal
4	Melakukan upaya inovatif yang bisa dihargai untuk pemenuhan kriteria yang ditetapkan atas pemanfaatan implementasi SAKIP	Melakukan upaya inovatif dalam pemanfaatan implementasi SAKIP, sehingga pengelolaan akuntabilitas kinerja menjadi lebih kreatif, efektif, dan sesuai standar
5	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, sehingga perbaikan dan peningkatan kinerja dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan

2.6 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Dalam memenuhi target capaian kinerja, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo telah memanfaatkan beberapa aplikasi sebagai instrumen pendukung, diantaranya:

a. Sawiji

Aplikasi Sawiji merupakan elektronik monitoring dan evaluasi APBD dan elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Purworejo kerjasama dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY).



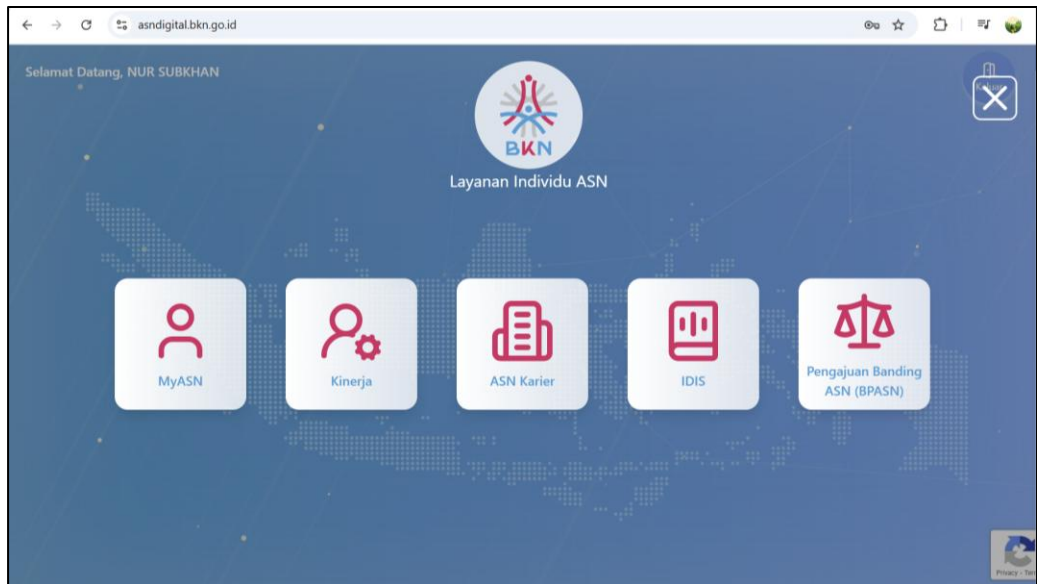
b. e-kinerja BKN

e-kinerja adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk menilai kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS). Aplikasi ini dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

e-kinerja digunakan untuk:

- 1) Menyusun dan menilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
- 2) Mengelola data kehadiran, kinerja, prestasi, dan tunjangan PNS;
- 3) Membantu percepatan layanan kepegawaian;
- 4) Membantu monitoring dan pengambilan keputusan terkait pengembangan karier, peningkatan keterampilan, dan manajemen sumber daya manusia

e-kinerja dapat diakses secara online di mana saja dan kapan saja. Aplikasi ini terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN). e-kinerja dapat membantu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ASN.



c. ESR Menpan

e-SAKIP REVIU adalah aplikasi yang digunakan untuk mengunggah dokumen SAKIP. Aplikasi ini dikembangkan oleh Kementerian PANRB. Merupakan aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja.

SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur dan melaporkan kinerja instansi pemerintah. Tujuannya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah.

Dokumen-dokumen yang dapat diunggah pada e-SAKIP REVIU adalah dokumen-dokumen SAKIP. Dokumen-dokumen SAKIP tersebut antara lain:

- 1) Indikator Kinerja Utama (IKU);
- 2) Rencana Strategis (RENSTRA);
- 3) Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- 4) Perjanjian Kinerja (PK);
- 5) Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
- 6) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

The screenshot shows a web dashboard for 'esr.menpan.go.id'. The main content area is titled 'Dashboard' and displays a table with 12 columns: OPD, Renstra, IKU, Renja/RKT, PK, Rencana Aksi, Laporan Kinerja, DPA, Pohon Kinerja, LHE AKIP Int, TL LHE AKIP, Lap Monev, and Lainnya. The table lists various entities, including 'DINSOSDALDUKKB', 'DKPP', 'DPPRAPMD', and several 'Kecamatan' (Districts) like Bagelen, Banyuwangi, Bayan, and Bener. Green checkmarks are visible in the 'Renstra', 'IKU', and 'Renja/RKT' columns for the first three rows. The table is paginated, showing 'Showing 21 to 30 of 48 entries'.

OPD	Renstra	IKU	Renja/RKT	PK	Rencana Aksi	Laporan Kinerja	DPA	Pohon Kinerja	LHE AKIP Int	TL LHE AKIP	Lap Monev	Lainnya
DINSOSDALDUKKB	✓	✓	✓									
DKPP	✓		✓					✓				
DPPRAPMD												
evaluator												
Inspektorat												
Inspektorat												
Kecamatan Bagelen												
Kecamatan Banyuwangi												
Kecamatan Bayan												
Kecamatan Bener												

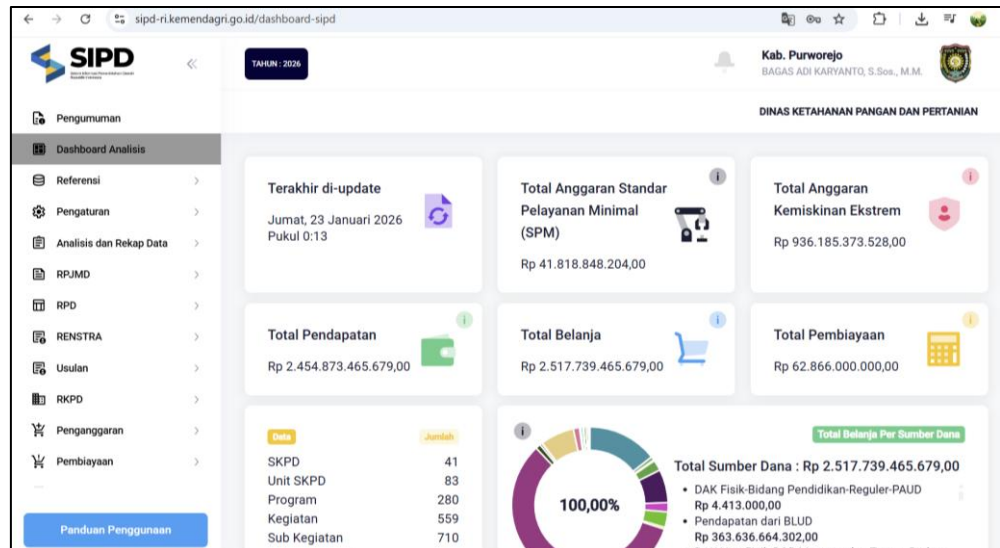
d. SIPDRI

SIPD RI adalah singkatan dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia. SIPD RI merupakan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang digunakan untuk mengelola data dan informasi pemerintahan daerah.

SIPD RI bertujuan untuk menyatukan data perencanaan, keuangan, dan pelaporan daerah di seluruh Indonesia. Dengan demikian, layanan pemerintahan dapat berjalan lebih efisien dan efektif.

Manfaat SIPD RI di antaranya:

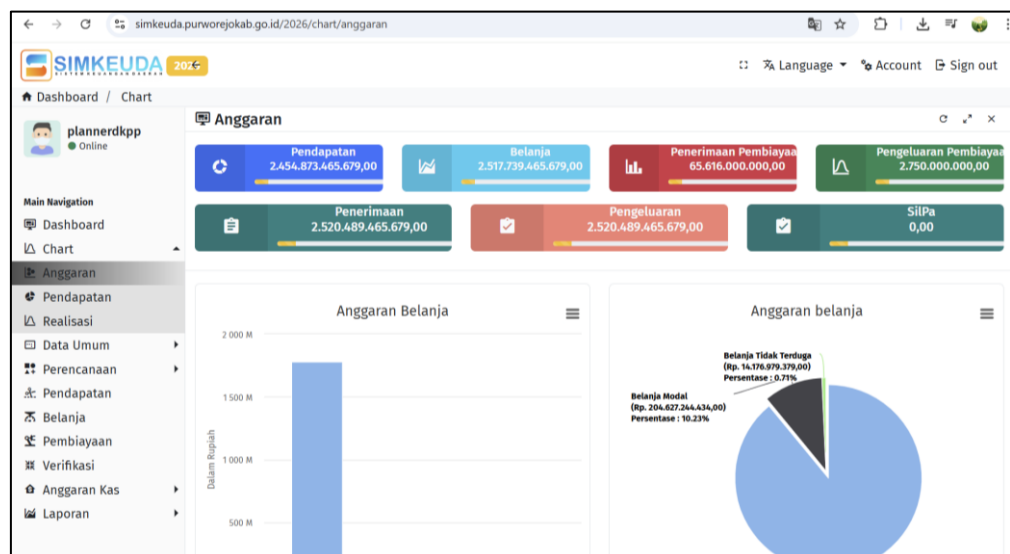
- 1) Memudahkan proses perencanaan dan keuangan daerah secara elektronik;
- 2) Memudahkan evaluasi perencanaan keuangan, kinerja, dan produk hukum secara elektronik;
- 3) Meningkatkan efisiensi dalam proses perencanaan dan penganggaran;
- 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efisien;
- 5) Meminimalisir duplikasi anggaran yang direncanakan dalam proses penyusunan APBD



e. SIMKEUDA

SIMKEUDA adalah singkatan dari Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah. SIMKEUDA merupakan perangkat lunak berbasis web yang digunakan untuk membantu pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

SIMKEUDA dapat meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah daerah, baik dalam hal efektivitas, efisiensi, maupun cakupannya. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Purworejo. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

3.1.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja menunjukkan tingkat pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan selama periode pelaporan. Realisasi yang sesuai atau melampaui target mencerminkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, sedangkan apabila terdapat

selisih, hal tersebut menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan di periode berikutnya. Dengan demikian, analisis perbandingan ini menjadi dasar dalam menilai capaian kinerja serta menentukan langkah tindak lanjut yang lebih tepat dan terukur.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Pada Tahun 2025, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Untuk mengukur kinerja sasaran strategis ditunjukkan dengan capaian Indikator kinerja sasaran yang sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2.
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formula
1	Meningkatnya ketersediaan pangan	Ketersediaan pangan utama	Ketersediaan pangan utama (beras) per tahun per kapita.	Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama (beras) pada tahun n (kg) / Jumlah penduduk pada tahun n
2	Meningkatnya produksi pertanian	Persentase kenaikan produksi pertanian	Persentase kenaikan produksi pertanian tahun n terhadap produksi pertanian tahun sebelumnya (n-1).	$\frac{(\text{Jumlah produksi pertanian tahun } n - \text{Jumlah produksi pertanian tahun } n-1)}{\text{Jumlah produksi pertanian tahun } n} \times 100\%$
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai hasil survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik terhadap 9 (sembilan) unsur penilaian: 1) Persyaratan, 2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, 3) Waktu Penyelesaian, 4) Biaya/ Tarif, 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, 6) Kompetensi Pelaksana, 7) Perilaku Pelaksana, 8) Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan, serta 9) Sarana dan Prasarana. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik pada tahun yang tertentu.	Nilai hasil survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik terhadap 9 (sembilan) unsur penilaian. (Nilai IKM Semester 1 + IKM Semester 2) / 2

Berdasarkan setiap pernyataan sasaran strategis sesuai dengan formula pengukuran kinerja organisasi tersebut diatas, maka dilakukan analisis pengukuran capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Target dan Realisasi

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2024	2025		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Ketersediaan pangan utama (kg per kapita)	254,54	254,55	259,49	101,94
2	Persentase kenaikan produksi pertanian (%)	1,28	1,29	1,30	100,78
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	88,66	88,67	88,71	100,04

Berdasarkan Tabel 3.3. dapat diketahui bahwa Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo memenuhi Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan kategori sangat baik karena realisasi melebihi 100% untuk ketiga sasaran strategis.

Indikator sasaran strategis 1. Ketersediaan pangan utama dari target 254,55 kg per kapita realisasi 259,49 kg per kapita sehingga memperoleh kategori sangat tinggi (101,94%). Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2024 konsumsi beras Kabupaten Purworejo sebesar 80,60 kg per kapita sehingga angka 259,49 kg per kapita menunjukkan potensi surplus pangan beras yang cukup besar, yang berarti secara kuantitas produksi beras sangat mencukupi kebutuhan penduduk.

Surplus ini penting untuk menjamin ketahanan pangan lokal, mengurangi risiko kekurangan pangan, memberikan peluang ekspor atau distribusi ke daerah lain yang mungkin kekurangan, dan menjadi cadangan strategis pangan jika terjadi bencana atau gangguan produksi di masa depan.

Meskipun ketersediaan cukup, perlu dipastikan kualitas beras terjaga agar aman dan layak konsumsi. Distribusi pangan merata, tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu sehingga semua penduduk dapat menikmati ketersediaan ini, serta adanya aksesibilitas ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memperoleh beras.

Tantangan dan risiko yang dihadapi antara lain: kerusakan pascapanen dan penyimpanan, fluktuasi harga dan pasar, ketergantungan pada satu jenis pangan (beras).

Surplus ketersediaan beras didukung oleh Kabupaten Purworejo merupakan daerah penghasil padi. Ketersediaan pangan utama khususnya padi melebihi kebutuhan penduduk. Adapun program dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis 1 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.4.
Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 1
Meningkatnya ketersediaan pangan

Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan		Persentase Infrastruktur yang Disediakan (%)	100,00	100,00	100,00
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung	Infrastruktur Pendukung	2	2	100,00

Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
	Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kemandirian Pangan yang Dibangun (unit)			
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (unit)	2	2	100,00
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		Persentase Ketersediaan Pangan Utama (%)	100,00	321,95	321,95
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen Ketersediaan Pangan yang Disusun (dokumen)	1	1	100,00
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (dokumen)	1	1	100,00
	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan (dokumen)	1	1	100,00
	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (dokumen)	1	1	100,00
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	1	1	100,00

Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
		yang Dilaksanakan (laporan)			
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota (ton)	120,44	120,44	100,00
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan Yang Beragam dan Bergizi Seimbang yang Dilaksanakan (kelompok)	5	5	100,00
	Pemberdayaan Masyarakat dalam penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (laporan)	1	1	100,00
Program Penanganan Kerawanan Pangan		Persentase Penanganan pada Daerah Rawan/Rentan Pangan (%)	21,83	21,83	100,00
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Disediakan (dokumen)	1	1	100,00
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (dokumen)	1	1	100,00

Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kerawanan Pangan yang Ditangani (dokumen)	1	1	100,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/ Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/ kota (laporan)	1	1	100,00
Program Pengawasan Keamanan Pangan		Persentase Pangan Segar Aman (%)	100,00	100,00	100,00
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Data Pengawasan Pangan Segar yang Tersedia (dokumen)	1	1	100,00
	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota (dokumen)	1	1	100,00
	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (dokumen)	1	1	100,00
	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (dokumen)	1	1	100,00

Program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis no 1 yaitu meningkatnya ketersediaan pangan dengan indikatornya ketersediaan pangan

utama diampu oleh Bidang Pangan, dimana mencakup aspek mulai dari ketersediaan pangan, akses pangan serta kualitas konsumsi pangan.

Ada empat program yang dilaksanakan pada urusan pangan yaitu Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan, dan Program Pengawasan Keamanan Pangan.

Indikator sasaran strategis 2. Persentase kenaikan produksi pertanian dari target 1,29% realisasi 1,30% sehingga memperoleh kategori sangat tinggi (100,78). Meskipun secara umum produksi pertanian mengalami kenaikan tetapi hanya sektor perkebunan dan peternakan yang mengalami kenaikan, sedangkan sektor tanaman pangan dan hortikultura mengalami penurunan.

Keberhasilan kenaikan produksi pada sektor perkebunan dan peternakan sangat dipengaruhi oleh kombinasi faktor teknis, manajerial, lingkungan, dan ekonomi. Pendekatan yang komprehensif mencakup peningkatan kualitas bibit, penerapan teknologi tepat guna, manajemen sumber daya yang baik, serta dukungan kebijakan dan akses pasar yang memadai sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan di kedua sektor tersebut.

Sektor tanaman pangan mengalami penurunan produksi meskipun relatif stabil. Penurunan pada komoditas jagung dan kacang hijau, tetapi komoditas padi mengalami kenaikan cukup signifikan. Adanya kegiatan Luas Tambah Tanam (LTT) yang bertujuan mengoptimalkan lahan tidur dan intensifikasi untuk meningkatkan intensitas tanam padi, sehingga menyebabkan produksi padi mengalami kenaikan dan sebagian komoditas hortikultura mengalami penurunan.

Sektor hortikultura mengalami penurunan khususnya di komoditas buah-buahan karena pola cuaca tidak menentu dan perubahan musim hujan ke musim kemarau yang tidak seperti biasanya menyebabkan bunga buah-buahan menjadi rontok.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis 2 yaitu meningkatnya produksi pertanian dengan indikator persentase kenaikan produksi pertanian diampu oleh urusan pertanian, mencakup dari penyediaan sarana dan prasarana, pengendalian dan penanganan hama penyakit hewan

dan tumbuhan, serta penyuluhan pertanian, seperti pada Tabel berikut:

Tabel 3.5.
Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 2.
Meningkatnya produksi pertanian

Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		Persentase Penyediaan Sarana Pertanian bagi Kelompok Tani (%)	143,32	178,59	124,68
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Dokumen Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian yang Dilaksanakan (dokumen)	1	1	100,00
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (laporan)	1	1	100,00
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (laporan)	1	1	100,00
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme kewenangan Kabupaten/ Kota	Sumber Daya Genetik (SDG) yang Dikelola (dokumen)	1	1	100,00
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (dokumen)	1	1	100,00

Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB))	2	2	100,00
	Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan (dokumen)	1	1	100,00
	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (ekor)	879	879	100,00
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian bagi Kelompok Tani (%)	82,22	105,56	128,38
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian yang Dilaksanakan (dokumen)	1	1	100,00
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (unit)	48	48	100,00
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (unit)	1	1	100,00

Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
	Sarana Pendukungnya				
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (unit)	16	16	100,00
	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Kambing Kaligesing (bulan)	12	12	100,00
	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak (laporan)	1	1	100,00
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (%)	19,00	19,01	100,05
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner yang Dikelola (dokumen)	1	1	100,00
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (laporan)	1	1	100,00
	Penerapan dan Pengawasan	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan	1	1	100,00

Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
	Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner yang Dilaksanakan (dokumen)			
	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (laporan)	1	1	100,00
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		Persentase Fasilitas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (%)	100,00	100,00	100,00
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Dilaksanakan (laporan)	1	1	100,00
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (ha)	300	300	100,00
Program Perizinan Usaha Pertanian		Persentase Jumlah Usulan Izin Usaha Pertanian (%)	100,00	100,00	100,00
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Fasilitas Rekomendasi Perizinan Usaha Pertanian (dokumen)	1	1	100,00
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (laporan)	1	1	100,00

Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
	dan Izin Usaha Pertanian				
Program Penyuluhan Pertanian		Persentase Kenaikan Jumlah Petani Milenial (%)	80,00	80,00	100,00
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Penyuluhan Pertanian yang Dilaksanakan (kecamatan)	16	16	100,00
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)	16	16	100,00
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)	2500	2500	100,00
	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (unit)	5	5	100,00
	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk (unit)	1	1	100,00

Program yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran strategis 2 sebanyak 5 (lima) program dimana semua program mendukung semua dan mempunyai peran tersendiri dalam meningkatkan produksi pertanian. Tetapi yang berpengaruh langsung adalah program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, dan program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian.

Pada program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian dilaksanakan penyediaan bibit ternak, bibit tanaman, alat mesin pertanian, serta fasilitas Inseminasi Buatan.

Pada program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dilaksanakan pembangunan infrastruktur seperti jalan usaha tani, rehabilitasi jaringan irigasi tersier dan pembangunan air tanah dangkal. Semua infrastruktur ini sangat membantu petani dalam meningkatkan usaha taninya.

Indikator sasaran strategis 3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah dari target 88,69 realisasi 88,71 sehingga memperoleh kategori sangat tinggi (100,04). Tingginya capaian ini dikarenakan telah terlaksananya pengelolaan pelayanan dan administratif dengan sangat baik, serta tingkat pelayanan terhadap masyarakat dan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja berorientasi pada hasil (*outcome*) yang sangat baik. Adapun program yang mendukung adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.6.

Capaian Program, Kegiatan, dan SubKegiatan terhadap Sasaran 3.
Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten (%)	100,00	100,00	100,00
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (dokumen)	3	3	100,00
	Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	19	19	100,00

Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
	Perencanaan Perangkat Daerah				
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	22	22	100,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100,00	100,00	100,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	208	208	97,80
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)	6	6	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (laporan)	26	26	100,00
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (%)	100,00	100,00	100,00
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (dokumen)	1	1	100,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100,00	100,00	100,00

Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (dokumen)	1	1	100,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100.00	100.00	100.00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	1	1	100.00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	1	1	100,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	12	12	100,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	12	12	100,00
	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan (paket)	1	1	100,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	6	6	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	12	12	100,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dokumen)	1	1	100,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan (bulan)	12	12	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12	12	100,00

Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
	Sumber Daya Air dan Listrik	Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12	12	100,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (jenis)	7	7	100,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)	1	1	100,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	31	31	100,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	24	24	100,00
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	1	1	100,00
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	14	14	100,00

Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
	dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan lainnya	Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)			
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/ Rehabilitasi (ha)	0.0716	0.0716	100,00

3.1.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.7.
Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Baseline 2021	Target			Realisasi			Target Akhir RPJMD	Target Akhir RPJMD
					2023	2024	2025	2023	2024	2025	2026	= (realisasi 25 / target akhir RPJMD)
1	Meningkatnya ketersediaan pangan	Ketersediaan pangan utama	kg/ kapita	246,09	249,00	250,00	254,55	254,74	254,54	259,49	252,00	102,97
2	Meningkatnya produksi pertanian	Persentase kenaikan produksi pertanian	%	1,25	1,25	1,25	1,29	2,43	1,28	1,30	1,25	104,00
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	indeks	80,37	80,50	81,00	88,67	84,145	88,66	88,71	83,00	106,88

Indikator sasaran strategis 1. Ketersediaan pangan utama digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan pangan pokok (beras) bagi

masyarakat dalam satu tahun yang dihitung berdasarkan jumlah produksi pangan utama dibandingkan dengan jumlah penduduk.

Realisasi yang dicapai menunjukkan hasil yang relatif baik dan cenderung meningkat. Pada tahun 2023, realisasi mencapai 254,74 kg/ kapita, melampaui target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024, realisasi sebesar 254,54 kg/ kapita, masih berada di atas target tahun tersebut. Selanjutnya pada tahun 2025, realisasi meningkat menjadi 259,49 kg/ kapita.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 252,00 kg/ kapita, capaian tahun 2025 telah mencapai 102,97%, yang berarti indikator ini telah melampaui target akhir RPJMD.

Capaian ini menunjukkan bahwa kondisi ketersediaan pangan utama di Kabupaten Purworejo tergolong sangat baik, karena jumlah pangan utama yang tersedia per kapita mampu memenuhi bahkan melampaui target yang telah direncanakan. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor produksi pangan, khususnya beras, mampu mendukung ketahanan pangan daerah. Keberhasilan capaian indikator ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Meningkatnya produksi tanaman pangan;
2. Pengelolaan lahan pertanian yang cukup baik;
3. Stabilitas jumlah penduduk dibandingkan dengan produksi;
4. Dukungan program pemerintah di bidang ketahanan pangan.

Secara keseluruhan, indikator ketersediaan pangan utama menunjukkan kinerja yang sangat baik karena realisasi tahun 2025 tidak hanya memenuhi target tahunan tetapi juga melampaui target akhir RPJMD. Hal ini mencerminkan kondisi ketahanan pangan daerah yang cukup kuat dan perlu terus dipertahankan melalui peningkatan produktivitas pertanian serta pengelolaan sumber daya pangan yang berkelanjutan.

Indikator sasaran strategis 2. Persentase kenaikan produksi pertanian digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan produksi sektor pertanian dari tahun ke tahun sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan sektor pertanian.

Realisasi capaian indikator menunjukkan fluktuasi namun tetap berada pada tingkat yang cukup baik. Pada tahun 2023, realisasi mencapai 2,43%, jauh melampaui target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan produksi pertanian yang cukup signifikan pada tahun tersebut. Pada tahun 2024, realisasi mengalami penurunan menjadi 1,28%, namun masih sedikit di atas target yang ditetapkan. Selanjutnya pada tahun 2025, realisasi kembali meningkat menjadi 1,30%, sedikit melampaui target tahun tersebut sebesar 1,29%.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 1,25%, maka realisasi tahun 2025 telah mencapai 104% dari target akhir RPJMD, yang berarti indikator ini telah melampaui target yang direncanakan.

Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum kinerja sektor pertanian dalam meningkatkan produksi berada pada kondisi yang baik, meskipun terdapat fluktuasi dari tahun ke tahun. Keberhasilan pencapaian indikator ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Peningkatan produktivitas pertanian;
2. Penerapan teknologi pertanian yang lebih baik;
3. Ketersediaan sarana dan prasarana pertanian;
4. Dukungan program pemerintah di bidang pertanian.

Secara keseluruhan, indikator persentase kenaikan produksi pertanian menunjukkan kinerja yang baik dan melampaui target akhir RPJMD, dengan capaian 104% pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan produksi pertanian telah berjalan dengan cukup efektif dan perlu terus dipertahankan serta ditingkatkan melalui penguatan program pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

Indikator sasaran strategis 3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah. Nilai indeks ini menggambarkan persepsi masyarakat terhadap mutu layanan publik yang diterima.

Realisasi capaian indikator menunjukkan hasil yang sangat baik. Pada tahun 2023, realisasi IKM mencapai 84,145, melampaui target yang telah

ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh perangkat daerah telah memenuhi bahkan melebihi ekspektasi masyarakat. Pada tahun 2024, realisasi meningkat signifikan menjadi 88,66, jauh melampaui target tahun tersebut sebesar 81,00. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas pelayanan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya pada tahun 2025, realisasi mencapai 88,71, sedikit lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2024 dan tetap melampaui target yang telah ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 83,00 maka realisasi tahun 2025 telah mencapai 106,88% dari target akhir RPJMD, yang berarti indikator ini telah melampaui target yang direncanakan.

Tingginya capaian Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh perangkat daerah telah mengalami peningkatan yang cukup baik. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Peningkatan standar pelayanan publik;
2. Penyederhanaan prosedur pelayanan;
3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan;
4. Peningkatan kompetensi aparatur pelayanan;
5. Komitmen Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan yang responsif dan transparan.

Secara keseluruhan, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah menunjukkan kinerja yang sangat baik karena realisasi tahun 2025 tidak hanya memenuhi target tahunan tetapi juga melampaui target akhir RPJMD, dengan capaian sebesar 106,88%. Hal ini mencerminkan bahwa kualitas pelayanan publik di Perangkat Daerah telah berjalan dengan baik dan perlu terus dipertahankan serta ditingkatkan guna memenuhi harapan masyarakat secara berkelanjutan.

3.1.3. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (SPM)

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo menangani dua urusan, yaitu urusan pangan dan urusan pertanian, dimana kedua urusan tersebut tidak mempunyai SPM.

Salah satu tujuan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo adalah pemantapan ketahanan pangan dengan indikator skor Pola Pangan Harapan (skor PPH). Skor PPH Kabupaten Purworejo tahun 2025 adalah sebesar 90,90 telah melebihi target skor PPH RPJMD Kabupaten Purworejo periode 2021–2026, target tahun 2025 adalah sebesar 90,73 dan lebih sedikit apabila dibandingkan dengan skor PPH Provinsi Jawa Tengah (93,61) dan Target PPH Nasional 94,00.

Kelompok Bahan Makanan yang memiliki skor PPH dibawah angka standar ideal PPH, yaitu kelompok padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, buah/ biji berminyak, kacang-kacangan, dan gula, sedangkan 2 kelompok bahan makanan memiliki skor PPH ideal, yaitu kelompok makanan minyak lemak dan kelompok makanan sayur buah.

Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan skor PPH Kabupaten Purworejo melalui kegiatan:

1. Meningkatkan produksi pangan melalui bantuan sarana prasarana pertanian, pemanfaatan lahan pekarangan, penguatan cadangan pangan pemerintah daerah dan penguatan cadangan pangan masyarakat;
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani melalui pelatihan Sekolah Lapang dan pendampingan;
3. Memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi menu yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman;
4. Melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan menu kreasi olahan pangan berbasis sumber daya lokal yang tersedia di sekitar;
5. Memberikan edukasi kepada siswa sekolah dan meningkatkan konsumsi pangan hewani dengan pemberian makanan bergizi tinggi protein hewani.

3.1.4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Indikator sasaran strategis 1. Meningkatnya ketersediaan pangan dengan indikator ketersediaan pangan utama. Definisi operasionalnya ketersediaan pangan utama (beras) per tahun per kapita. Dari target 254,55 kg/ kapita bisa terpenuhi 259,49 kg/ kapita sehingga persentase capaiannya sebesar 101,94%.

Faktor pendorong pencapaian target sasaran yaitu:

1. Meningkatnya produksi beras dengan adanya program Luas Tambah Tanam (LTT) padi;
2. Luas sawah di Kabupaten Purworejo yang cukup besar;
3. Adanya kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pertanian, pengendalian hama dan penyakit tanaman, serta penyuluhan pertanian

Indikator sasaran strategis 2. Meningkatnya produksi pertanian dengan indikator persentase kenaikan produksi pertanian. Definisi operasionalnya persentase kenaikan produksi pertanian tahun n terhadap produksi pertanian tahun sebelumnya ($n-1$). Dari target peningkatan sebesar 1,29% terpenuhi sebesar 1,30% sehingga persentase capaiannya sebesar 100,78%.

Faktor pendorong pencapaian target sasaran yaitu:

1. Penggunaan teknologi tepat guna dalam proses produksi ditingkat petani sehingga mendukung peningkatan produktivitas pertanian. Pemanfaatan teknologi pertanian tepat guna merupakan upaya strategis untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani melalui penerapan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Penggunaan alat dan mesin pertanian, varietas unggul, sistem irigasi hemat air, serta teknologi pengendalian hama terpadu mampu menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan hasil panen. Dengan penerapan teknologi yang adaptif dan mudah diimplementasikan, petani dapat meningkatkan daya saing serta mendukung ketahanan pangan secara berkelanjutan.

2. Adanya kebijakan pembangunan pertanian baik ditingkat pusat maupun daerah mendukung dalam peningkatan produksi pertanian untuk mendukung swasembada pangan.

Indikator sasaran strategis 3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah. Format perhitungan: Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif untuk membandingkan antara harapan masyarakat dan kondisi pelayanan SKPD dengan mengacu pada pendapat masyarakat. Dari target sebesar 88,67 terpenuhi 88,71 sehingga persentasenya 100,04%. Faktor pendorong pencapaian target sasaran yaitu:

1. Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo tidak dipungut biaya (gratis);
2. Perilaku petugas yang ramah dalam melayani;
3. Penanganan pengaduan yang cepat dan tepat.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilaksanakan sebagai instrumen evaluasi kualitas pelayanan publik berdasarkan 9 indikator, yaitu persyaratan, sistem dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/ tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, serta sarana dan prasarana. Hasil pengukuran SKM menunjukkan bahwa secara umum kualitas pelayanan telah berjalan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan, dengan tingkat kepuasan masyarakat berada pada kategori baik. Capaian tersebut mencerminkan komitmen perangkat daerah dalam meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan, sekaligus menjadi dasar perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kinerja dan kepuasan masyarakat di masa mendatang

3.1.5. Analisis atas efisiensi sumber daya (anggaran)

Realisasi keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2025 sebesar Rp. 43.490.219.690,00 dari total pagu

anggaran Rp. 45.963.836.383,00 sehingga persentase capaiannya sebesar 94,62%. Hal ini disebabkan oleh:

1. Efisiensi perjalanan dinas dalam daerah, karena pertanggungjawabannya hanya bisa untuk belanja Bahan Bakar Minyak (BBM), atau dilaksanakan secara at-cost;
2. Kenaikan pangkat pegawai mengalami beberapa kendala sehingga ada sisa anggaran dari sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
3. Sisa pengadaan rapid tes kit pestisida, alat dan mesin pertanian (alsintan), bibit tanaman, dan pupuk;
4. Karena kondisi cuaca yang tidak kondusif, aktivitas penangkaran benih tidak berjalan maksimal, sehingga beberapa rincian belanja tidak terserap, yaitu makan minum sosialisasi/ evaluasi dan bahan untuk penangkaran benih seperti sungkup benih dari 2.300 pcs karena pertumbuhan di lapangan kurang baik hanya diambil 1.000 pcs, serta biaya sertifikasi tidak terealisasi keseluruhan karena pertumbuhan tanaman tidak optimal (lokasi di Desa Pacekelan tidak bisa diujikan dan lokasi di Desa Rowobayem hanya sebagian yang bisa disertifikasikan);
5. Satu orang tenaga kebersihan Rumah Potong Hewan (RPH) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mulai bulan Oktober 2025 sehingga serapan honorarium tenaga kebersihan pada sub kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan tidak maksimal;
6. DAK Non Fisik yang digunakan untuk belanja honor THL TBPP tidak bisa terserap maksimal karena THL TBPP sudah diterima PPPK sejak bulan Juli 2025.

3.1.6. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Seluruh program/ kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo mendukung secara langsung keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kabupaten Purworejo. Beberapa faktor yang mendorong dalam keberhasilan capaian kinerja program sebagai berikut:

1. Keberhasilan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota didorong oleh dukungan anggaran yang memadai serta pengelolaan administrasi yang tertib dan akuntabel. Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang cukup, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi, turut memperkuat pelaksanaan fungsi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan berbasis kinerja. Selain itu, komitmen pimpinan dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan menjadi faktor utama dalam menunjang kelancaran seluruh program Perangkat Daerah;
2. Keberhasilan program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan didukung oleh potensi sumber daya pertanian yang relatif baik serta partisipasi aktif Kelompok Tani dalam kegiatan produksi dan pengembangan usaha. Sinergi kebijakan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam mendukung kedaulatan pangan turut memperkuat implementasi program. Akses terhadap pembiayaan, kemitraan usaha, serta dukungan teknologi budidaya menjadi faktor penting dalam meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian;
3. Faktor pendorong utama program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan serta dukungan lintas sektor, termasuk Pemerintah Desa dan Organisasi Kemasyarakatan turut memperluas jangkauan program. Ketersediaan sumber pangan lokal yang beragam menjadi modal penting dalam mendorong diversifikasi konsumsi pangan masyarakat;
4. Keberhasilan program Penanganan Kerawanan Pangan didukung oleh ketersediaan data ketahanan dan kerentanan pangan yang akurat sebagai dasar penetapan sasaran intervensi. Koordinasi yang baik dengan Pemerintah Kecamatan dan Desa memungkinkan identifikasi wilayah rentan dilakukan secara tepat. Dukungan

- bantuan pangan serta respons cepat terhadap kondisi darurat juga menjadi faktor penting dalam menekan potensi kerawanan pangan;
5. Keberhasilan program Pengawasan Keamanan Pangan didorong oleh adanya regulasi dan standar keamanan pangan yang jelas serta peningkatan kapasitas petugas pengawas di lapangan. Dukungan sarana pengujian mutu dan koordinasi dengan instansi terkait memperkuat efektivitas pengawasan. Selain itu, meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya keamanan pangan turut berkontribusi pada peningkatan kepatuhan terhadap standar yang berlaku;
 6. Keberhasilan program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dipengaruhi oleh tersedianya bantuan sarana produksi seperti benih, pupuk, dan alat mesin pertanian yang disalurkan secara tepat sasaran. Dukungan kebijakan subsidi dan pendampingan teknis kepada petani turut mempercepat pemanfaatan sarana tersebut secara optimal. Partisipasi aktif Kelompok Tani dalam perencanaan kebutuhan sarana menjadi faktor penting dalam menjamin efektivitas program;
 7. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian berhasil didorong oleh pembangunan dan rehabilitasi prasarana pertanian seperti jaringan irigasi dan jalan usaha tani yang menunjang kelancaran produksi. Sinkronisasi dengan program infrastruktur daerah serta perencanaan berbasis kebutuhan wilayah menjadi faktor utama dalam memastikan keberlanjutan manfaat prasarana. Pengawasan pelaksanaan kegiatan fisik juga mendukung tercapainya kualitas hasil pembangunan yang sesuai standar;
 8. Keberhasilan program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner didukung oleh ketersediaan tenaga medis dan paramedis veteriner yang kompeten serta pelaksanaan vaksinasi dan pengawasan kesehatan hewan secara rutin. Peningkatan kesadaran peternak terhadap penerapan *biosecurity* dan pelaporan dini penyakit hewan turut memperkuat pengendalian penyakit menular. Koordinasi lintas sektor juga

menjadi faktor penting dalam menjaga kesehatan masyarakat veteriner;

9. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian didorong oleh adanya sistem deteksi dini serta mekanisme pelaporan kejadian bencana pertanian yang responsif. Dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Pertanian dalam penyediaan obat-obatan sangat membantu dalam aktivitas gerakan pengendalian hama dan penyakit tanaman. Sekolah Lapang Agensi Hayati dan Sekolah lapang Pengendalian Hama Terpadu turut meningkatkan kesiapsiagaan petani terhadap potensi bencana pertanian;
10. Keberhasilan program Perizinan Usaha Pertanian didukung oleh penerapan sistem perizinan berbasis elektronik yang mempermudah proses pelayanan kepada pelaku usaha. Penyederhanaan prosedur dan peningkatan transparansi biaya mempercepat waktu penyelesaian izin. Koordinasi yang baik dengan Perangkat Daerah terkait juga menjadi faktor penting dalam mendukung iklim usaha pertanian yang kondusif;
11. Program Penyuluhan Pertanian berhasil didorong oleh peran aktif Penyuluh Pertanian dalam mendampingi petani secara berkelanjutan. Metode penyuluhan yang partisipatif dan berbasis kebutuhan lapangan meningkatkan efektivitas transfer teknologi dan inovasi. Dukungan kelembagaan penyuluhan serta pemanfaatan teknologi informasi turut memperluas jangkauan pembinaan kepada petani

3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2025

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kabupaten Purworejo pada Tahun 2025, didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 45.963.836.383,00 dan realisasi sebesar Rp. 43.490.219.690,00 atau sebesar 94,62% dengan realisasi fisik sebesar 100% yang disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 3.8.
Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Program, dan Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.120.625.763	19.084.906.593	94,85
a	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	49.685.300	48.356.530	97,33
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.852.600	23.852.600	100,00
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.832.700	24.503.930	94,86
b	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.226.323.113	18.196.783.522	94,65
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.218.500.013	18.188.960.429	94,64
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	500.000	500.000	100,00
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.323.100	7.323.093	100,00
c	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	513.200	513.200	100,00
	Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	513.200	513.200	100,00
d	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	460.000	460.000	100,00
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	460.000	460.000	100,00
e	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	291.392.300	290.188.102	99,59
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5.513.800	5.463.000	99,08

No	Program, dan Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.603.000	3.593.000	99,72
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	203.591.300	202.871.600	99,65
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.400.000	8.394.210	99,93
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	3.380.000	3.360.000	99,41
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	1.800.000	1.800.000	100,00
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52.081.200	51.695.590	99,26
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13.023.000	13.010.702	99,91
f	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	232.708.250	230.264.573	98,95
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	88.075.250	87.262.950	99,08
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	144.633.000	143.001.623	98,87
g	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	319.543.600	318.340.666	99,62
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	43.960.000	43.831.644	99,71
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	196.320.000	196.021.700	99,85
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.320.000	17.320.000	100,00
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	51.900.000	51.123.722	98,50

No	Program, dan Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.540.000	8.540.000	100,00
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah	1.503.600	1.503.600	100,00
II	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	1.019.576.000	1.002.852.967	98,36
a	Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.019.576.000	1.002.852.967	98,36
	Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	1.019.576.000	1.002.852.967	98,36
III	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.231.619.700	1.207.387.839	98,03
a	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok dan Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	67.963.900	64.673.605	95,16
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	45.004.600	42.978.070	95,50
	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	10.708.000	9.661.224	90,22
	Sub Kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	12.251.300	12.034.311	98,23
b	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	1.145.555.800	1.124.667.843	98,18
	Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	1.145.555.800	1.124.667.843	98,18

No	Program, dan Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
c	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per kapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	18.100.000	18.046.391	99,70
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	18.100.000	18.046.391	99,70
IV	Program Penanganan Kerawanan Pangan	61.464.900	59.797.897	97,29
a	Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	7.410.500	6.892.979	93,02
	Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	7.410.500	6.892.979	93,02
b	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	54.054.400	52.904.918	97,87
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	54.054.400	52.904.918	97,87
V	Program Pengawasan Keamanan Pangan	24.791.500	23.191.824	93,55
a	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	24.791.500	23.191.824	93,55
	Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	4.675.700	4.410.280	94,32
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	12.613.900	11.350.700	89,99

No	Program, dan Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Sub Kegiatan Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	7.501.900	7.430.844	99,05
VI	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	13.972.454.800	13.135.636.425	94,01
a	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	4.851.803.800	4.310.305.438	88,84
	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4.525.923.800	4.052.383.145	89,54
	Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	325.880.000	257.922.293	79,15
b	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	3.306.991.075	3.107.238.605	93,96
	Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	2.888.843.575	2.791.048.676	96,61
	Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	418.147.500	316.189.929	75,62
c	Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain	5.813.659.925	5.718.092.382	98,36
	Sub Kegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	5.813.659.925	5.718.092.382	98,36
VII	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	6.875.803.500	6.850.657.460	99,63
a	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	6.851.453.100	6.826.475.460	99,64
	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	5.349.097.700	5.331.741.700	99,68

No	Program, dan Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	66.515.000	65.235.960	98,08
	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1.435.840.400	1.429.497.800	99,56
b	Kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	24.350.400	24.182.000	99,31
	Sub Kegiatan Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak	24.350.400	24.182.000	99,31
VIII	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	160.032.600	155.632.763	97,25
a	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	93.383.600	92.695.658	99,26
	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	93.383.600	92.695.658	99,26
b	Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	66.649.000	62.937.105	94,43
	Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	66.649.000	62.937.105	94,43
IX	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	154.209.400	151.652.395	98,34
a	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	154.209.400	151.652.395	98,34
	Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	154.209.400	151.652.395	98,34
X	Program Perizinan Usaha Pertanian	10.680.000	10.680.000	100,00

No	Program, dan Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
a	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.680.000	10.680.000	100,00
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	10.680.000	10.680.000	100,00
XI	Program Penyuluhan Pertanian	2.332.578.220	1.807.823.527	77,50
a	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	2.332.578.220	1.807.823.527	77,50
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan	1.357.814.000	889.158.809	65,48
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	904.104.220	850.916.120	94,12
	Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/ Kota	58.390.000	55.478.598	95,01
	Sub Kegiatan Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	12.270.000	12.270.000	100,00

Realisasi anggaran pada tahun 2025 secara keseluruhan terdapat efisiensi dengan rerata sebesar 5,38%. Efisiensi tersebut diperoleh tanpa mengurangi capaian target kinerja, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan tetap berjalan optimal sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Capaian efisiensi ini menunjukkan adanya pengendalian belanja yang baik, optimalisasi penggunaan sumber daya, serta penerapan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pelaksanaan anggaran. Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada pencapaian hasil yang maksimal dengan penggunaan biaya yang lebih hemat dan rasional. Efisiensi anggaran ini akan terus dijaga melalui peningkatan perencanaan yang lebih presisi, penguatan monitoring dan evaluasi, serta penerapan manajemen kinerja berbasis hasil (*result oriented*).

3.3. Inovasi

Inovasi yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo pada tahun 2025 ada dua, yaitu:

1. KARANGPANDAN (Pemanfaatan Pekarangan untuk Peningkatan Pendapatan)

Salah satu Kebijakan Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam mewujudkan Ketahanan Pangan dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat adalah melalui Pemanfaatan Lahan Pekarangan Terintegrasi yang tercantum dalam salah satu program unggulan Bupati Purworejo dalam RPJMD yaitu Tuwuh Ngunduh.

Tuwuh Ngunduh adalah program Pemanfaatan Lahan Pekarangan Terintegrasi sehat dan produktif dalam ketersediaan pangan guna mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang, juga dimaksudkan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi produktif yang diarahkan pada komoditas unggulan Kabupaten Purworejo.

Pemanfaatan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga dapat dilakukan dengan budidaya pangan terintegrasi. Pemanfaatan pekarangan ini dapat meningkatkan citra makanan lokal, melestarikan potensi lokal, dan mengajak masyarakat mencintai kebudayaan sendiri. Ketahanan pangan keluarga adalah kondisi di mana rumah tangga memiliki ketersediaan pangan yang cukup, aman, merata, dan terjangkau.

Pemanfaatan pekarangan dapat dilakukan dengan menanam sayuran, buah, dan umbi-umbian. Pemanfaatan pekarangan dapat meningkatkan ketersediaan pangan, aksesibilitas, dan pendapatan keluarga. Pengembangan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga berpotensi meningkatkan kualitas gizi serta memberikan tambahan pendapatan bagi keluarga. Kegiatan ini juga mendukung program pemerintah saat ini yaitu, program makan bergizi gratis. Selain diberi makanan bergizi gratis di sekolah, anak-anak di rumah juga diberikan makanan bergizi hasil dari pekarangan sendiri.

Pemanfaatan pekarangan rumah dapat mengurangi ketergantungan pada bahan pangan yang dibeli dari pasar, sekaligus mengurangi jejak karbon dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Penyuluhan dan pelatihan tentang cara-cara bertani yang efisien, penggunaan pupuk organik, teknik vertikultur, dan teknik hidroponik dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan hasil pekarangan mereka.

Penggunaan teknologi pertanian modern seperti hidroponik, aquaponik, atau vertikultur dapat menjadi solusi bagi mereka yang memiliki lahan terbatas. Selain itu, untuk meminimalkan biaya, dapat melakukan budidaya dengan wadah/ pot dari barang-barang bekas. Metode pembaharuan pada inovasi KARANGPANDAN sebagai berikut:

- a. Mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam merencanakan dan mengelola pemanfaatan pekarangan melalui kelompok-kelompok tani atau kelompok masyarakat;
- b. Melakukan pelatihan secara rutin mengenai cara budidaya yang efisien, penggunaan pupuk organik, serta teknik pertanian ramah lingkungan seperti pertanian berbasis hidroponik atau vertikultur;
- c. Mendorong penggunaan teknologi sederhana dan mudah diterapkan oleh masyarakat, seperti sistem irigasi tetes, hidroponik, dan akuaponik;
- d. Program insentif atau bantuan modal berupa bibit, pupuk, atau peralatan pertanian untuk mendorong keluarga dalam mengembangkan pekarangan mereka;
- e. Membantu keluarga dalam memasarkan hasil pertanian mereka baik secara langsung ke konsumen maupun melalui kemitraan dengan pasar lokal atau koperasi pertanian.

Cara kerja dalam melaksanakan inovasi KARANGPANDAN:

- a. Melakukan survei untuk mengetahui luas dan kondisi lahan pekarangan yang dapat dimanfaatkan, baik untuk keperluan tanaman pangan maupun untuk kegiatan ekonomi lainnya;
- b. Menyelenggarakan program penyuluhan yang melibatkan penyuluh pertanian dan pihak terkait untuk memberikan pelatihan tentang cara menanam, merawat tanaman, memelihara ternak, memelihara ikan dan mengelola hasil pertanian, peternakan dan perikanan dengan baik;
- c. Memberikan bantuan bibit tanaman, ternak dan ikan, dan sarana produksi lain seperti pupuk, serta alat pertanian sederhana kepada keluarga yang berkomitmen untuk memanfaatkan pekarangan mereka, sesuai dengan hasil survei awal;
- d. Mengajarkan masyarakat tentang teknik-teknik pertanian inovatif seperti hidroponik dan vertikultur yang dapat diterapkan meskipun lahan terbatas. Mengajarkan pembuatan wadah tanaman dari barang bekas sebagai pengganti pot/ *polybag*. Mengajarkan cara memelihara ternak unggas seperti ayam dan entog, serta memelihara ikan sebagai sumber protein;
- e. Membentuk kelompok atau koperasi untuk membantu keluarga dalam memasarkan hasil pertanian mereka melalui pasar lokal atau sistem pemasaran berbasis online untuk menjangkau konsumen lebih luas. Sebelum dipasarkan, masyarakat diajarkan teknologi pasca panen dan pengemasan yang baik, untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi;
- f. Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala untuk memastikan program berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan, serta melakukan perbaikan jika diperlukan.

Pemanfaatan lahan pekarangan sebagai upaya pemenuhan pangan dan gizi keluarga serta peningkatan pendapatan keluarga

tidak hanya berdampak pada ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal dan keberlanjutan lingkungan. Dengan pendekatan yang tepat dan dukungan dari berbagai pihak, program ini dapat menjadi solusi praktis dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan di Indonesia.

2. SIMAK (Sistem Informasi Mastitis Pada Kambing)

Sebagai bentuk inovasi, SIMAK diarahkan untuk mengawal pengobatan mastitis pada kambing perah secara tuntas di Kabupaten Purworejo melalui pendekatan dari hulu ke hilir. Di tahap hulu, SIMAK akan dilengkapi fitur deteksi dini berbasis data spasial dan hasil pemeriksaan lapangan, serta edukasi digital kepada peternak mengenai pencegahan mastitis. Di tahap hilir, SIMAK memungkinkan monitoring kasus hingga sembuh, pelaporan digital, serta analisis data untuk pengambilan kebijakan. SIMAK diharapkan mampu menjadi alat yang efektif dalam menekan kasus mastitis dan meningkatkan produktivitas kambing perah di Purworejo.

SIMAK sebagai platform berbasis website yang dapat diakses oleh petugas Puskesmas dan peternak. Pencatatan hasil uji mastitis dilakukan secara digital, tersedia rekomendasi penanganan serta edukasi bagi peternak berupa artikel dan panduan perawatan yang mudah dipahami. Tujuannya untuk mempermudah pencatatan dan pelaporan kasus mastitis sehingga tersedia data dan informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan terkait penanganan mastitis.

Cara kerja pelaksanaan inovasi SIMAK:

- a. Petugas puskesmas memasukkan data ternak dan peternakan, memasukkan tanda-tanda klinis, hasil uji CMT dan mastitis detector melalui website SIMAK;
- b. Sistem akan mengklasifikasikan hasil menjadi negatif atau positif;

- c. Peternak dapat melihat riwayat kesehatan kambingnya dan mengakses materi edukatif secara langsung melalui website.

Untuk hasil negatif, sistem menyarankan tindakan pencegahan berupa pemberian povidone iodine 1,25% sebanyak 5cc per puting saat kambing memasuki usia kebuntingan 4 bulan. Untuk hasil positif, sistem akan menampilkan protokol pengobatan seperti pemberian pov iod dua kali sehari, antibiotik, antiradang, dan vitamin. Serta jadwal pengobatan dan penanganan.

Dua inovasi tersebut diatas memperoleh skor kematangan inovasi rerata 99,50. Skor Kematangan Inovasi Daerah ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan inovasi telah berada pada kategori sangat matang dan optimal. Capaian ini mencerminkan bahwa sistem inovasi telah terbangun secara komprehensif, mulai dari aspek regulasi, kelembagaan, dukungan sumber daya, tata kelola, hingga implementasi dan keberlanjutan inovasi.

Nilai tersebut juga mengindikasikan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi inovasi telah berjalan sistematis serta terdokumentasi dengan baik. Inovasi yang dikembangkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas program, serta kinerja organisasi secara keseluruhan.

Dengan skor 99,50 menunjukkan komitmen kuat dalam membangun budaya kerja inovatif, adaptif terhadap perubahan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ke depan, tantangan yang perlu dijaga adalah konsistensi kualitas inovasi, replikasi praktik baik, serta penguatan keberlanjutan agar capaian kinerja inovasi tetap berada pada level sangat tinggi dan terus memberikan manfaat yang luas bagi pembangunan daerah.

3.4. Penghargaan

1. Kompetisi Inovasi Perangkat Daerah

Kompetisi Inovasi Perangkat Daerah merupakan ajang strategis untuk mendorong kreativitas dan terobosan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui kompetisi ini, setiap Perangkat Daerah didorong untuk menghadirkan solusi inovatif yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi kerja, serta responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Tidak hanya menjadi ruang apresiasi, kegiatan ini juga berperan sebagai wadah berbagi praktik terbaik dan inspirasi antar instansi. Dengan semangat kolaborasi dan pembaruan, kompetisi ini diharapkan mampu memperkuat budaya inovasi di lingkungan pemerintahan serta menciptakan dampak nyata bagi pembangunan daerah. Pada tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo meraih Peringkat 3 Kompetisi Inovasi Perangkat Daerah kategori Perangkat Daerah Non Kecamatan dengan inovasi KARANGPANDAN.



2. Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo mendapatkan penghargaan atas capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dengan klasifikasi baik dari Badan Pangan Nasional

merupakan bentuk apresiasi atas komitmen dan kerja nyata dalam meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat. Capaian ini mencerminkan keberhasilan dalam mendorong pola makan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di daerah. Penghargaan ini tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga motivasi untuk terus meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan sejahtera.



3. Lomba Petani Milenial Komoditas Kelapa Tahun 2025

Anugerah Insan Pertanian 2025 merupakan bentuk penghargaan yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah sebagai apresiasi kepada insan pertanian yang berprestasi, berdedikasi, dan berkontribusi nyata dalam pembangunan sektor pertanian. Penghargaan ini bertujuan untuk mengangkat citra sektor pertanian agar semakin bergengsi, inovatif, serta memiliki daya saing dan nilai ekonomi yang tinggi. Melalui Anugerah Insan Pertanian, pemerintah provinsi mendorong lahirnya sumber daya manusia pertanian yang profesional, adaptif terhadap teknologi, dan mampu menjadi penggerak pembangunan pertanian berkelanjutan. Pada tahun 2025, penghargaan ini diberikan kepada insan pertanian terpilih yang dinilai berhasil menunjukkan kinerja

unggul, inovasi, serta komitmen kuat dalam meningkatkan produktivitas, kesejahteraan petani, dan ketahanan pangan daerah. Pada tahun 2025, Kabupaten Purworejo menorehkan prestasi melalui raihan Juara 1 Petani Milenial Komoditas Kelapa yang diraih oleh Ester, petani muda asal Desa Clapar, Kecamatan Bagelen. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Ester dalam menerapkan inovasi dan praktik usaha tani kelapa yang produktif, efisien, serta berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan nilai tambah komoditas kelapa dan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terjun dan berkembang di sektor pertanian.



4. Lomba Produsen Benih Hortikultura Terbaik Tahun 2025

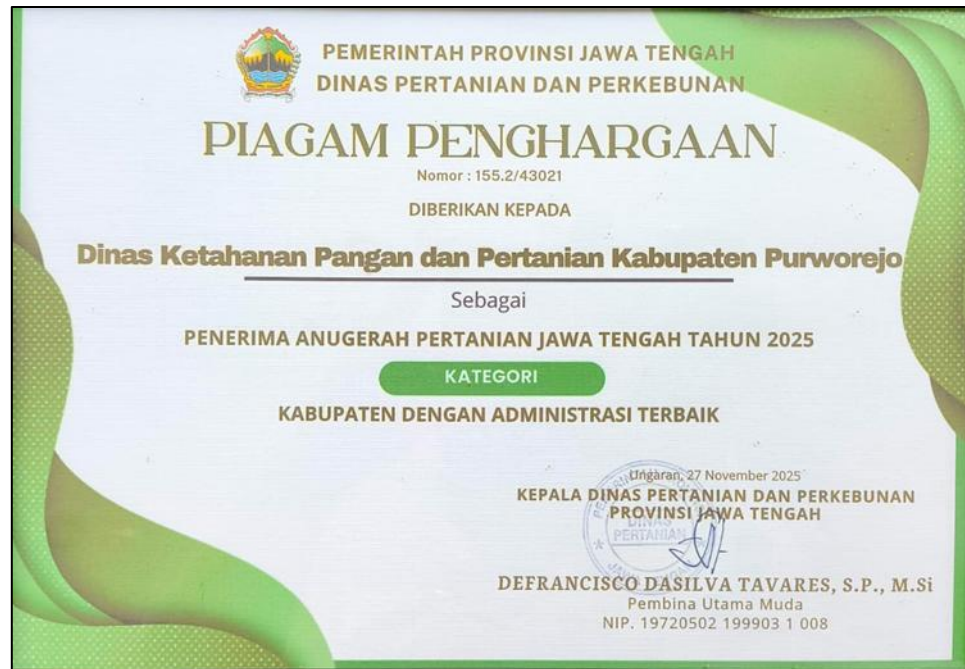
Penghargaan Produsen Benih Hortikultura Terbaik diraih oleh CV. Mitra Bibit yang berlokasi di Desa Bedono Karangduwur, Kecamatan Kemiri. Penghargaan ini diberikan atas konsistensi CV. Mitra Bibit dalam memproduksi benih hortikultura bermutu tinggi, tersertifikasi, dan berkelanjutan, serta kontribusinya dalam mendukung peningkatan produktivitas dan kualitas hasil usaha tani petani di lapangan. Keberhasilan ini mencerminkan peran strategis produsen benih lokal dalam memperkuat sistem perbenihan dan mendukung kemajuan pertanian daerah.



5. Kabupaten dengan Pengadministrasian Terbaik Tahun 2025

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo berhasil meraih penghargaan sebagai Kabupaten dengan Pengadministrasian Terbaik atas kinerja pengelolaan program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Perkebunan yang dialokasikan di wilayah Kabupaten Purworejo, baik kegiatan reguler maupun yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Raihan ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam memperkuat tata kelola sektor pertanian yang modern, transparan, dan akuntabel, dengan fokus pada peningkatan mutu produksi, keberlanjutan program, serta pemberdayaan petani.

Capaian tersebut juga mencerminkan sinergi yang solid antara pemerintah daerah, penyuluh pertanian, pelaku usaha, dan kelompok tani dalam mewujudkan pembangunan pertanian yang maju, adaptif, dan responsif terhadap berbagai tantangan.



6. Petani Hortikultura Berprestasi

Penghargaan Petani Hortikultura Berprestasi oleh Kementerian Pertanian merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi, kerja keras, dan inovasi dalam mengembangkan sektor hortikultura. Penghargaan ini diberikan kepada petani yang mampu meningkatkan produktivitas, kualitas hasil, serta menerapkan praktik pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Lebih dari sekadar pengakuan, penghargaan ini menjadi inspirasi bagi petani lainnya untuk terus berinovasi dan berkontribusi dalam memperkuat ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



7. Konsistensi dalam Mendorong Pengembangan UMKM Penangkar Benih Buah-Buahan Nasional

Penghargaan Petani Hortikultura Berprestasi oleh Kementerian Pertanian atas konsistensi dalam mendorong pengembangan UMKM penangkar benih buah-buahan nasional merupakan bentuk pengakuan atas dedikasi dalam memperkuat sektor hulu hortikultura. Upaya yang dilakukan tidak hanya menjaga ketersediaan benih unggul berkualitas, tetapi juga memberdayakan pelaku UMKM agar lebih mandiri, produktif, dan berdaya saing. Konsistensi ini menjadi fondasi penting dalam mendukung keberlanjutan agribisnis hortikultura, meningkatkan kualitas produksi buah nasional, serta memperkuat ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat secara luas.



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja

Capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo tahun 2025:

1. Capaian Kinerja sasaran strategis yang terdiri dari 3 indikator tercapai dengan baik bahkan melampaui target. Keberhasilan ini didukung adanya sumberdaya yang cukup baik sumberdaya anggaran maupun sumberdaya manusia serta regulasi dan kebijakan yang ada;
2. Capaian keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo pada tahun 2025 sebesar 94,62%. Realisasi keuangan tidak berdampak pada capaian kinerja fisik, hal ini disebabkan sisa proses pengadaan barang/jasa.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Strategi yang dapat direkomendasikan guna meningkatkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo di masa mendatang antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi lintas bidang dalam menjamin ketersediaan pangan dan pengawasan keamanan pangan di tingkat produsen maupun pasar;
2. Monitoring dan evaluasi penggunaan sarana prasarana guna mendukung peningkatan produksi pertanian dengan mengoptimalkan alat mesin pertanian yang tersedia dan penerapan teknologi pertanian tepat guna;
3. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia baik ASN maupun petani melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
4. Penguatan ketahanan pangan melalui penyediaan dan pemantauan cadangan pangan untukantisipasi kemungkinan terjadi bencana atau krisis pangan

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo telah disusun. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk kinerja yang akan datang.

Purworejo, 13 Februari 2026

Kepala Dinas Ketahanan Pangan

dan Pertanian Kabupaten Purworejo,



Bagas Adi Karyanto, S.Sos., M.M.

Pembina Tingkat I / IV b

NIP 197304211993021001

LAMPIRAN

DAFTAR REFERENSI

1. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025;
4. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 124 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 nomor 124 Seri D Nomor 9);
5. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
6. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 137 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026;
7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 82 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 82 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Keputusan Bupati Purworejo No. 100.3.3.3/405/2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025;

12. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
13. Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025;
14. Dokumen Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025
15. Laporan Hasil Realisasi Fisik dan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Bulan Desember Tahun 2025;
16. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025;
17. Aplikasi SAWIJI dengan alamat laman <http://sawiji.purworejokab.go.id>.
18. Aplikasi E-kinerja dengan alamat laman <https://kinerja.bkn.go.id>.
19. Data Statistik Petanian Kabupaten Purworejo Tahun 2025.



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Jalan Mayjen Sutoyo 29-31 Purworejo, Jawa Tengah
Kode Pos 54114

Telepon (0275) 321404, Faksimile (0275) 321015
Laman: <https://dkpp.purworejokab.go.id> Pos-el: dkpp@purworejokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR: 900.7.1/096/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN PURWOREJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah, perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa untuk tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara

- Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4);
 6. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 124 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 124 Seri D Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2025.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
Pada tanggal 13 Januari 2026

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN
KABUPATEN PURWOREJO



BAGAS ADI KARYANTO, S.Sos., M.M.
Pembina Tk I/IVb
NIP 197304211993021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN
PURWOREJO
NOMOR : 0007.1/096/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2005

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2025

NO.	N A M A	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bagas Adi Karyanto, S.Sos.,M.M	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo	Penanggung Jawab
2.	drh. Sri Widartik, M.M.	Plt. Sekretaris pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo	Ketua
3.	Arie Sulistyani, S.TP., M.P.	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo	Sekretaris
4.	Fitria Kurniawati, STP., M.M.	Kepala Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo	Anggota
5.	Tri Astuti Andayani, STP., M.M.	Kepala Bidang Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo	Anggota
6.	drh. Sri Widartik, M.M.	Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veterier pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo	Anggota
7.	Mangisatun, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo	Anggota

NO.	N A M A	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
8.	Nur Riana, S.IP.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo	Anggota
9.	Nur Subhkan, S.Pt.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo	Anggota
10.	drh. Amat Kosim	Kepala UPT Puskesmas pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo	Anggota
11.	Satiah, S.E.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo	Anggota
12.	Sri Lestari, S.TP.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo	Anggota
13.	Ery Puspandoyo, S.P., M.M.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo	Anggota
14.	Wagiyanti, S.P., M.Sc.	Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo	Anggota
15.	Hanjar Prihatno, S.Pt.	Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo	Anggota
16.	drh. Zain Amri	Medik Veteriner Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo	Anggota
17.	Heryawan Tejo Purnomo, A.Md	Pranata Komputer Mahir Lanjutan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo	Anggota
18.	Agus Setiawan, S.Pt., M.Sc	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo	Anggota
19.	Ratna Dwijanti, S.P., M.M.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo	Anggota

NO.	N A M A	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
20.	drh. Yulius Arif Kusuma	Medik Veteriner Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo	Anggota



KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN
KABUPATEN PURWOREJO

BAGAS ADI KARYANTO, S.Sos., M.M.
Pembina Tk I / IV b
NIP 197304211993021001



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN PURWOREJO
Nomor : 00021/ 681 /2026

TENTANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
4. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 124 Tahun 2022 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 124 Seri D Nomor 9)

MEMUTUSKAN

- Pertama : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 sebagaimana lampiran keputusan ini.
- Kedua : Laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kinerja selama satu tahun anggaran sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 13 Februari 2026

KEPALA DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN PURWOREJO,



BAGAS ADI KARYANTO, S.Sos., M.M
Pembina Tk I/ IVb
NIP. 197304211993021001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN

Jalan Mayjen Sutoyo 29-31 Purworejo Kode Pos 54114
Telepon (0275) 321404, Faksimile (0275) 321015
Laman dkpp.purworejokab.go.id, Pos-el dkpp@purworejokab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HADI SADSILA, S.P., M.M.
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Purworejo

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YULI HASTUTI
Jabatan : Bupati Purworejo
sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

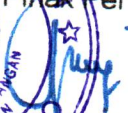
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

YULI HASTUTI

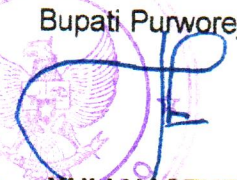
Purworejo, 3 Januari 2025
Pihak Pertama,

HADI SADSILA, S.P., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196805051997031008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN PURWOREJO

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Ketersediaan pangan utama	254,55 kg/kapita
2	Meningkatnya Produksi Pertanian	Persentase kenaikan produksi pertanian	1.29%
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	88.67

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 20.126.933.898,00	APBD
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rp 1.019.576.000,00	APBD
3	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 1.320.055.800,00	APBD
4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 370.802.800,00	APBD
5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 42.200.600,00	APBD
6	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 13.886.650.460,00	APBD, DBHCHT
7	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 6.974.693.300,00	APBD
8	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 233.938.300,00	APBD
9	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp 290.173.000,00	APBD
10	Program Perizinan Pertanian	Rp 20.000.000,00	APBD
11	Program Penyuluhan Pertanian	Rp 1.629.417.220,00	APBD, DBHCHT
	Jumlah	Rp 45.914.441.378,00	

Purworejo, 3 Januari 2025

Bupati Purworejo

YULI HASTUTI

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Purworejo

HADI SADSILA, S.P., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196805051997031008



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN**

Jalan Mayjen Sutoyo 29-31 Purworejo Kode Pos 54114
Telepon (0275) 321404, Faksimile (0275) 321015
Laman dkpp.purworejokab.go.id, Pos-el dkpp@purworejokab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. SITI LESTARI, M.M.

Jabatan : Sekretaris Dinas

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HADI SADSILA, S.P., M.M.

Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Purworejo

sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 3 Januari 2025

Pihak Pertama,

Ir. SITI LESTARI, M.M.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP 196706031996032003



HADI SADSILA, S.P., M.M.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP 1968050519970301008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Unit Kerja : Sekretariat

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlayannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100%

Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 112.531.900,00	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 19.051.903.548,00	APBD
3	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Rp 1.026.800,00	APBD
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 10.495.200,00	APBD
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 379.002.000,00	APBD
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 252.014.450,00	APBD
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 319.960.000,00	APBD
Jumlah		Rp 20.126.933.898,00	

Purworejo, 3 Januari 2025

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Purworejo



HADI SAOSILA, S.P., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196805051997031008

Sekretaris

Ir. SITI LESTARI, M.M.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 196706031996032003



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN**

Jalan Mayjen Sutoyo 29-31 Purworejo Kode Pos 54114
Telepon (0275) 321404, Faksimile (0275) 321015
Laman dkpp.purworejokab.go.id, Pos-el dkpp@purworejokab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TRI ASTUTI ANDAYANI, S.TP., M.M.

Jabatan : Kepala Bidang Pangan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HADI SADSILA, S.P., M.M.

Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Purworejo

sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 3 Januari 2025

Pihak Kedua,


HADI SADSILA, S.P., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 1968050519970301008

Pihak Pertama,


TRI ASTUTI ANDAYANI, S.TP., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 197501262000032003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Unit Kerja : Bidang Pangan

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tercapainya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Infrastruktur yang Disediakan	80%
2	Tercapainya Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	100%
3	Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Pangan pada Daerah Rawan/Rentan Pangan	Persentase Penanganan pada Daerah Rawan/ Rentan Pangan	20,00%
4	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Aman	100%

Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.019.576.000,00	APBD
2	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rp 111.500.000,00	APBD
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Rp 1.145.555.800,00	APBD
2	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Rp 63.000.000,00	APBD
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Rp 12.000.000,00	APBD
3	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 358.802.800,00	APBD
4	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Rp 42.200.600,00	APBD
Jumlah		Rp 2.752.635.200,00	

Purworejo, 3 Januari 2025

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Purworejo

Kepala Bidang Pangan



HADI SADSILA, S.P., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196805051997031008

TRI ASTUTI ANDAYANI, S.TP., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 197501262000032033



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN

Jalan Mayjen Sutoyo 29-31 Purworejo Kode Pos 54114
Telepon (0275) 321404, Faksimile (0275) 321015
Laman dkpp.purworejokab.go.id, Pos-el dkpp@purworejokab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JAYADI, S.P., M.M.

Jabatan : Kepala Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HADI SADSILA, S.P., M.M.

Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Purworejo

sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 3 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



HADI SADSILA, S.P., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 1968050519970301008

JAYADI, S.P., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 196711121988111001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Unit Kerja : Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian

No (1)	Sasaran Program (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Tersedia dan Dikembangkannya Sarana Pertanian	Persentase Penyediaan Sarana Pertanian bagi Kelompok Tani	95%
2	Terkendalinya Hama dan Penyakit Tanaman Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT	100%

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Rp 4.307.535.000,00	APBD, DBHCHT
2 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 3.771.400.460,00	APBD
3 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Rp 5.807.715.000,00	APBD
4 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Rp 290.173.000,00	APBD
Jumlah	Rp 14.176.823.460,00	

Purworejo, 3 Januari 2025

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Purworejo

Kepala Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian



HADI SADSILA, S.P., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196805051997031008

JAYADI, S.P., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 196711121988111001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN**

Jalan Mayjen Sutoyo 29-31 Purworejo Kode Pos 54114
Telepon (0275) 321404, Faksimile (0275) 321015
Laman dkpp.purworejokab.go.id, Pos-el dkpp@purworejokab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARIE SULISTYANI, S.TP., M.P.

Jabatan : Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HADI SADSILA, S.P., M.M.

Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Purworejo

sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 3 Januari 2025

Pihak Kedua,



HADI SADSILA, S.P., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 1968050519970301008

Pihak Pertama,

ARIE SULISTYANI, S.TP., M.P.
Pembina (IV/a)
NIP. 197107211998032007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Unit Kerja : Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian

No (1)	Sasaran Program (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Tersedia dan Dikembangkannya Prasarana Pertanian	Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian bagi Kelompok Tani	80%
2	Tersusunnya Rekomendasi Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	Persentase Jumlah Usulan Izin Usaha Pertanian	100%
3	Terselenggaranya Penyuluhan Pertanian	Persentase Kenaikan Jumlah Petani Milenial	80%

Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1	Pembangunan Prasarana Pertanian	Rp 6.942.419.100,00	APBD
2	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 32.274.200,00	APBD
3	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 20.000.000,00	APBD
4	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Rp 1.629.417.220,00	APBD, DBHCHT
Jumlah		Rp 8.624.110.520,00	

Purworejo, 3 Januari 2025

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Purworejo



HADI SADSILA, S.P., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196805051997031008

Kepala Bidang Prasarana dan
Penyuluhan Pertanian

ARIE SULISTYANI, S.TP., M.P.
Pembina (IV/a)
NIP 197107211998032007



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN**

Jalan Mayjen Sutoyo 29-31 Purworejo Kode Pos 54114
Telepon (0275) 321404, Faksimile (0275) 321015
Laman dkpp.purworejokab.go.id, Pos-el dkpp@purworejokab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : drh. SRI WIDARTIK, M.M.
Jabatan : Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat
Veterriner
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HADI SADSILA, S.P., M.M.
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Purworejo
sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 3 Januari 2025

Pihak Kedua,


HADI SADSILA, S.P., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 1968050519970301008

Pihak Pertama,


drh. SRI WIDARTIK, M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 197506042006042022

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Unit Kerja : Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terkendalinya Penyakit Hewan Menular	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	19%

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.000.000,00	APBD
2 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 133.930.500,00	APBD
3 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 95.007.800,00	APBD
Jumlah	Rp 228.938.300,00	

Purworejo, 3 Januari 2025

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Purworejo

Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan
Kesehatan Masyarakat Veteriner



HADI SADSILA, S.P., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196805051997031008

[Handwritten signature]

drh. SRI WIDARTIK, M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 197506042006042022



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN**

Jalan Mayjen Sutoyo 29-31 Purworejo Kode Pos 54114
Telepon (0275) 321404, Faksimile (0275) 321015
Laman dkpp.purworejokab.go.id, Pos-el dkpp@purworejokab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : drh. AMAD KOSIM
Jabatan : Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HADI SADSILA, S.P., M.M.
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Purworejo

sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 3 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



HADI SADSILA, S.P., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 1968050519970301008

drh. AMAD KOSIM
Pembina (IV/a)
NIP 197110052005011018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Unit Kerja : UPT Pusat Kesehatan Hewan

No	Sasaran Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Layanan Jasa Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner	Layanan Jasa Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner	Layanan Pengobatan Hewan	12 bulan

Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Rp 5.000.000,00	APBD
Jumlah		Rp 5.000.000,00	

Purworejo, 3 Januari 2025

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Purworejo



HADI SADSILA, S.P., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196805051997031008

Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan

drh. AMAD KOSIM
Pembina (IV/a)
NIP 197110052005011018



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN**

Jalan Mayjen Sutoyo 29-31 Purworejo Kode Pos 54114
Telepon (0275) 321404, Faksimile (0275) 321015
Laman dkpp.purworejokab.go.id, Pos-el dkpp@purworejokab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FITRIA KURNIAWATI, S.TP., M.M.

Jabatan : Kepala Sub. Bagian Perencanaan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. SITI LESTARI, M.M.

Jabatan : Sekretaris Dinas

sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 3 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Ir. SITI LESTARI, M.M.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP 196706031996032003

FITRIA KURNIAWATI, S.TP., M.M.

Pembina (IV/a)

NIP 197908212005012002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Unit Kerja : Kepala Sub Bagian Perencanaan

No (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Sasaran Sub Kegiatan (3)	Indikator Kinerja (4)	Target (5)
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19 Dokumen
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan
2	Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	183 Orang/Bulan
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	26 Laporan
3	Terlaksananya Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen

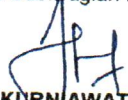
Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 38.000.000,00	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 2.746.800,00	APBD
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 71.785.100,00	APBD
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 19.036.256.548,00	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 1.000.000,00	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp 14.647.000,00	APBD
3 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Rp 1.026.800,00	APBD
Jumlah		Rp 19.165.462.248,00	

Purworejo, 3 Januari 2025

Sekretaris

Ir. SITI LESTARI, M.M.
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP 196706031996032003

Kepala Sub Bagian Perencanaan


FITRIA KURNIAWATI, S.TP., M.M.
 Pembina (IV/a)
 NIP 1979080212005012002



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN**

Jalan Mayjen Sutoyo 29-31 Purworejo Kode Pos 54114
Telepon (0275) 321404, Faksimile (0275) 321015
Laman dkpp.purworejokab.go.id, Pos-el dkpp@purworejokab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MANGISATUN, S.E.
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Keuangan
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. SITI LESTARI, M.M.
Jabatan : Sekretaris Dinas
sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 3 Januari 2025

Pihak Pertama,



Ir. SITI LESTARI, M.M.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 196706031996032003

MANGISATUN, S.E.
Penata Tk. I (III/d)
NIP 197106081995032001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Unit Kerja : Sub Bagian Keuangan

No (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Sasaran Sub Kegiatan (3)	Indikator Kinerja (4)	Target (5)
1	Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	183 Orang/Bulan
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	26 Laporan
2	Terlaksananya Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen

Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	APBD
2 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	APBD
Jumlah		-	

Purworejo, 3 Januari 2025

Kepala Sub Bagian Keuangan



MANGISATUN, SE.
Penata Tk I (III/d)
NIP 197106081995032001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN**

Jalan Mayjen Sutoyo 29-31 Purworejo Kode Pos 54114
Telepon (0275) 321404, Faksimile (0275) 321015
Laman dkpp.purworejokab.go.id, Pos-el dkpp@purworejokab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NUR RIANA, S.IP.
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. SITI LESTARI, M.M.
Jabatan : Sekretaris Dinas
sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 3 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Ir. SITI LESTARI, M.M.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 196706031996032003


NUR RIANA, S.IP.
Penata Tk. I (III/d)
NIP 196803211994022001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Unit Kerja : Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

No (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Sasaran Sub Kegiatan (3)	Indikator Kinerja (4)	Target (5)
1	Terlaksananya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang
2	Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket
		Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen
3	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
4	Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi yang Dipelihara/ Direhabilitasi	14 Unit
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	0,096 Ha

Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 923.000,00	APBD
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 9.572.200,00	APBD
2 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 5.513.800,00	APBD
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 4.050.000,00	APBD
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 203.591.300,00	APBD
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 17.680.400,00	APBD
	Penyediaan Bahan/Material	Rp 6.808.000,00	APBD
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 3.000.000,00	APBD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 134.862.000,00	APBD
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp 3.496.500,00	APBD
3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 83.299.850,00	APBD
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 168.714.600,00	APBD
4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 43.960.000,00	APBD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 196.320.000,00	APBD
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 17.320.000,00	APBD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 51.900.000,00	APBD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 8.540.000,00	APBD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Rp 1.920.000,00	APBD
Jumlah		Rp 961.471.650,00	

Purworejo, 3 Januari 2025

Kepals Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian



NUR RIANA, S.IP
 Penata Tk I (III/d)
 NIP 196803211994022001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN

Jalan Mayjen Sutoyo 29-31 Purworejo Kode Pos 54114
Telepon (0275) 321404, Faksimile (0275) 321015
Laman dkpp.purworejokab.go.id, Pos-el dkpp@purworejokab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SATIYAH, S.E.
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Tata Usaha UPT Pusat Kesehatan Hewan
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : drh. AMAD KOSIM
Jabatan : Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan
sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

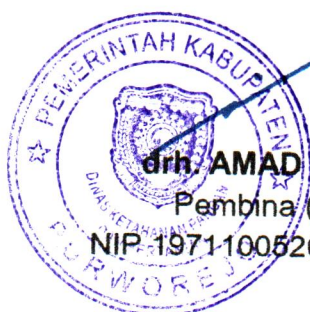
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 3 Januari 2025

Pihak Kedua,



drh. AMAD KOSIM
Pembina (IV/a)
NIP. 197110052005011018

Pihak Pertama,

SATIYAH, S.E.
Penata Tk. I (III/d)
NIP 196806171990032002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Unit Kerja : Sub Bagian Tata Usaha UPT Pusat Kesehatan Hewan

No	Sasaran Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Jasa Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner	Administrasi Layanan Pengobatan Hewan	12 bulan

Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Rp 1.000.000,00	APBD
Jumlah		Rp 1.000.000,00	

Purworejo, 3 Januari 2025

Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan

Ka. Sub. Bagian Tata Usaha Kepala
UPT Pusat Kesehatan Hewan



SATIYAH, S.E.
Penata Tk. I (III/d)
NIP 196806171990032002



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Jalan Mayjen Sutoyo 29-31 Purworejo Jawa Tengah 54114,
Telepon (0275) 321404, Faksimile (0275) 321015
Laman dkpp.purworejokab.go.id, Pos-el dkpp@purworejokab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WIYOTO HARJONO, S.T.
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten
Purworejo
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YULI HASTUTI
Jabatan : Bupati Purworejo
sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 13 Agustus 2025

Pihak Kedua,

YULI HASTUTI



Pihak Pertama,

WIYOTO HARJONO, S.T.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197804202003121007



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN PURWOREJO

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Ketersediaan pangan utama	254,55 kg/kapita
2	Meningkatnya Produksi Pertanian	Persentase kenaikan produksi pertanian	1,29 %
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	88,67

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 20.120.625.763,00	APBD
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rp. 1.019.576.000,00	APBD
3	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 1.231.619.700,00	APBD
4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp. 61.464.900,00	APBD
5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp. 24.791.500,00	APBD
6	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp. 13.972.454.800,00	APBD, DBHCHT
7	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp. 6.875.803.500,00	APBD
8	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp. 160.032.600,00	APBD
9	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp. 154.209.400,00	APBD
10	Program Perizinan Pertanian	Rp. 10.680.000,00	APBD
11	Program Penyuluhan Pertanian	Rp. 2.332.578.220,00	APBD, DAK NON FISIK, DBHCHT
Jumlah		Rp. 45,963,836,383,00	

Purworejo, 13 Agustus 2025

Pihak Kedua,



YULI HASTUTI

Pihak Pertama,



WIYOTO HARJONO, S.T.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197804202003121007



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Jalan Mayjen Sutoyo 29-31 Purworejo Jawa Tengah 54114,
Telepon (0275) 321404, Faksimile (0275) 321015
Laman dkpp.purworejokab.go.id, Pos-el dkpp@purworejokab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TRI ASTUTI ANDAYANI, S.TP., M.M.
Jabatan : Plt. Sekretaris Dinas
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : WIYOTO HARJONO, S.T.
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Purworejo
sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



WIYOTO HARJONO, S.T.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197804202003121007

Purworejo, 13 Agustus 2025

Pihak Pertama,


TRI ASTUTI ANDAYANI, S.TP., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 197501262000032003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN PURWOREJO

Unit Kerja : Sekretariat

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(5)
1	Terlayannya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100%

	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 49.685.300,00	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 19.226.323.113,00	APBD
3	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Rp 513.200,00	APBD
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 460.000,00	APBD
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 291.392.300,00	APBD
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 232.708.250,00	APBD
7	Pemeliharaan Barang Milik Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 319.543.600,00	APBD
	Jumlah	Rp 20.120.625.763,00	



Pihak Kedua

WIYOTO HARJONO, S.T.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197804202003121007

Purworejo, 13 Agustus 2025

Pihak Pertama,


TRI ASTUTI ANDAYANI, S.TP., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 197501262000032003



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Jalan Mayjen Sutoyo 29-31 Purworejo Jawa Tengah 54114,
Telepon (0275) 321404, Faksimile (0275) 321015
Laman dkpp.purworejokab.go.id, Pos-el dkpp@purworejokab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TRI ASTUTI ANDAYANI, S.TP., M.M.
Jabatan : Kepala Bidang Pangan
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : WIYOTO HARJONO, S.T.
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Purworejo
sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

WIYOTO HARJONO, S.T.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197804202003121007

Purworejo, 13 Agustus 2025

Pihak Pertama,


TRI ASTUTI ANDAYANI, S.TP., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 197501262000032003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN PURWOREJO

Unit Kerja: Bidang Pangan

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tercapainya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Insfatrukur yang Disediakan	100%
2	Tercapainya Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	100%
3	Tercapainya pemenuhan kebutuhan pangan pada daerah rawan/rentan pangan	Persentase penanganan pada daerah rawan/rentan pangan	21,83%
4	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar aman	100%

	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.019.576.000,00	APBD
2	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rp 67.963.900,00	APBD
3	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Rp 1.145.555.800,00	APBD
4	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Rp 18.100.000,00	APBD
5	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Rp 7.410.500,00	APBD
6	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 54.054.400,00	APBD
7	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Rp 24.791.500,00	APBD
	Jumlah	Rp 2.337.452.100,00	

Purworejo, 13 Agustus 2025

Pihak Pertama,

TRI ASTUTI ANDAYANI, S.TP., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 197501262000032003



Pihak Kedua,

WIYOTO HARJONO, S.T.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197804202003121007



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Jalan Mayjen Sutoyo 29-31 Purworejo Jawa Tengah 54114,
Telepon (0275) 321404, Faksimile (0275) 321015
Laman dkpp.purworejokab.go.id, Pos-el dkpp@purworejokab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FITRIA KURNIAWATI, S.TP., M.M.
Jabatan : Kepala Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : WIYOTO HARJONO, S.T.
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Purworejo
sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 13 Agustus 2025

Pihak Pertama,

FITRIA KURNIAWATI, S.TP., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 197908212005012002



Pihak Kedua,

WIYOTO HARJONO, S.T.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197804202003121007

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN PURWOREJO

Unit Kerja: Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedia dan Dikembangkannya Sarana Pertanian	Persentase Penyediaan Sarana Pertanian bagi Kelompok Tani	143,23%
2	Terkendalinya Hama Dan Penyakit Tanaman	Persentase Fasilitasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT	100%

	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Rp 4.851.803.800,00	APBD, DBHCHT
2	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 3.306.991.075,00	APBD, DBHCHT
3	Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Rp 5.813.659.925,00	APBD
4	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Rp 154.209.400,00	APBD
	Jumlah	Rp 14,126,664,200,00	



Pihak Kedua,

WIYOTO HARJONO, S.T.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197804202003121007

Purworejo, 13 Agustus 2025

Pihak Pertama,

FITRIA KURNIAWATI, S.TP., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 197908212005012002



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Jalan Mayjen Sutoyo 29-31 Purworejo Jawa Tengah 54114,
Telepon (0275) 321404, Faksimile (0275) 321015
Laman dkpp.purworejokab.go.id, Pos-el dkpp@purworejokab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARIE SULISTYANI, S.TP., M.P.
Jabatan : Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : WIYOTO HARJONO, S.T.
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Purworejo
sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

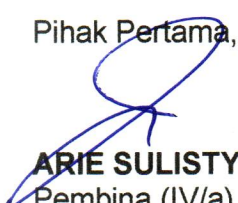
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 13 Agustus 2025

Pihak Pertama,


ARIE SULISTYANI, S.TP., M.P.
Pembina (IV/a)
NIP 197107211998032007

Pihak Kedua,


WIYOTO HARJONO, S.T.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197804202003121007



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN PURWOREJO

Unit Kerja: Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedia dan dikembangkannya Prasarana Pertanian	Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian Bagi Kelompok Tani	82,22%
2	Tersusunnya Rekomendasi Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	Persentase Jumlah Usulan Izin Usaha Pertanian	100%
3	Terselenggaranya Penyuluhan Pertanian	Persentase Kenaikan Jumlah Petani Milenial	80%

	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pembangunan Prasarana Pertanian	Rp 6.851.453.100,00	APBD
2	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak Dan Rimpun/Galur Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 24.350.400,00	APBD
3	Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 10.680.000,00	APBD
4	Pelaksanaan Penyuluh Pertanian	Rp 2.332.578.220,00	APBD, DAK NON FISIK, DBHCHT
	Jumlah	Rp 9.219.061.720,00	



Pihak Kedua,

WIYOTO HARJONO, S.T.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197804202003121007

Purworejo, 13 Agustus 2025

Pihak Pertama,

ARIE SULISTYANI, S.TP., M.P.
Pembina (IV/a)
NIP 197107211998032007



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Jalan Mayjen Sutoyo 29-31 Purworejo Jawa Tengah 54114,
Telepon (0275) 321404, Faksimile (0275) 321015
Laman dkpp.purworejokab.go.id, Pos-el dkpp@purworejokab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : drh. SRI WIDARTIK, M.M.
Jabatan : Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : WIYOTO HARJONO, S.T.
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo
sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 13 Agustus 2025

Pihak Pertama,

drh. SRI WIDARTIK, M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 197506042006042022



WIYOTO HARJONO, S.T.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197804202003121007

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN PURWOREJO

Unit Kerja: Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terkendalinya penyakit menular	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	19%

Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 93.383.600,00	APBD
2	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 66.649.000,00	APBD
Jumlah		Rp 160,032,600,00	



Pihak Kedua,

WIYOTO HARJONO, S.T.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197804202003121007

Purworejo, 13 Agustus 2025

Pihak Pertama,

drh. SRI WIDARTIK, M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 197506042006042022



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Jalan Mayjen Sutoyo 29-31 Purworejo Jawa Tengah 54114,
Telepon (0275) 321404, Faksimile (0275) 321015
Laman dkpp.purworejokab.go.id, Pos-el dkpp@purworejokab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : drh. AMAD KOSIM
Jabatan : Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : WIYOTO HARJONO, S.T.
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Purworejo
sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 13 Agustus 2025

Pihak Pertama,


drh. AMAD KOSIM
Pembina(IV/a)
NIP 19710052005011018



Pihak Kedua,

WIYOTO HARJONO, S.T.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197804202003121007

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN PURWOREJO

Unit Kerja: UPT Pusat Kesehatan Hewan

No	Sasaran Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksanannya Layanan Jasa Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner	Layanan Jasa Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner	Layanan Pengobatan Hewan	12 Laporan

Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Rp 5.000.000,00	APBD
Jumlah		Rp 5.000.000,00	



Pihak Kedua,

WIYOTO HARJONO, S.T.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197804202003121007

Purworejo, 13 Agustus 2025

Pihak Pertama,

drh. AMAD KOSIM
Pembina (IV/a)
NIP 19710052005011018



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Jalan Mayjen Sutoyo 29-31 Purworejo Jawa Tengah 54114,
Telepon (0275) 321404, Faksimile (0275) 321015
Laman dkpp.purworejokab.go.id, Pos-el dkpp@purworejokab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NUR SUBKHAN, S.Pt.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TRI ASTUTI ANDAYANI, S.TP., M.M.
Jabatan : Plt. Sekretaris
sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

TRI ASTUTI ANDAYANI, S.TP., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP. 197501262000032003

Purworejo, 13 Agustus 2025

Pihak Pertama,

NUR SUBKHAN, S.Pt.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP 198311032010011013

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN PURWOREJO

Unit Kerja: Sub Bagian Perencanaan

No	Sasaran Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19 Dokumen
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan
2	Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	208 Orang/ bulan
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	26 Laporan
3	Terlaksananya Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen

Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 23.852.600,00	APBD
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 25.832.700,00	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 19.218.500.013,00	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 500.000,00	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp 7.323.100,00	APBD
3	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Rp 513.200,00	APBD
Jumlah		Rp 19,276,521,613,00	

Purworejo, 13 Agustus 2025



Pihak Kedua,

TRI ASTUTI ANDAYANI, S.TP., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP. 197501262000032003

Pihak Pertama,

NUR SUBKHAN, S.Pt.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 198311032010011013



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Jalan Mayjen Sutoyo 29-31 Purworejo Jawa Tengah 54114,
Telepon (0275) 321404, Faksimile (0275) 321015
Laman dkpp.purworejokab.go.id, Pos-el dkpp@purworejokab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MANGISATUN, S.E.
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Keuangan
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TRI ASTUTI ANDAYANI, S.TP., M.M
Jabatan : Plt. Sekretaris
sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 13 Agustus 2025

Pihak Pertama,

MANGISATUN, S.E.
Penata Tk. I (III/d)
NIP 197106081995032001



Pihak Kedua,

TRI ASTUTI ANDAYANI, S.TP., M.M
Pembina (IV/a)
NIP 197501262000032003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN PURWOREJO

Unit Kerja: Sub Bagian Keuangan

No (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Sasaran Sub Kegiatan (3)	Indikator Sub Kegiatan (4)	Target (5)
1	Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	208 Orang/ bulan
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	26 Laporan
2	Terlaksananya Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen

Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- APBD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- APBD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	- APBD
2	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	- APBD
Jumlah		-	

Purworejo, 13 Agustus 2025

Pihak Pertama,

MANGISATUN, S.E.
 Penata Tk. I (III/d)
 NIP 197106081995032001

Pihak Kedua,
TRI ASTUTI ANDAYANI, S.TP., M.M.
 Pembina (IV/a)
 NIP 197501262000032003



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Jalan Mayjen Sutoyo 29-31 Purworejo Jawa Tengah 54114,
Telepon (0275) 321404, Faksimile (0275) 321015
Laman dkpp.purworejokab.go.id, Pos-el dkpp@purworejokab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NUR RIANA, S.IP.
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TRI ASTUTI ANDAYANI, S.TP., M.M.
Jabatan : Plt. Sekretaris
sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 13 Agustus 2025

Pihak Pertama,

NUR RIANA, S.IP.
Penata Tk. I (III/d)
NIP 196803211994022001



Pihak Kedua,

TRI ASTUTI ANDAYANI, S.TP., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 197501262000032003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN PURWOREJO

Unit Kerja: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

No (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Sasaran Sub Kegiatan (3)	Indikator Sub Kegiatan (4)	Target (5)
1	Terlaksananya Layanan Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen
2	Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket
		Tersedianya peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	12 Paket
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket
		Tersedianya Bahan/material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan	1 Paket
		Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	6 Laporan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen
3	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan sumberdaya listrik yang disediakan	12 Laporan
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan
4	Terpeliharanya Barang milik daerah (BMD) Penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya Barang milik daerah (BMD) Penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak	1 Unit
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	24 unit
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana/Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 unit
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	0,0716 Ha

Kegiatan		Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 460.000,00	APBD
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 5.513.800,00	APBD
		Penyediaan Peralatan Rumah tangga	RP 3.603.000,00	APBD
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 203.591.300,00	APBD
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 8.400.000,00	APBD
		Penyediaan Bahan/Material	Rp 3.380.000,00	APBD
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 1.800.000,00	APBD
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 52.081.200,00	APBD
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp 13.023.000,00	APBD
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik	Rp 88.075.250,00	APBD
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 144.633.000,00	APBD
4	Pemeliharaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 43.960.000,00	APBD
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 196.320.000,00	APBD
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 17.320.000,00	APBD
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 51.900.000,00	APBD
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 8.540.000,00	APBD
		Pemeliharaan Rehabilitasi Tanah	Rp 1.503.600,00	APBD
Jumlah			RP 844.104.150.00	



Pihak Kedua,

TRI ASTUTI ANDAYANI, S.TP., M.M.
 Pembina (IV/a)
 NIP 197501262000032003

Purworejo, 13 Agustus 2025

Pihak Pertama,

NUR RIANA, S.IP.
 Penata Tk. I (III/d)
 NIP 196803211994022001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Jalan Mayjen Sutoyo 29-31 Purworejo Jawa Tengah 54114,
Telepon (0275) 321404, Faksimile (0275) 321015
Laman dkpp.purworejokab.go.id, Pos-el dkpp@purworejokab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SATIYAH, S.E.
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Tata Usaha UPT Pusat Kesehatan Hewan
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : drh. AMAD KOSIM
Jabatan : Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan
sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 13 Agustus 2025

Pihak Pertama,

SATIYAH, S.E.
Penata Tk. I (III/d)
NIP 196806171990032002



Pihak Kedua,

drh. AMAD KOSIM
Pembina (IV/a)
NIP 19710052005011018

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN PURWOREJO

Unit Kerja: Sub Bagian Tata Usaha UPT Pusat Kesehatan Hewan

No	Sasaran Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Jasa Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner	Administrasi Layanan Pengobatan Hewan	12 Laporan

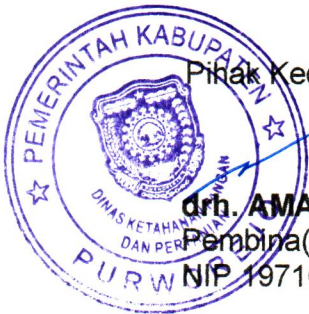
Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Rp 1.000.000,00	APBD
Jumlah		Rp 1.000.000,00	

Purworejo, 13 Agustus 2025

Pihak Pertama,



SATIYAH, S.E.
 Penata Tk. I (III/d)
 NIP 196806171990032002



Pihak Kedua,

drh. AMAD KOSIM
 Pembina(IV/a)
 NIP 19710052005011018



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
Periode : 01 January 2025 s/d 31 December 2025

Organisasi : 3-27.2-09.3-25.01 Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
Sub Unit Organisasi : 3-27.2-09.3-25.01.01 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025				LEBIH/(KURANG)	REALISASI 2024
			PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	8
4	PENDAPATAN DAERAH	218.536.800,00	0,00	419.578.810,00	419.578.810,00	191,99	201.042.010,00	170.557.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	218.536.800,00	0,00	419.578.810,00	419.578.810,00	191,99	201.042.010,00	170.557.000,00
4.1.2	Retribusi Daerah	218.536.800,00	0,00	415.402.810,00	415.402.810,00	190,08	196.866.010,00	62.490.000,00
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	218.536.800,00	0,00	415.402.810,00	415.402.810,00	190,08	196.866.010,00	62.490.000,00
4.1.2.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	89.010.000,00	0,00	60.090.000,00	60.090.000,00	67,51	(28.920.000,00)	62.490.000,00
4.1.2.02.07.01	Retribusi pelayanan Rumah Potong Hewan	89.010.000,00	0,00	60.090.000,00	60.090.000,00	67,51	(28.920.000,00)	62.490.000,00
4.1.2.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	129.526.800,00	0,00	355.312.810,00	355.312.810,00	274,32	225.786.010,00	0,00
4.1.2.02.20.01	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	129.526.800,00	0,00	355.312.810,00	355.312.810,00	274,32	225.786.010,00	0,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	4.176.000,00	4.176.000,00	100	4.176.000,00	108.067.000,00
4.1.4.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	108.067.000,00
4.1.4.03.01	Hasil Sewa BMD	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	108.067.000,00
4.1.4.03.01.01	Hasil Sewa BMD	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	108.067.000,00
4.1.4.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	0,00	4.176.000,00	4.176.000,00	100	4.176.000,00	0,00
4.1.4.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	0,00	4.176.000,00	4.176.000,00	100	4.176.000,00	0,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025				LEBIH/(KURANG)	REALISASI 2024
			PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	8
4.1.4.09.01.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	0,00	4.176.000,00	4.176.000,00	100	4.176.000,00	0,00
5	BELANJA DAERAH	45.963.836.383,00	0,00	43.490.219.690,00	43.490.219.690,00	94,62	(2.473.616.693,00)	42.676.372.898,00
5.1	BELANJA OPERASI	45.897.321.383,00	0,00	43.424.983.730,00	43.424.983.730,00	94,61	(2.472.337.653,00)	40.353.742.648,00
5.1.1	Belanja Pegawai	19.218.500.013,00	0,00	18.188.960.429,00	18.188.960.429,00	94,64	(1.029.539.584,00)	17.142.224.348,00
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	13.216.634.743,00	0,00	12.571.056.032,00	12.571.056.032,00	95,12	(645.578.711,00)	11.624.685.073,00
5.1.1.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	9.179.712.130,00	0,00	8.983.683.886,00	8.983.683.886,00	97,86	(196.028.244,00)	8.469.682.100,00
5.1.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok PNS	6.561.085.272,00	0,00	6.435.751.200,00	6.435.751.200,00	98,09	(125.334.072,00)	6.714.213.100,00
5.1.1.01.01.02	Belanja Gaji Pokok PPPK	2.618.626.858,00	0,00	2.547.932.686,00	2.547.932.686,00	97,30	(70.694.172,00)	1.755.469.000,00
5.1.1.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	839.306.574,00	0,00	764.915.134,00	764.915.134,00	91,14	(74.391.440,00)	724.537.526,00
5.1.1.01.02.01	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	599.432.770,00	0,00	576.613.986,00	576.613.986,00	96,19	(22.818.784,00)	610.885.204,00
5.1.1.01.02.02	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	239.873.804,00	0,00	188.301.148,00	188.301.148,00	78,50	(51.572.656,00)	113.652.322,00
5.1.1.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	145.530.000,00	0,00	126.410.000,00	126.410.000,00	86,86	(19.120.000,00)	144.550.000,00
5.1.1.01.03.01	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	145.530.000,00	0,00	126.410.000,00	126.410.000,00	86,86	(19.120.000,00)	144.550.000,00
5.1.1.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	1.215.188.866,00	0,00	1.133.461.666,00	1.133.461.666,00	93,27	(81.727.200,00)	1.098.495.000,00
5.1.1.01.04.01	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	870.777.200,00	0,00	800.030.000,00	800.030.000,00	91,88	(70.747.200,00)	817.245.000,00
5.1.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	344.411.666,00	0,00	333.431.666,00	333.431.666,00	96,81	(10.980.000,00)	281.250.000,00
5.1.1.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	126.852.800,00	0,00	104.985.000,00	104.985.000,00	82,76	(21.867.800,00)	92.030.000,00
5.1.1.01.05.01	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	90.252.800,00	0,00	83.205.000,00	83.205.000,00	92,19	(7.047.800,00)	92.030.000,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025				LEBIH/(KURANG)	REALISASI 2024
			PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	8
5.1.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	36.600.000,00	0,00	21.780.000,00	21.780.000,00	59,51	(14.820.000,00)	0,00
5.1.1.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	528.736.787,00	0,00	492.504.280,00	492.504.280,00	93,15	(36.232.507,00)	451.321.440,00
5.1.1.01.06.01	Belanja Tunjangan Beras PNS	350.296.267,00	0,00	343.560.480,00	343.560.480,00	98,08	(6.735.787,00)	358.696.260,00
5.1.1.01.06.02	Belanja Tunjangan Beras PPPK	178.440.520,00	0,00	148.943.800,00	148.943.800,00	83,47	(29.496.720,00)	92.625.180,00
5.1.1.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	428.717.017,00	0,00	308.133.413,00	308.133.413,00	71,87	(120.583.604,00)	23.646.080,00
5.1.1.01.07.01	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan khusus PNS	428.717.017,00	0,00	308.133.413,00	308.133.413,00	71,87	(120.583.604,00)	23.646.080,00
5.1.1.01.07.02	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan khusus PPPK	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
5.1.1.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	136.037,00	0,00	124.699,00	124.699,00	91,67	(11.338,00)	129.316,00
5.1.1.01.08.01	Belanja Pembulatan Gaji PNS	92.754,00	0,00	88.138,00	88.138,00	95,02	(4.616,00)	99.414,00
5.1.1.01.08.02	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	43.283,00	0,00	36.561,00	36.561,00	84,47	(6.722,00)	29.902,00
5.1.1.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	661.302.061,00	0,00	582.368.502,00	582.368.502,00	88,06	(78.933.559,00)	550.698.024,00
5.1.1.01.09.01	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	467.130.259,00	0,00	423.249.215,00	423.249.215,00	90,61	(43.881.044,00)	442.948.904,00
5.1.1.01.09.02	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	194.171.802,00	0,00	159.119.287,00	159.119.287,00	81,95	(35.052.515,00)	107.749.120,00
5.1.1.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	22.537.815,00	0,00	18.617.574,00	18.617.574,00	82,61	(3.920.241,00)	17.398.983,00
5.1.1.01.10.01	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	16.002.224,00	0,00	13.192.959,00	13.192.959,00	82,44	(2.809.265,00)	13.733.005,00
5.1.1.01.10.02	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	6.535.591,00	0,00	5.424.615,00	5.424.615,00	83,00	(1.110.976,00)	3.665.978,00
5.1.1.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	61.217.725,00	0,00	55.851.878,00	55.851.878,00	91,23	(5.365.847,00)	52.196.604,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025				LEBIH/(KURANG)	REALISASI 2024
			PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	8
5.1.1.01.11.01	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	43.709.736,00	0,00	39.578.649,00	39.578.649,00	90,55	(4.131.087,00)	41.199.046,00
5.1.1.01.11.02	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	17.507.989,00	0,00	16.273.229,00	16.273.229,00	92,95	(1.234.760,00)	10.997.558,00
5.1.1.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	7.396.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.396.931,00)	0,00
5.1.1.01.12.01	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	3.830.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.830.113,00)	0,00
5.1.1.01.12.02	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	3.566.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.566.818,00)	0,00
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	6.001.865.270,00	0,00	5.617.904.397,00	5.617.904.397,00	93,60	(383.960.873,00)	5.517.539.275,00
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	4.071.465.606,00	0,00	3.831.404.965,00	3.831.404.965,00	94,10	(240.060.641,00)	3.733.348.275,00
5.1.1.02.01.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.146.754.966,00	0,00	2.922.777.535,00	2.922.777.535,00	92,88	(223.977.431,00)	3.154.676.145,00
5.1.1.02.01.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	924.710.640,00	0,00	908.627.430,00	908.627.430,00	98,26	(16.083.210,00)	578.672.130,00
5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.919.538.824,00	0,00	1.780.381.160,00	1.780.381.160,00	92,75	(139.157.664,00)	1.782.672.250,00
5.1.1.02.03.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.463.952.934,00	0,00	1.355.979.292,00	1.355.979.292,00	92,62	(107.973.642,00)	1.497.099.635,00
5.1.1.02.03.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	455.585.890,00	0,00	424.401.868,00	424.401.868,00	93,16	(31.184.022,00)	285.572.615,00
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	10.860.840,00	0,00	6.118.272,00	6.118.272,00	56,33	(4.742.568,00)	1.518.750,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025				LEBIH/(KURANG)	REALISASI 2024
			PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	8
5.1.1.02.06.41	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	4.384.500,00	0,00	937.200,00	937.200,00	21,38	(3.447.300,00)	1.518.750,00
5.1.1.02.06.63	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	6.476.340,00	0,00	5.181.072,00	5.181.072,00	80,00	(1.295.268,00)	0,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.769.008.020,00	0,00	5.951.227.511,00	5.951.227.511,00	87,92	(817.780.509,00)	5.296.262.434,00
5.1.2.01	Belanja Barang	3.132.509.770,00	0,00	2.949.921.645,00	2.949.921.645,00	94,17	(182.588.125,00)	1.656.839.720,00
5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.129.669.770,00	0,00	2.947.091.645,00	2.947.091.645,00	94,17	(182.578.125,00)	1.656.839.720,00
5.1.2.01.01.01	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	11.947.500,00
5.1.2.01.01.02	Belanja Bahan-Bahan Kimia	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	11.875.300,00
5.1.2.01.01.04	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	822.000,00	0,00	822.000,00	822.000,00	100,00	0,00	1.200.000,00
5.1.2.01.01.08	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	180.930.500,00	0,00	179.744.250,00	179.744.250,00	99,34	(1.186.250,00)	3.802.950,00
5.1.2.01.01.11	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	98.000.000,00	0,00	61.500.000,00	61.500.000,00	62,76	(36.500.000,00)	0,00
5.1.2.01.01.12	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.923.941.150,00	0,00	1.796.992.891,00	1.796.992.891,00	93,40	(126.948.259,00)	409.551.100,00
5.1.2.01.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	155.847.100,00	0,00	154.429.968,00	154.429.968,00	99,09	(1.417.132,00)	124.702.520,00
5.1.2.01.01.25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	880.000,00	0,00	879.999,00	879.999,00	100,00	(1,00)	0,00
5.1.2.01.01.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	67.452.920,00	0,00	66.036.785,00	66.036.785,00	97,90	(1.416.135,00)	103.074.750,00
5.1.2.01.01.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	200.000,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025				LEBIH/(KURANG)	REALISASI 2024
			PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	8
5.1.2.01.01.30	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	733.500,00
5.1.2.01.01.31	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.363.800,00	0,00	6.313.000,00	6.313.000,00	99,20	(50.800,00)	785.000,00
5.1.2.01.01.32	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	55.434.000,00	0,00	54.883.994,00	54.883.994,00	99,01	(550.006,00)	39.502.000,00
5.1.2.01.01.35	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	11.745.000,00	0,00	11.699.955,00	11.699.955,00	99,62	(45.045,00)	0,00
5.1.2.01.01.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.625.000,00	0,00	3.592.500,00	3.592.500,00	99,10	(32.500,00)	54.869.700,00
5.1.2.01.01.37	Belanja Obat-Obatan-Obat	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	2.429.000,00
5.1.2.01.01.38	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	16.307.000,00	0,00	16.272.793,00	16.272.793,00	99,79	(34.207,00)	246.273.500,00
5.1.2.01.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	428.876.000,00	0,00	415.197.910,00	415.197.910,00	96,81	(13.678.090,00)	468.756.500,00
5.1.2.01.01.53	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	0,00	2.850.000,00
5.1.2.01.01.54	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	177.645.300,00	0,00	176.925.600,00	176.925.600,00	99,59	(719.700,00)	163.136.400,00
5.1.2.01.01.64	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	7.750.000,00
5.1.2.01.01.81	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	3.400.000,00
5.1.2.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	2.840.000,00	0,00	2.830.000,00	2.830.000,00	99,65	(10.000,00)	0,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025				LEBIH/(KURANG)	REALISASI 2024
			PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	8
5.1.2.01.04.12 3	Belanja Peralatan dan Mesin- Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.840.000,00	0,00	2.830.000,00	2.830.000,00	99,65	(10.000,00)	0,00
5.1.2.02	Belanja Jasa	2.529.147.750,00	0,00	1.966.539.037,00	1.966.539.037,00	77,76	(562.608.713,00)	1.438.329.656,00
5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.435.482.750,00	0,00	1.912.814.245,00	1.912.814.245,00	78,54	(522.668.505,00)	1.255.995.789,00
5.1.2.02.01.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	158.100.000,00	0,00	145.450.000,00	145.450.000,00	92,00	(12.650.000,00)	100.650.000,00
5.1.2.02.01.06	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	179.400.000,00	0,00	179.400.000,00	179.400.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.2.02.01.11	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	6.500.000,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	44,62	(3.600.000,00)	2.700.000,00
5.1.2.02.01.15	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	14.861.000,00	0,00	9.302.435,00	9.302.435,00	62,60	(5.558.565,00)	37.438.750,00
5.1.2.02.01.23	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	20.000.000,00	0,00	4.486.000,00	4.486.000,00	22,43	(15.514.000,00)	392.140.000,00
5.1.2.02.01.26	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	74.550.000,00	0,00	74.550.000,00	74.550.000,00	100,00	0,00	15.648.000,00
5.1.2.02.01.27	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	58.195.200,00
5.1.2.02.01.28	Belanja Jasa Tenaga pelayanan Umum	1.535.480.000,00	0,00	1.055.275.000,00	1.055.275.000,00	68,73	(480.205.000,00)	171.665.000,00
5.1.2.02.01.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli	56.736.000,00	0,00	56.736.000,00	56.736.000,00	100,00	0,00	64.800.000,00
5.1.2.02.01.30	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	76.728.000,00	0,00	74.226.000,00	74.226.000,00	96,74	(2.502.000,00)	80.064.000,00
5.1.2.02.01.31	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	44.133.000,00	0,00	44.133.000,00	44.133.000,00	100,00	0,00	56.340.000,00
5.1.2.02.01.33	Belanja Jasa Tenaga Supir	12.100.000,00	0,00	12.100.000,00	12.100.000,00	100,00	0,00	13.200.000,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025				LEBIH/(KURANG)	REALISASI 2024
			PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	8
5.1.2.02.01.37	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	100,00	0,00	1.251.600,00
5.1.2.02.01.39	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	14.600.000,00
5.1.2.02.01.47	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	150.000.000,00	0,00	148.990.860,00	148.990.860,00	99,33	(1.009.140,00)	99.729.000,00
5.1.2.02.01.59	Belanja Tagihan Telepon	5.905.250,00	0,00	5.680.022,00	5.680.022,00	96,19	(225.228,00)	6.295.527,00
5.1.2.02.01.60	Belanja Tagihan Air	11.256.000,00	0,00	10.718.900,00	10.718.900,00	95,23	(537.100,00)	9.143.350,00
5.1.2.02.01.61	Belanja Tagihan Listrik	70.914.000,00	0,00	70.864.028,00	70.864.028,00	99,93	(49.972,00)	74.631.362,00
5.1.2.02.01.63	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	57.504.000,00
5.1.2.02.01.67	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.214.500,00	0,00	5.077.000,00	5.077.000,00	97,36	(137.500,00)	0,00
5.1.2.02.01.81	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	7.480.000,00	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00	90,91	(680.000,00)	0,00
5.1.2.02.01.88	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional	5.375.000,00	0,00	5.375.000,00	5.375.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.2.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	33.504.000,00	0,00	20.726.442,00	20.726.442,00	61,86	(12.777.558,00)	19.102.467,00
5.1.2.02.02.05	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	29.334.000,00	0,00	17.738.297,00	17.738.297,00	60,47	(11.595.703,00)	16.596.468,00
5.1.2.02.02.06	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.485.000,00	0,00	1.053.411,00	1.053.411,00	70,94	(431.589,00)	1.113.435,00
5.1.2.02.02.07	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.980.000,00	0,00	1.317.490,00	1.317.490,00	66,54	(662.510,00)	1.392.564,00
5.1.2.02.02.19	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	600.000,00	0,00	543.828,00	543.828,00	90,64	(56.172,00)	0,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025				LEBIH/(KURANG)	REALISASI 2024
			PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	8
5.1.2.02.02.27	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	45.000,00	0,00	32.628,00	32.628,00	72,51	(12.372,00)	0,00
5.1.2.02.02.35	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	60.000,00	0,00	40.788,00	40.788,00	67,98	(19.212,00)	0,00
5.1.2.02.03	Belanja Sewa Tanah	1.503.600,00	0,00	1.503.600,00	1.503.600,00	100,00	0,00	14.020.000,00
5.1.2.02.03.04	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1.503.600,00	0,00	1.503.600,00	1.503.600,00	100,00	0,00	1.920.000,00
5.1.2.02.03.08	Belanja Sewa Tanah Basah	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	12.100.000,00
5.1.2.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	53.964.400,00	0,00	26.894.750,00	26.894.750,00	49,84	(27.069.650,00)	24.251.500,00
5.1.2.02.04.22	Belanja Sewa Electric Generating Set	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
5.1.2.02.04.36	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	35.130.000,00	0,00	12.650.000,00	12.650.000,00	36,01	(22.480.000,00)	0,00
5.1.2.02.04.37	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	7.341.400,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	44,95	(4.041.400,00)	0,00
5.1.2.02.04.11 7	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	11.493.000,00	0,00	10.944.750,00	10.944.750,00	95,23	(548.250,00)	24.251.500,00
5.1.2.02.04.13 2	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
5.1.2.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	4.693.000,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	98,02	(93.000,00)	2.294.400,00
5.1.2.02.05.09	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.693.000,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	98,02	(93.000,00)	2.294.400,00
5.1.2.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	122.665.500,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025				LEBIH/(KURANG)	REALISASI 2024
			PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	8
5.1.2.02.12.01	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	117.665.500,00
5.1.2.02.12.02	Belanja Sosialisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	5.000.000,00
5.1.2.03	Belanja Pemeliharaan	318.040.000,00	0,00	316.837.066,00	316.837.066,00	99,62	(1.202.934,00)	253.831.629,00
5.1.2.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	266.140.000,00	0,00	265.713.344,00	265.713.344,00	99,84	(426.656,00)	181.319.802,00
5.1.2.03.02.35	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	240.280.000,00	0,00	239.853.344,00	239.853.344,00	99,82	(426.656,00)	0,00
5.1.2.03.02.36	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	104.619.284,00
5.1.2.03.02.38	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	59.160.518,00
5.1.2.03.02.12 1	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	8.540.000,00	0,00	8.540.000,00	8.540.000,00	100,00	0,00	5.490.000,00
5.1.2.03.02.40 5	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	13.870.000,00	0,00	13.870.000,00	13.870.000,00	100,00	0,00	12.050.000,00
5.1.2.03.02.41 1	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	3.450.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.2.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	51.900.000,00	0,00	51.123.722,00	51.123.722,00	98,50	(776.278,00)	72.511.827,00
5.1.2.03.03.01	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	51.900.000,00	0,00	51.123.722,00	51.123.722,00	98,50	(776.278,00)	72.511.827,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025				LEBIH/(KURANG)	REALISASI 2024
			PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	8
5.1.2.04	Belanja Perjalanan Dinas	765.994.500,00	0,00	694.637.763,00	694.637.763,00	90,68	(71.356.737,00)	1.429.456.429,00
5.1.2.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	765.994.500,00	0,00	694.637.763,00	694.637.763,00	90,68	(71.356.737,00)	1.429.456.429,00
5.1.2.04.01.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	765.994.500,00	0,00	694.637.763,00	694.637.763,00	90,68	(71.356.737,00)	1.429.456.429,00
5.1.2.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	23.316.000,00	0,00	23.292.000,00	23.292.000,00	99,90	(24.000,00)	517.805.000,00
5.1.2.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	23.316.000,00	0,00	23.292.000,00	23.292.000,00	99,90	(24.000,00)	517.805.000,00
5.1.2.05.01.01	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	23.316.000,00	0,00	23.292.000,00	23.292.000,00	99,90	(24.000,00)	17.805.000,00
5.1.2.05.01.05	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	500.000.000,00
5.1.2.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
5.1.2.05.02.01	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
5.1.5	Belanja Hibah	19.909.813.350,00	0,00	19.284.795.790,00	19.284.795.790,00	96,86	(625.017.560,00)	17.915.255.866,00
5.1.5.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	19.909.813.350,00	0,00	19.284.795.790,00	19.284.795.790,00	96,86	(625.017.560,00)	17.915.255.866,00
5.1.5.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	19.909.813.350,00	0,00	19.284.795.790,00	19.284.795.790,00	96,86	(625.017.560,00)	17.915.255.866,00
5.1.5.05.02.01	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	6.644.000.000,00	0,00	6.642.585.000,00	6.642.585.000,00	99,98	(1.415.000,00)	7.285.000.000,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025				LEBIH/(KURANG)	REALISASI 2024
			PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	8
5.1.5.05.02.02	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	13.265.813.350,00	0,00	12.642.210.790,00	12.642.210.790,00	95,30	(623.602.560,00)	10.630.255.866,00
5.2	BELANJA MODAL	66.515.000,00	0,00	65.235.960,00	65.235.960,00	98,08	(1.279.040,00)	2.322.630.250,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	521.491.700,00
5.2.2.01	Belanja Modal Alat Besar	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	402.560.000,00
5.2.2.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	402.560.000,00
5.2.2.01.03.16	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	402.560.000,00
5.2.2.04	Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	1.196.000,00
5.2.2.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	1.196.000,00
5.2.2.04.01.10	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	1.196.000,00
5.2.2.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	61.791.700,00
5.2.2.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	18.511.700,00
5.2.2.05.01.05	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	18.511.700,00
5.2.2.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	43.280.000,00
5.2.2.05.02.04	Belanja Modal Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	43.280.000,00
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	55.944.000,00
5.2.2.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	55.944.000,00
5.2.2.10.01.03	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	55.944.000,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	66.515.000,00	0,00	65.235.960,00	65.235.960,00	98,08	(1.279.040,00)	1.801.138.550,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025				LEBIH/(KURANG)	REALISASI 2024
			PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	8
5.2.3.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	66.515.000,00	0,00	65.235.960,00	65.235.960,00	98,08	(1.279.040,00)	1.801.138.550,00
5.2.3.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	66.515.000,00	0,00	65.235.960,00	65.235.960,00	98,08	(1.279.040,00)	1.801.138.550,00
5.2.3.01.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	66.515.000,00	0,00	65.235.960,00	65.235.960,00	98,08	(1.279.040,00)	1.801.138.550,00
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		(45.745.299.583,00)	0,00	(43.070.640.880,00)	(43.070.640.880,00)	94,15	2.674.658.703,00	(42.505.815.898,00)



Kab. Purworejo, 31 Desember 2025
KEPALA DINAS KETANANAN
PANGAN DAN PERTANIAN

Bagas Adi Karyanto, S.Sos.,M.M.
NIP. 197304211993021001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Jl. Mayjend Sutoyo No. 29 - 31 Purworejo Kode Pos 54114
Telepon (0275) 321404 Faksimile (0275) 321015
Laman dkpp.purworejokab.go.id. Pos-el dkpp@purworejokab.go.id.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR: 160.0007/4841/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 160.040/002/2022
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat mengukur kinerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo, diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo yaitu dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 14);
- 9. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 137 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 137), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 137 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026.

Memperhatikan : Keputusan Bupati Purworejo Nomor 16.18/551/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 160.040/002/2022 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dapat digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purworejo
Pada tanggal : 25 Juli 2024



Kepala Dinas Ketahanan Pangan
dan Pertanian Kabupaten Purworejo,

HADI SADSILA, S.P., M.M.
Pembina Utama Muda / IV c
NIP 196805051997031008

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR: 160.0007/4841/2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN
PURWOREJO NOMOR 160.040/002/2022 TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	METODOLOGI	FORMULA	SATUAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Hasil survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik terhadap 9 (sembilan) unsur penilaian: 1) Persyaratan; 2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; 3) Waktu Penyelesaian; 4) Biaya/ Tarif; 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; 6) Kompetensi Pelaksana; 7) Perilaku Pelaksana; 8) Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan; serta 9) Sarana dan Prasarana. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik pada tahun yang tertentu	= Nilai hasil survey kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik terhadap 9 (sembilan) unsur penilaian	Indeks	DKPP

2	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Ketersediaan Pangan Utama	Ketersediaan pangan utama (beras) per tahun per kapita	= Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama (beras) pada tahun n (kg) / Jumlah penduduk pada tahun n	Kg/ kapita	DKPP
3	Meningkatnya Produksi Pertanian	Persentase Kenaikan Produksi Pertanian	Persentase kenaikan produksi pertanian tahun n terhadap produksi pertanian tahun sebelumnya (n-1)	= (Jumlah produksi pertanian tahun n - Jumlah produksi pertanian tahun n-1) / Jumlah produksi pertanian tahun n x 100%	%	DKPP



Kepala Dinas Ketahanan Pangan
dan Pertanian Kabupaten Purworejo,

HADI SADSILA, S.P., M.M.
Pembina Utama Muda / IV c
NIP 196805051997031008

LAPORAN REALISASI KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN

S/D BULAN DESEMBER 2025

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

No.	Rek.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi					Deviasi Fisik (%)	KET
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
															Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.120.625.763				20.120.625.763							15	16	17	18	19	20	21	22
1	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.685.300				49.685.300							100,00	18.228.055.322	873.855.114	19.101.910.436	94,94	100,00	0,00	
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.852.600				23.852.600							100,00	18.149.000	28.504.930	46.653.930	93,90	100,00	0,00	
1		Persiapan pelaksanaan kegiatan sub penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah (15.00)	3.800.000				3.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		3.800.000	100,00		3.800.000	3.800.000	100,00	100,00	0,00	
2		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada sub penyusunan dokumen perencanaan (80.00)	18.152.600				18.152.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		18.152.600	100,00	18.149.000		18.149.000	99,98	100,00	0,00	
3		Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (5.00)	1.900.000				1.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		1.900.000	100,00		1.360.000	1.360.000	71,58	100,00	0,00	
	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.832.700				25.832.700							100,00		23.344.930	23.344.930	90,37	100,00	0,00	
1		Persiapan pelaksanaan kegiatan sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah (15.00)	7.178.000				7.178.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		7.178.000	100,00		7.178.000	7.178.000	100,00	100,00	0,00	
2		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (80.00)	15.065.700				15.065.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		15.065.700	100,00		14.698.200	14.698.200	97,56	100,00	0,00	
3		Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (5.00)	3.589.000				3.589.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		3.589.000	100,00		1.468.730	1.468.730	40,92	100,00	0,00	
2	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.226.323.113				19.226.323.113							100,00	18.207.989.522	7.823.093	18.215.812.615	94,74	100,00	0,00	
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.218.500.013				19.218.500.013							100,00	18.207.989.522		18.207.989.522	94,74	100,00	0,00	
1		Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN (100.00)	19.218.500.013				19.218.500.013	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		19.218.500.013	100,00	18.207.989.522		18.207.989.522	94,74	100,00	0,00	
	2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	500.000				500.000							100,00		500.000	500.000	100,00	100,00	0,00	
1		Persiapan data untuk laporan keuangan akhir tahun (10.00)	50.000				50.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		50.000	100,00		50.000	50.000	100,00	100,00	0,00	
2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (85.00)	400.000				400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		400.000	100,00		400.000	400.000	100,00	100,00	0,00	
3		Pelaporan Laporan Keuangan Akhir Tahun Reviu BPK Audited (5.00)	50.000				50.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		50.000	100,00		50.000	50.000	100,00	100,00	0,00	
	2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.323.100				7.323.100							100,00		7.323.093	7.323.093	100,00	100,00	0,00	
1		Persiapan penyusunan uang persediaan (10.00)	1.460.000				1.460.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		1.460.000	100,00		1.460.000	1.460.000	100,00	100,00	0,00	
2		Pengelolaan administrasi keuangan bulanan (85.00)	5.131.100				5.131.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		5.131.100	100,00		5.131.100	5.131.100	100,00	100,00	0,00	
3		Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan (5.00)	732.000				732.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		732.000	100,00		731.993	731.993	100,00	100,00	0,00	
	2.09.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	513.200				513.200							100,00	413.200	100.000	513.200	100,00	100,00	0,00	
	2.09.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	513.200				513.200							100,00	413.200	100.000	513.200	100,00	100,00	0,00	
1		Persiapan penyusunan laporan retribusi (10.00)	50.000				50.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		50.000	100,00		50.000	50.000	100,00	100,00	0,00	
2		Pencatatan laporan retribusi bulanan (85.00)	413.200				413.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		413.200	100,00	413.200		413.200	100,00	100,00	0,00	
3		Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sub kegiatan pelaporan pengelolaan retribusi (5.00)	50.000				50.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		50.000	100,00		50.000	50.000	100,00	100,00	0,00	
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	460.000				460.000							100,00		460.000	460.000	100,00	100,00	0,00	
	2.09.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	460.000				460.000							100,00		460.000	460.000	100,00	100,00	0,00	
		Jumlah	45.897.321.383	66.515.000			45.963.836.383					2.454.560.575	11.517.894.225	100,00	23.480.256.722	20.009.962.968	43.490.219.690	94,62	100,00	0,00	

No.	Rek.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi					Deviasi Fisik (%)	KET
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Keuangan						
															Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%	Fisik %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan (100.00)	460.000				460.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		460.000	100,00		460.000	460.000	100,00	100,00	0,00	
	2.09.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0				0							0,00			0	0,00	0,00	0,00	
	1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (0.00)	0				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	
5	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	291.392.300				291.392.300							0	0,00		0	0,00	0,00	0,00	
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.513.800				5.513.800							100,00		289.865.452	289.865.452	99,48	100,00	0,00	
	1	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor (100.00)	5.513.800				5.513.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		5.513.800	100,00		5.463.000	5.463.000	99,08	100,00	0,00	
	2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.603.000				3.603.000							100,00		5.463.000	5.463.000	99,08	100,00	0,00	
	1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (100.00)	3.603.000				3.603.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		3.603.000	100,00		3.593.000	3.593.000	99,72	100,00	0,00	
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	203.591.300				203.591.300							100,00		3.593.000	3.593.000	99,72	100,00	0,00	
	1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (100.00)	203.591.300				203.591.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		203.591.300	100,00		202.871.600	202.871.600	99,65	100,00	0,00	
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.400.000				8.400.000							100,00		202.871.600	202.871.600	99,65	100,00	0,00	
	1	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (100.00)	8.400.000				8.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		8.400.000	100,00		8.071.560	8.071.560	96,09	100,00	0,00	
	2.09.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	3.380.000				3.380.000							100,00		8.071.560	8.071.560	96,09	100,00	0,00	
	1	Penyediaan Bahan/Material (100.00)	3.380.000				3.380.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		3.380.000	100,00		3.360.000	3.360.000	99,41	100,00	0,00	
	2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.800.000				1.800.000							100,00		3.360.000	3.360.000	99,41	100,00	0,00	
	1	Fasilitasi Kunjungan Tamu (100.00)	1.800.000				1.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		1.800.000	100,00		1.800.000	1.800.000	100,00	100,00	0,00	
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52.081.200				52.081.200							100,00		1.800.000	1.800.000	100,00	100,00	0,00	
	1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (100.00)	52.081.200				52.081.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		52.081.200	100,00		51.695.590	51.695.590	99,26	100,00	0,00	
	2.09.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13.023.000				13.023.000							100,00		51.695.590	51.695.590	99,26	100,00	0,00	
	1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (100.00)	13.023.000				13.023.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		13.023.000	100,00		13.010.702	13.010.702	99,91	100,00	0,00	
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	232.708.250				232.708.250							100,00		13.010.702	13.010.702	99,91	100,00	0,00	
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	88.075.250				88.075.250							100,00		230.264.573	230.264.573	98,95	100,00	0,00	
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (100.00)	88.075.250				88.075.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		88.075.250	100,00		87.262.950	87.262.950	99,08	100,00	0,00	
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	144.633.000				144.633.000							100,00		87.262.950	87.262.950	99,08	100,00	0,00	
	1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (100.00)	144.633.000				144.633.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		144.633.000	100,00		143.001.623	143.001.623	98,87	100,00	0,00	
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	319.543.600				319.543.600							100,00	1.503.600	316.837.066	318.340.666	99,62	100,00	0,00	
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.960.000				43.960.000							100,00		43.831.644	43.831.644	99,71	100,00	0,00	
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (100.00)	43.960.000				43.960.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		43.960.000	100,00		43.831.644	43.831.644	99,71	100,00	0,00	
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	196.320.000				196.320.000							100,00		196.021.700	196.021.700	99,85	100,00	0,00	
	1	Perbaikan Kendaraan Dinas Roda empat,tiga, dua dan pembayaran pajak kendaraan Dnas Roda empat,tiga ,dua (100.00)	196.320.000				196.320.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		196.320.000	100,00		196.021.700	196.021.700	99,85	100,00	0,00	
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.320.000				17.320.000							100,00		17.320.000	17.320.000	100,00	100,00	0,00	
	1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (100.00)	17.320.000				17.320.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d		17.320.000	100,00		17.320.000	17.320.000	100,00	100,00	0,00	
		Jumlah	45.897.321.383	66.515.000			45.963.836.383					2.454.560.575	11.517.894.225	100,00	23.480.256.722	20.009.962.968	43.490.219.690	94,62	100,00	0,00	

Rek.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi					Deviasi Fisik (%)	KET
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
														Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
										31-Dec-2025										
2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	51.900.000				51.900.000							100,00		51.123.722	51.123.722	98,50	100,00	0,00	
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (100.00)	51.900.000				51.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		51.900.000	100,00		51.123.722	51.123.722	98,50	100,00	0,00	
2.09.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.540.000				8.540.000							100,00		8.540.000	8.540.000	100,00	100,00	0,00	
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (100.00)	8.540.000				8.540.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		8.540.000	100,00		8.540.000	8.540.000	100,00	100,00	0,00	
2.09.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	1.503.600				1.503.600							100,00	1.503.600		1.503.600	100,00	100,00	0,00	
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah (100.00)	1.503.600				1.503.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		1.503.600	100,00	1.503.600		1.503.600	100,00	100,00	0,00	
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	1.019.576.000				1.019.576.000							100,00		1.002.852.967	1.002.852.967	98,36	100,00	0,00	
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.019.576.000				1.019.576.000							100,00		1.002.852.967	1.002.852.967	98,36	100,00	0,00	
2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	1.019.576.000				1.019.576.000							100,00		1.002.852.967	1.002.852.967	98,36	100,00	0,00	
1	Persiapan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya (15.00)	1.064.000				1.064.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		1.064.000	100,00		1.064.000	1.064.000	100,00	100,00	0,00	
2	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya (80.00)	1.018.072.000				1.018.072.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		1.018.072.000	100,00		1.001.388.967	1.001.388.967	98,36	100,00	0,00	
3	Penyusunan laporan dan cetak sub kemandirian pangan (5.00)	440.000				440.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		440.000	100,00		400.000	400.000	90,91	100,00	0,00	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.231.619.700				1.231.619.700							100,00		1.192.935.316	1.192.935.316	96,86	100,00	0,00	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Dserah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	67.963.900				67.963.900							100,00		64.673.515	64.673.515	95,16	100,00	0,00	
2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	45.004.600				45.004.600							100,00		42.978.070	42.978.070	95,50	100,00	0,00	
1	Persiapan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (15.00)	944.000				944.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		944.000	100,00		943.998	943.998	100,00	100,00	0,00	
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (80.00)	43.074.600				43.074.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		43.074.600	100,00		42.034.072	42.034.072	97,58	100,00	0,00	
3	Penyusunan laporan dan cetak sub distribusi pangan pokok (5.00)	986.000				986.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		986.000	100,00			0	0,00	100,00	0,00	
2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	10.708.000				10.708.000							100,00		9.661.134	9.661.134	90,22	100,00	0,00	
1	Persiapan Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan (15.00)	688.000				688.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		688.000	100,00		688.000	688.000	100,00	100,00	0,00	
2	Rapat rencana Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan (80.00)	9.176.400				9.176.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		9.176.400	100,00		8.157.634	8.157.634	88,90	100,00	0,00	
3	Penyusunan laporan dan cetak sub peantauan harga pangan (5.00)	843.600				843.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		843.600	100,00		815.500	815.500	96,67	100,00	0,00	
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	12.251.300				12.251.300							100,00		12.034.311	12.034.311	98,23	100,00	0,00	
1	Persiapan pelaksasaan sub kegiatan Neraca Bahan Pangan (15.00)	717.000				717.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		717.000	100,00		716.999	716.999	100,00	100,00	0,00	
2	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) (80.00)	10.738.700				10.738.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		10.738.700	100,00		10.738.700	10.738.700	100,00	100,00	0,00	
3	Pelaporan kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) (5.00)	795.600				795.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		795.600	100,00		578.612	578.612	72,73	100,00	0,00	
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	1.145.555.800				1.145.555.800							100,00		1.110.215.410	1.110.215.410	96,92	100,00	0,00	
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1.145.555.800				1.145.555.800							100,00		1.110.215.410	1.110.215.410	96,92	100,00	0,00	
Jumlah		45.897.321.383	66.515.000			45.963.836.383					2.454.560.575	11.517.894.225	100,00	23.480.256.722	20.009.962.968	43.490.219.690	94,62	100,00	0,00	

No.	Rek.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi					Deviasi Fisik (%)	KET
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
															Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	1	Persiapan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (15.00)	1.342.000				1.342.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		1.342.000	100,00		1.342.000	1.342.000	100,00	100,00	0,00	
	2	Pengadaan cadangan pangan (80.00)	1.143.503.400				1.143.503.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		1.143.503.400	100,00		1.108.163.010	1.108.163.010	96,91	100,00	0,00	
	3	Penyusunan laporan kegiatan pengadaan cadangan pangan (5.00)	710.400				710.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		710.400	100,00		710.400	710.400	100,00	100,00	0,00	
11	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	18.100.000				18.100.000							100,00		18.046.391	18.046.391	99,70	100,00	0,00	
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	18.100.000				18.100.000							100,00		18.046.391	18.046.391	99,70	100,00	0,00	
	1	Persiapan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (15.00)	814.000				814.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		814.000	100,00		811.739	811.739	99,72	100,00	0,00	
	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (80.00)	16.092.400				16.092.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		16.092.400	100,00		16.041.052	16.041.052	99,68	100,00	0,00	
	3	Penyusunan laporan kegiatan (5.00)	1.193.600				1.193.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		1.193.600	100,00		1.193.600	1.193.600	100,00	100,00	0,00	
	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	61.464.900				61.464.900							100,00		59.797.897	59.797.897	97,29	100,00	0,00	
12	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	7.410.500				7.410.500							100,00		6.892.979	6.892.979	93,02	100,00	0,00	
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	7.410.500				7.410.500							100,00		6.892.979	6.892.979	93,02	100,00	0,00	
	1	Persiapan pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (15.00)	663.500				663.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		663.500	100,00		402.499	402.499	60,66	100,00	0,00	
	2	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (80.00)	5.699.000				5.699.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		5.699.000	100,00		5.442.480	5.442.480	95,50	100,00	0,00	
	3	Pelaporan sub kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (5.00)	1.048.000				1.048.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		1.048.000	100,00		1.048.000	1.048.000	100,00	100,00	0,00	
13	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	54.054.400				54.054.400							100,00		52.904.918	52.904.918	97,87	100,00	0,00	
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	54.054.400				54.054.400							100,00		52.904.918	52.904.918	97,87	100,00	0,00	
	1	Persiapan Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota (15.00)	3.257.100				3.257.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		3.257.100	100,00		3.243.473	3.243.473	99,58	100,00	0,00	
	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota (80.00)	50.089.300				50.089.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		50.089.300	100,00		48.953.445	48.953.445	97,73	100,00	0,00	
	3	Pelaporan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota (5.00)	708.000				708.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		708.000	100,00		708.000	708.000	100,00	100,00	0,00	
	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	24.791.500				24.791.500							100,00		23.226.504	23.226.504	93,69	100,00	0,00	
14	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	24.791.500				24.791.500							100,00		23.226.504	23.226.504	93,69	100,00	0,00	
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	4.675.700				4.675.700							100,00		4.011.780	4.011.780	85,80	100,00	0,00	
	1	Persiapan Pelaksanaan Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (10.00)	473.000				473.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		473.000	100,00		227.000	227.000	47,99	100,00	0,00	
	2	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (85.00)	3.759.100				3.759.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		3.759.100	100,00		3.750.100	3.750.100	99,76	100,00	0,00	
	3	Pelaporan Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (5.00)	443.600				443.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		443.600	100,00		34.680	34.680	7,82	100,00	0,00	
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	12.613.900				12.613.900							100,00		11.783.880	11.783.880	93,42	100,00	0,00	
	1	Persiapan Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (15.00)	391.500				391.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		391.500	100,00		391.500	391.500	100,00	100,00	0,00	
	2	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (80.00)	11.738.800				11.738.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		11.738.800	100,00		10.959.200	10.959.200	93,36	100,00	0,00	
	3	Pelaporan Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah	483.600				483.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d		483.600	100,00		433.180	433.180	89,57	100,00	0,00	
		Jumlah	45.897.321.383	66.515.000			45.963.836.383					2.454.560.575	11.517.894.225	100,00	23.480.256.722	20.009.962.968	43.490.219.690	94,62	100,00	0,00	

No.	Rek.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi					Deviasi Fisik (%)	KET
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
															Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Kabupaten/Kota (5.00)									31-Dec-2025										
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	7.501.900				7.501.900							100,00		7.430.844	7.430.844	99,05	100,00	0,00	
1		Persiapan Pelaksanaan Sub Kegiatan Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (15.00)	1.105.000				1.105.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		1.105.000	100,00		1.105.000	1.105.000	100,00	100,00	0,00	
2		Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (80.00)	5.659.500				5.659.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		5.659.500	100,00		5.588.444	5.588.444	98,74	100,00	0,00	
3		Pelaporan Sub Kegiatan Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (5.00)	737.400				737.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		737.400	100,00		737.400	737.400	100,00	100,00	0,00	
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	13.972.454.800				13.972.454.800									737.400	737.400	100,00	100,00	0,00	
15	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	4.851.803.800				4.851.803.800					2.454.560.575	11.517.894.225	100,00		13.135.636.425	13.135.636.425	94,01	100,00	0,00	
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4.525.923.800				4.525.923.800							100,00		4.310.305.438	4.310.305.438	88,84	100,00	0,00	
														100,00		4.052.383.145	4.052.383.145	89,54	100,00	0,00	
1		Persiapan kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (5.00)	11.291.400				11.291.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		11.291.400	100,00		11.291.400	11.291.400	100,00	100,00	0,00	
2		Adminstrasi Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (20.00)	281.967.600				281.967.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		281.967.600	100,00		240.720.972	240.720.972	85,37	100,00	0,00	
3		Pelaksanaan hibah sarana pertanian (50.00)	3.449.411.700				3.449.411.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		3.449.411.700	100,00		3.100.433.211	3.100.433.211	89,88	100,00	0,00	
4		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (DBHCHT) (20.00)	778.253.100				778.253.100	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		778.253.100	100,00		696.187.562	696.187.562	89,46	100,00	0,00	
5		Pelaporan subkegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (5.00)	5.000.000				5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		5.000.000	100,00		3.750.000	3.750.000	75,00	100,00	0,00	
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	325.880.000				325.880.000							100,00		257.922.293	257.922.293	79,15	100,00	0,00	
1		Persiapan kegiatan (10.00)	500.000				500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		500.000	100,00		500.000	500.000	100,00	100,00	0,00	
2		Administrasi Pendamping Hibah pada Subkegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (35.00)	12.174.500				12.174.500	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		12.174.500	100,00		11.155.511	11.155.511	91,63	100,00	0,00	
3		Hibah bibit tanaman (50.00)	312.625.500				312.625.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		312.625.500	100,00		245.686.782	245.686.782	78,59	100,00	0,00	
4		Pelaporan Subkegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (5.00)	580.000				580.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		580.000	100,00		580.000	580.000	100,00	100,00	0,00	
16	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	3.306.991.075				3.306.991.075					2.454.560.575	852.430.500	100,00		3.107.238.605	3.107.238.605	93,96	100,00	0,00	
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	2.888.843.575				2.888.843.575					2.454.560.575	434.283.000	100,00		2.791.048.676	2.791.048.676	96,61	100,00	0,00	
1		Persiapan pelaksanaan kegiatan (5.00)	3.441.400				3.441.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		3.441.400	100,00		3.441.400	3.441.400	100,00	100,00	0,00	
2		Operasional layanan IB (15.00)	356.818.850				356.818.850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		356.818.850	100,00		319.283.717	319.283.717	89,48	100,00	0,00	
4		Hibah Ternak Kambing Kaligesing (75.00)	2.527.583.325				2.527.583.325	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025	2.454.560.575	73.022.750	100,00		2.467.323.559	2.467.323.559	97,62	100,00	0,00	
5		Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sub kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (5.00)	1.000.000				1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		1.000.000	100,00		1.000.000	1.000.000	100,00	100,00	0,00	
	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	418.147.500				418.147.500							100,00		316.189.929	316.189.929	75,62	100,00	0,00	
1		Persiaplatanan pelaksanaan ke (10.00)	2.460.700				2.460.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		2.460.700	100,00		2.460.700	2.460.700	100,00	100,00	0,00	
2		Pelaksanaan Penjaminan Kemurnian dan Kualitas SDG Tanaman (85.00)	415.686.800				415.686.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		415.686.800	100,00		313.729.229	313.729.229	75,47	100,00	0,00	
3		Pelaporan Subkegiatan Penjaminan Keamanan Pangan (5.00)	0				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		0	100,00		0	0,00	100,00	0,00	0,00	
		Jumlah	45.897.321.383	66.515.000			45.963.836.383					2.454.560.575	11.517.894.225	100,00	23.480.256.722	20.009.962.968	43.490.219.690	94,62	100,00	0,00	

No.	Rek.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi					Deviasi Fisik (%)	KET
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
															Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
17	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	5.813.659.925				5.813.659.925							100,00		5.718.092.382	5.718.092.382	98,36	100,00	0,00	
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	5.813.659.925				5.813.659.925							100,00		5.718.092.382	5.718.092.382	98,36	100,00	0,00	
	1	Persiapan pelaksanaan kegiatan (penyusunan SK Tim Pelaksana Kegiatan, rapat persiapan) (5.00)	28.852.300				28.852.300	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		28.852.300	100,00		28.852.300	28.852.300	100,00	100,00	0,00	
	2	Administrasi pendampingan Hibah (15.00)	190.659.500				190.659.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		190.659.500	100,00		156.674.109	156.674.109	82,17	100,00	0,00	
	3	Hibah Ternak sapi (25.00)	3.196.353.125				3.196.353.125	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		3.196.353.125	100,00		3.160.582.250	3.160.582.250	98,88	100,00	0,00	
	4	Hibah Tenak Kambing Jawa Randu (25.00)	1.735.287.500				1.735.287.500	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		1.735.287.500	100,00		1.721.600.893	1.721.600.893	99,21	100,00	0,00	
	5	Hibah ternak Domba (25.00)	659.507.500				659.507.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		659.507.500	100,00		647.882.830	647.882.830	98,24	100,00	0,00	
	6	Pelaporan pelaksanaan hibah ternak ruminan LD (5.00)	3.000.000				3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		3.000.000	100,00		2.500.000	2.500.000	83,33	100,00	0,00	
	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	6.809.288.500	66.515.000			6.875.803.500							100,00	5.252.201.400	1.596.002.060	6.848.203.460	99,60	100,00	0,00	
18	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	6.784.938.100	66.515.000			6.851.453.100							100,00	5.252.201.400	1.571.820.060	6.824.021.460	99,60	100,00	0,00	
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	5.349.097.700				5.349.097.700							100,00	5.184.000.000	145.287.700	5.329.287.700	99,63	100,00	0,00	
	1	Persiapan kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (10.00)	1.405.400				1.405.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		1.405.400	100,00		1.405.400	1.405.400	100,00	100,00	0,00	
	2	Administrasi pendampingan Hibah JUT (10.00)	163.492.300				163.492.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		163.492.300	100,00		143.682.300	143.682.300	87,88	100,00	0,00	
	3	Hibah Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (75.00)	5.184.000.000				5.184.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 4		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		5.184.000.000	100,00	5.184.000.000		5.184.000.000	100,00	100,00	0,00	
	4	Pelaporan kegiatan Hibah Jalan Usaha Tani (5.00)	200.000				200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		200.000	100,00		200.000	200.000	100,00	100,00	0,00	
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya		66.515.000			66.515.000							100,00		65.235.960	65.235.960	98,08	100,00	0,00	
	1	persiapan pembangunan prasarana di balai penyuluhan (10.00)		6.651.500			6.651.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		6.651.500	100,00		5.398.210	5.398.210	81,16	100,00	0,00	
	2	Pelaksanaan pembangunan prasarana di Balai Penyuluhan Pertanian (85.00)		56.537.750			56.537.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		56.537.750	100,00		56.537.750	56.537.750	100,00	100,00	0,00	
	3	evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana di BPP (5.00)		3.325.750			3.325.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		3.325.750	100,00		3.300.000	3.300.000	99,23	100,00	0,00	
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1.435.840.400				1.435.840.400							100,00	68.201.400	1.361.296.400	1.429.497.800	99,56	100,00	0,00	
	1	Persiapan kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani (10.00)	1.156.400				1.156.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		1.156.400	100,00		1.156.400	1.156.400	100,00	100,00	0,00	
	2	Administrasi pendampingan Hibah Jaringan Irigasi Usaha Tani (10.00)	74.544.000				74.544.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	Swakelola Tipe 4		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		74.544.000	100,00	68.201.400		68.201.400	91,49	100,00	0,00	
	3	Hibah Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani (Hibah Uang) (75.00)	1.360.000.000				1.360.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		1.360.000.000	100,00		1.360.000.000	1.360.000.000	100,00	100,00	0,00	
	4	Pelaporan kegiatan Hibah (5.00)	140.000				140.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		140.000	100,00		140.000	140.000	100,00	100,00	0,00	
19	3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	24.350.400				24.350.400							100,00		24.182.000	24.182.000	99,31	100,00	0,00	
	3.27.03.2.03.0002	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	24.350.400				24.350.400							100,00		24.182.000	24.182.000	99,31	100,00	0,00	
		Jumlah	45.897.321.383	66.515.000			45.963.836.383					2.454.560.575	11.517.894.225	100,00	23.480.256.722	20.009.962.968	43.490.219.690	94,62	100,00	0,00	

No.	Rek.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi					Deviiasi Fisik (%)	KET
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
															Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	1	Persiapan kegiatan perwilayahan sumber bibit (10.00)	2.370.000				2.370.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		2.370.000	100,00		2.359.000	2.359.000	99,54	100,00	0,00	
	2	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak (85.00)	21.830.400				21.830.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		21.830.400	100,00		21.673.000	21.673.000	99,28	100,00	0,00	
	3	Pelaporan kegiatan Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak (5.00)	150.000				150.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		150.000	100,00		150.000	150.000	100,00	100,00	0,00	
	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	160.032.600				160.032.600														
20	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	93.383.600				93.383.600							100,00		155.632.763	155.632.763	97,25	100,00	0,00	
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	93.383.600				93.383.600							100,00		92.695.658	92.695.658	99,26	100,00	0,00	
	1	Persiapan Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner (10.00)	1.004.300				1.004.300	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		1.004.300	100,00		1.004.300	1.004.300	100,00	100,00	0,00	
	2	Pelayanan kesehatan hewan (85.00)	91.676.500				91.676.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		91.676.500	100,00		91.164.558	91.164.558	99,44	100,00	0,00	
	3	Laporan Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner (5.00)	702.800				702.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		702.800	100,00		526.800	526.800	74,96	100,00	0,00	
21	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	66.649.000				66.649.000									62.937.105	62.937.105	94,43	100,00	0,00	
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	66.649.000				66.649.000							100,00		62.937.105	62.937.105	94,43	100,00	0,00	
	1	Perispan Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (10.00)	2.232.900				2.232.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		2.232.900	100,00		2.232.900	2.232.900	100,00	100,00	0,00	
	2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (85.00)	63.186.100				63.186.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		63.186.100	100,00		59.874.205	59.874.205	94,76	100,00	0,00	
	3	Laporan sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (5.00)	1.230.000				1.230.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		1.230.000	100,00		830.000	830.000	67,48	100,00	0,00	
	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	154.209.400				154.209.400														
22	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	154.209.400				154.209.400							100,00		151.652.395	151.652.395	98,34	100,00	0,00	
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	154.209.400				154.209.400							100,00		151.652.395	151.652.395	98,34	100,00	0,00	
	1	Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian OPT (10.00)	12.004.000				12.004.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		12.004.000	100,00		12.004.000	12.004.000	100,00	100,00	0,00	
	2	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (85.00)	140.205.400				140.205.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		140.205.400	100,00		138.493.535	138.493.535	98,78	100,00	0,00	
	3	Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan (5.00)	2.000.000				2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		2.000.000	100,00		1.154.860	1.154.860	57,74	100,00	0,00	
	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	10.680.000				10.680.000														
23	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.680.000				10.680.000							100,00		10.680.000	10.680.000	100,00	100,00	0,00	
	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	10.680.000				10.680.000							100,00		10.680.000	10.680.000	100,00	100,00	0,00	
	1	Persiapan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian (10.00)	425.000				425.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		425.000	100,00		425.000	425.000	100,00	100,00	0,00	
	2	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian (85.00)	10.255.000				10.255.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		10.255.000	100,00		10.255.000	10.255.000	100,00	100,00	0,00	
	3	Evaluasi Hasil Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian (5.00)	0				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		0	100,00		0	0,00	100,00	100,00	0,00	
	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.332.578.220				2.332.578.220														
24	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	2.332.578.220				2.332.578.220							100,00		1.807.691.527	1.807.691.527	77,50	100,00	0,00	
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	1.357.814.000				1.357.814.000							100,00		1.807.691.527	1.807.691.527	77,50	100,00	0,00	
	1	Persiapan pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa (10.00)	22.652.000				22.652.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		22.652.000	100,00		21.621.600	21.621.600	95,45	100,00	0,00	
		Jumlah	45.897.321.383	66.515.000			45.963.836.383					2.454.560.575	11.517.894.225	100,00	23.480.256.722	20.009.962.968	43.490.219.690	94,62	100,00	0,00	

No.	Rek.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi					Deviasi Fisik (%)	KET
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
															Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa (85.00)	1.327.000.000				1.327.000.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		1.327.000.000	100,00		860.372.209	860.372.209	64,84	100,00		0,00
	3	Pelaporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa (5.00)	8.162.000				8.162.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		8.162.000	100,00		7.165.000	7.165.000	87,78	100,00		0,00
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	904.104.220				904.104.220							100,00		850.916.120	850.916.120	94,12	100,00		0,00
	1	Persiapan Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa (10.00)	8.167.000				8.167.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		8.167.000	100,00		8.167.000	8.167.000	100,00	100,00		0,00
	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa (40.00)	226.796.000				226.796.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		226.796.000	100,00		209.111.400	209.111.400	92,20	100,00		0,00
	3	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa (DBHCHT) (45.00)	664.011.220				664.011.220	DBH Cukai Hasil Tembaku (CHT)	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		664.011.220	100,00		628.507.720	628.507.720	94,65	100,00		0,00
	4	Pelaporan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa (5.00)	5.130.000				5.130.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		5.130.000	100,00		5.130.000	5.130.000	100,00	100,00		0,00
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	58.390.000				58.390.000							100,00		55.478.598	55.478.598	95,01	100,00		0,00
	1	Persiapan Pelaksanaan Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota (10.00)	4.480.000				4.480.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		4.480.000	100,00		4.480.000	4.480.000	100,00	100,00		0,00
	2	Sekolah Lapang (SL) Kelompok Tani di 5 kelompok tani pelaksana, dengan jumlah pertemuan setiap kelompok sebanyak 12 kali (85.00)	50.840.000				50.840.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		50.840.000	100,00		48.248.598	48.248.598	94,90	100,00		0,00
	3	Pelaporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota (5.00)	3.070.000				3.070.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		3.070.000	100,00		2.750.000	2.750.000	89,58	100,00		0,00
	3.27.07.2.01.0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	12.270.000				12.270.000							100,00		12.138.000	12.138.000	98,92	100,00		0,00
	1	Persiapan Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani dari 16 kecamatan (10.00)	4.972.000				4.972.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		4.972.000	100,00		4.840.000	4.840.000	97,35	100,00		0,00
	2	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani (85.00)	7.298.000				7.298.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		7.298.000	100,00		7.298.000	7.298.000	100,00	100,00		0,00
	3	Evaluasi Hasil Kegiatan Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani (5.00)	0				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		0	100,00			0	0,00	100,00		0,00
		Jumlah	45.897.321.383	66.515.000			45.963.836.383					2.454.560.575	11.517.894.225	100,00	23.480.256.722	20.009.962.968	43.490.219.690	94,62	100,00		0,00



Purworejo, 30 Desember 2025
A.n. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Sekretaris

Dra. Dede Yuni Iswantini, M.M
NIP. 198712171994032006

LAPORAN
PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)



DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN PURWOREJO
SEMESTER I
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
BAB II. PENGUMPULAN DATA SKM DARI UPP	4
BAB III. HASIL PELAKSANAAN SKM UPP	5
BAB IV. KESIMPULAN	8
LAMPIRAN	9
• Bukti Dukung Laporan Pelaksanaan SKM Pada Masing-Masing UPP	

**LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN PURWOREJO
SEMESTER I
TAHUN 2025**

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel.

Diberlakukannya Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, memberikan pedoman bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan public guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo, maka perlu diselenggarakan survei pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh penyedia publik. Caranya dengan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Hasil survei sangat penting sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyedia layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan terbaik dapat segera dicapai, dan akhirnya dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat akan hak-hak mereka sebagai warga negara.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran Kepuasan Masyarakat, yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan di lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah:

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan.
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Dengan dilakukan SKM diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II. PENGUMPULAN DATA SKM DARI UPP

Sebagai tindak lanjut terhadap Surat Sekretaris Daerah Nomor 000.8.3.4/4080/2025 tentang Pelaksanaan dan Penyampaian Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester I Tahun 2025. Selanjutnya, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo melakukan pendampingan kepada 1 (satu) UPP, serta mengingatkan UPP terkait batas waktu pelaporan SKM.

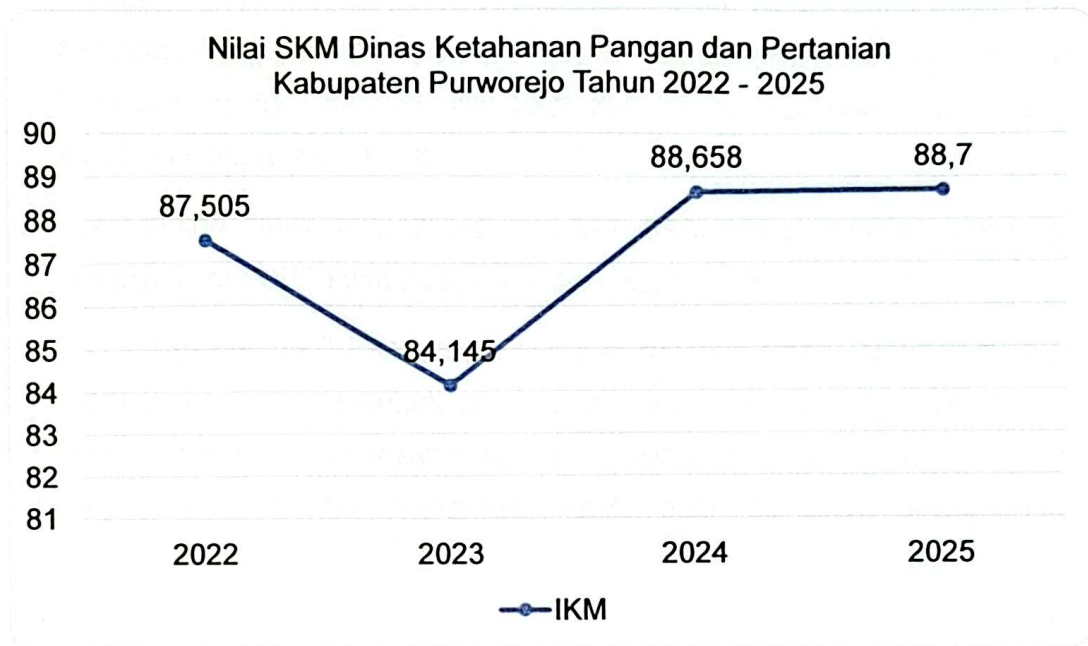
BAB III. HASIL PELAKSANAAN SKM UPP

No	OPD/ Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan*	Nilai Per Unsur**									IKM	Kategori	Jumlah responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	Realisasi Tindak Lanjut Periode Sebelumnya (%)
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9							
1	DKPP Kabupaten Purworejo	Semester 1 (April - Juni)	3,48 0	3,48 0	3,39 0	3,79 0	3,40 0	3,42 0	3,54 0	3,35 0	3,71 0	87,57	B (Baik)	100	Manual	1. Waktu Pelayanan 2. Kesesuaian produk layanan 3. Kualitas sarana dan prasarana	1. Waktu Pelayanan : Ada jadal piket di Balai Penyuluh Pertanian (BPP) sehingga pelayanan bisa setiap saat 2. Produk Layanan : Menambah durasi layanan 3. Sarana dan Prasarana : Tersedianya materi penyuluhan seperti brosur, leafet.	50%
2.	UPT Puskesmas	Semester 1 (Mei-Juni)	3,45	3,57	3,44	4	3,53	3,63	3,70	3,40	3,63	89,83	A (Sangat Baik)	108	Manual	1. Produk Layanan 2. Waktu Pelayanan 3. Sarana dan Prasarana	1. Produk Layanan : Menambah durasi jam pelayanan hewan kecil 2. Waktu Pelayanan : Penambahan ruang pemeriksaan agar dalam waktu bersamaan dapat melayani lebih	50%

No	OPD/ Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan*	Nilai Per Unsur**									IKM	Kategori	Jumlah responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	Realisasi Tindak Lanjut Periode Sebelumnya (%)
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9							
																	dari satu pasien 3. Sarana dan Prasarana : Penambahan ruang pelayanan, karena proses yang tidak mudah maka belum terlaksana	
		Rata-Rata Tahunan	3,46 5	3,52 5	3,41 5	3,89 5	3,46 5	3,52 5	3,62	3,37 5	3,67	88,70	A (Sangat Baik)	208				

*Form hasil pelaporan SKM dalam format excel terdapat pada bitly https://drive.google.com/file/d/1ILCp0DB4qpBW_HBft2nft36yfLL8A-r/view?usp=sharing

Jika melihat kecenderungan (trend) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik, trend tingkat kepuasan penerima layanan di lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo dapat dilihat melalui grafik berikut:



Berdasarkan table di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi kenaikan penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2022 hingga 2025 di lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo.

BAB IV. KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai April sampai dengan Juni 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang baik dengan nilai SKM dari tahun sebelumnya mengalami kenaikan dengan nilai 88,70.
2. Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan SKM yang sudah dilakukan, sebanyak satu UPP telah menyampaikan laporannya.
3. Dari pelaporan hasil SKM, telah terdapat rencana tindak lanjut terhadap unsur layanan yang menjadi prioritas perbaikan. Inovasi pelayanan publik dalam bentuk terobosan-terobosan pelayanan diperlukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik agar kepuasan masyarakat meningkat.

Purworejo, 30 Juni 2025

Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
dan Pertanian
Kabupaten Purworejo,



Wiyoto Harjono, S.T.

Pembina Tingkat I / IVb

NIP 197804202003121007

LAMPIRAN

Bukti Dukung Laporan Pelaksanaan SKM Pada Masing-Masing UPP

No	Nama UPP	Link Laporan Pelaksanaan SKM*
1	DKPP	https://drive.google.com/file/d/1TQO1KjHNUT_dS8inSw-beNlvUc6NWj3-/view?usp=sharing
1.a	Lampiran Pengolahan Data-skmDINSOS2025 sem1	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v1CJOvpNrw4c1fL0NoeDkjYlpVlc7qqh/edit?usp=sharing&ouid=107993316458228836879&rtpof=true&sd=true
1.b	Lampiran Dokumentasi Pelaksanaan SKM - Dinsos	https://drive.google.com/file/d/1dzCb6ZNhUW9yC5nGR9D303_hsLMwyMm2/view?usp=sharing
1.c	Laporan Tindak Lanjut SKM Sem.II Tahun 2024	https://drive.google.com/file/d/151Viq_01ITLKDoEqXpmhrbOCFqB2scYb/view?usp=sharing
2	UPT Puskesmas	https://drive.google.com/file/d/1TQO1KjHNUT_dS8inSw-beNlvUc6NWj3-/view?usp=sharing
2.a	Lampiran Pengolahan Data-skmRPS-TTA2025sem1	https://drive.google.com/file/d/1ILCp0DB4gpBW_HBeft2nft36yfLL8A-r/view?usp=sharing
2.b	Lampiran Dokumentasi Pelaksanaan SKM - RPSTTA	https://docs.google.com/document/d/1nE7ApLg7nglHFF9uXTM9DGjOZzcBYnX8/edit?usp=sharing&ouid=107993316458228836879&rtpof=true&sd=true
2.c	Excell Olah Data SKM SEM I Tahun 2025	https://drive.google.com/file/d/1ILCp0DB4gpBW_HBeft2nft36yfLL8A-r/view?usp=sharing

LAPORAN
PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)



DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN PURWOREJO
SEMESTER II
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
BAB II. PENGUMPULAN DATA SKM DARI UPP	4
BAB III. HASIL PELAKSANAAN SKM UPP	5
BAB IV. KESIMPULAN	8
LAMPIRAN	9
• Bukti Dukung Laporan Pelaksanaan SKM Pada Masing-Masing UPP	

**LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN PURWOREJO
SEMESTER II
TAHUN 2025**

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel.

Diberlakukannya Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, memberikan pedoman bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan public guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo, maka perlu diselenggarakan survei pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh penyedia publik. Caranya dengan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Hasil survei sangat penting sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyedia layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan terbaik dapat segera dicapai, dan akhirnya dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat akan hak-hak mereka sebagai warga negara.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran Kepuasan Masyarakat, yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan di lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah:

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan.
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Dengan dilakukan SKM diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II. PENGUMPULAN DATA SKM DARI UPP

Sebagai tindak lanjut terhadap Surat Sekretaris Daerah Nomor 000.8.3.4/11.477/2025 tentang Pelaksanaan dan Penyampaian Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester II Tahun 2025. Selanjutnya, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo melakukan pendampingan kepada 1 (satu) UPP, serta mengingatkan UPP terkait batas waktu pelaporan SKM.

BAB III. HASIL PELAKSANAAN SKM UPP

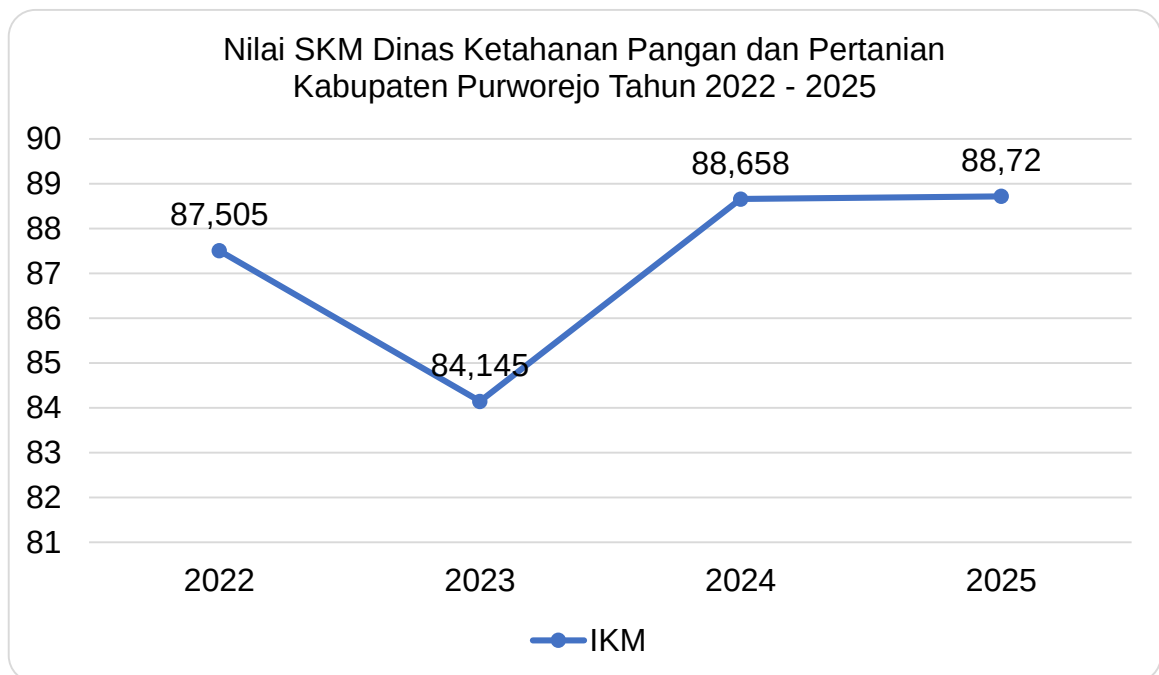
No	OPD/ Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan*	Nilai Per Unsur**									IKM	Kategori	Jumlah responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	Realisasi Tindak Lanjut Periode Sebelumnya (%)
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9							
1	DKPP Kabupaten Purworejo	Semester 2 (Juli - September)	3,44 0	3,42 0	3,39 0	3,91 0	3,34 0	3,42 0	3,52 0	3,41 0	3,72 0	87,60	B (Baik)	100	Manual	1. Penangan Pengaduan 2. Kecepatan Pelayanan 3. Kesesuaian Pelayanan	1. Penangan Pengaduan: melakukan sosialisasi ke masyarakat terutama petani tentang hal-hal yang ditangani dan menjadi urusan serta kewenangan BPP. 2. Kecepatan Pelayanan: mengintensifkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak lain. 3. Kesesuaian Pelayanan: sosialisasi teknis mengenai pertanian secara umum sehingga petani paham permasalahan dan solusinya.	87.6%
2.	UPT Puskesmas	Semester 2 (Agustus - Oktober)	3,39	3,57	3,54	3,9	3,45	3,54	3,67	3,36	3,9	89,84	A (Sangat Baik)	108	Manual	1. Sarana dan Prasarana 2. Kesesuaian Persyaratan	1. Sarana dan Prasarana: Penambahan ruang pelayanan, karena proses yang tidak	89,84%

No	OPD/ Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan*	Nilai Per Unsur**									IKM	Kategori	Jumlah responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	Realisasi Tindak Lanjut Periode Sebelumnya (%)
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9							
																	mudah maka belum terlaksana 2. Kesesuaian Persyaratan: Mengedukasi klien betapa pentingnya Kartu Anggota untuk keperluan rekam medis	
		Rata-Rata Tahunan	3,415	3,495	3,465	3,905	3,395	3,48	3,595	3,385	3,81	88,72	A (Sangat Baik)	208				

*Form hasil pelaporan SKM dalam format excel terdapat pada bitly

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YzedZt3ArUImnZhpRQUeCAexc_2m_AC3/edit?usp=sharing&oid=107993316458228836879&rtpof=true&sd=true

Jika melihat kecenderungan (trend) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik, trend tingkat kepuasan penerima layanan di lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo dapat dilihat melalui grafik berikut:



Berdasarkan table di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi kenaikan penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2022 hingga 2025 di lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo.

BAB IV. KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai Juli sampai dengan September 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang baik dengan nilai SKM dari semester sebelumnya mengalami kenaikan dengan nilai 88,72.
2. Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan SKM yang sudah dilakukan, sebanyak satu UPP telah menyampaikan laporannya.
3. Dari pelaporan hasil SKM, telah terdapat rencana tindak lanjut terhadap unsur layanan yang menjadi prioritas perbaikan. Inovasi pelayanan publik dalam bentuk terobosan-terobosan pelayanan diperlukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik agar kepuasan masyarakat meningkat.

Purworejo, November 2025
Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
dan Pertanian
Kabupaten Purworejo,



Wiyoto Harjono, S.T.
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 197804202003121007

LAMPIRAN

Bukti Dukung Laporan Pelaksanaan SKM Pada Masing-Masing UPP

No	Nama UPP	Link Laporan Pelaksanaan SKM*
1	DKPP	
1.a	Lampiran Pengolahan Data skmDKPP2025 sem2	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YzedZt3ArUImnZhpRQUeCAexc_2m_AC3/edit?usp=sharing&ouid=107993316458228836879&rtpof=true&sd=true
1.b	Lampiran Dokumentasi Pelaksanaan SKM DKPPsem 2	https://docs.google.com/document/d/1_d2eGcUTgQCrAOq87gZbFn8HotSWiz2T/edit?usp=sharing&ouid=107993316458228836879&rtpof=true&sd=true
2	UPT Puskesmas	https://drive.google.com/file/d/1V9lirG5vhcgAtRbjYy9Zj9xjgN4-Axm/view?usp=drive_link
2.a	Lampiran Pengolahan Data-skmRPS-TTA2025sem1	https://drive.google.com/file/d/1EXR7fSK5YwhbyzVJ0z_iwMO7Ahu8qMZK/view?usp=drive_link
2.b	Lampiran Dokumentasi Pelaksanaan SKM-RPSTTA	https://drive.google.com/file/d/16XL53lyGEQo7rjsph1NfQtJUszh__6Jz/view?usp=drive_link
2.c	Excell Olah Data SKM Sem II Tahun 2025	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gmOs6jCZL6CYz0VhYM2GiBcT8OQCnvBO/edit?usp=drive_link&ouid=116748424004857987876&rtpof=true&sd=true